



**EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MOTIF BATIK
KEBUMEN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL**

TESIS

**Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

Syarif Nurhidayat, S.H.

B4A 008 104

Pembimbing:

Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

**EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MOTIF BATIK
KEBUMEN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL**

Disusun Oleh:
Syarif Nurhidayat, S.H.
B4A 008 104

Dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
24 Juni 2010

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., MH.
NIP: 1961105 198603 1 002 NIP. 19490721 197603 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Syarif Nurhidayat, S.H., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua ini dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 19 Juni 2010

Penulis

Syarif Nurhidayat, S.H.

NIM. B4A 008 104

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat dan petunjuk, termasuk diantaranya nikmat dan petunjuk dalam penyelesaian karya tulis (tesis) berjudul "Eksistensi dan Perlindungan Karya Cipta Batik Kebumen sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional". Shalawat salam selayaknya pula di sampaikan kepada Rosul Muhammad SAW, yang telah menyebarkan risalah kebenaran dan keadilan kepada kita semua.

Penulis menyadari, bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan semata, sehingga pasti ada kekurangan dalam karya penulis ini. Bukan saja butuh koreksi, namun juga penyempurnaan ke depannya melalui kajian-kajian lanjutan.

Dalam keterbatasannya, penulis sadari bahwa ada banyak pihak dibalik selesainya karya tulis ini, sehingga sudah sepantasnya penulis sampaikan salam hormat dan terimakasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Ayah dan Bunda dan segenap saudara-saudara penulis atas restu dan dukungannya sehingga penulis bisa kuliah lagi.
2. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis "Eksistensi dan Perlindungan Karya Cipta Batik Kebumen sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional" berdasarkan

DIPA Sekretariat Jenderal Kementrian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008/2009.

3. Rektor Universitas Diponegoro, atas kesempatan studi di Universitas Diponegoro.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Arief Hidayat, S.H., M.S.
5. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H., atas kesempatan studi di S2 Hukum Universitas Diponegoro.
6. Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini, Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., atas bimbingan dan arahannya dalam penulisan tesis ini.
7. Dosen penguji tesis, yaitu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., Prof. Dr. Pulus Hadisuprpto, S.H., M.H., A. Tulus Sartono, S.H., M.S., dan Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Skretaris bidang Akademik dan Keuangan, dan segenap karyawan di bagian akademik dan keuangan.
9. Karyawan-Karyawati di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Perpustakaan S3 Universitas Diponegoro, dan Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah.

10. Kawan-kawan penulis di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, terutama kawan-kawan kelas Beasiswa Unggulan Diknas HET HKI, Gus Bintang, Om Bayu, Mb Cristin, Mb Diyah, Mb Indah, Bpk Fathoni, Cak Ganang, Mb Tyas, Mb Linda, Lek Adil, Mb Kunti, Pakde Rizky, Gug Mustam, yang membuat penulis bersemangat untuk mulai belajar kembali.

11. Seluruh pihak yang pernah mengajari penulis tentang beragam hal dalam kehidupan.

Demikian, dan terimakasih untuk semuanya atas segalanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

ABSTRAK

Seni batik berkembang seiring dengan industri, sehingga potensi ekonomi beriringan dengan potensi budaya yang melekat pada batik. HKI merupakan satu sistem hukum yang relatif baru yang memiliki orientasi perlindungan aset-aset ekonomi serta penghargaan atas daya kreatifitas intelektual manusia.

Penelitian ini mengkaji mengenai eksistensi dan perlindungan atas motif batik kebumen sebagai karya intelektual tradisional. Selain itu juga tentang tindakan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya mendorong perlindungan industri batik perlu dikaji bersama dengan kendalanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Karena pendekatannya yuridis empiris, maka bahan penelitian yang digunakan meliputi data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara bebas terpimpin dengan subjek yang ditentukan. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan dokumen-dokumen resmi pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder dengan beberapa literatur yang terkait. Semua data tersebut kemudian disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, eksistensi motif batik kebumen dirasakan bukan saja dari segi seni dan budaya yang menunjukkan ciri khas daerah yang sangat ekologis, namun juga secara ekonomi. *Kedua*, perlindungan motif batik Kebumen berdasarkan UU Hak Cipta dibedakan menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing masing diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (i) UU Hak Cipta. *Ketiga*, Pemerintah Kabupaten Kebumen hanya melakukan upaya non-yuridis dalam upaya meningkatkan dan mendorong perlindungan atas motif batik Kebumen, seperti pendaftaran motif-motif kontemporer ke Ditjen HKI, pelatihan-pelatihan dan pameran. Sedangkan kendala yuridis yang dihadapi diantaranya minimnya pemahaman perajin atas sistem hukum HKI, belum adanya penetapan dari pemerintah tentang jenis motif tradisional. Sementara kendala non-yuridis antara lain minimnya anggaran, minimnya nilai produksi, kesulitan bahan mentah, minimnya kreatifitas, serta persaingan dengan batik luar.

Kata Kunci: *Batik Kebumen, eksistensi, perlindungan, Hak Cipta, upaya.*

ABSTRACT

Batik art evolve with the industry, so that alongside the economic potential of cultural potential inherent in batik. IPR is a relatively new legal system which has the orientation of the protection of economic assets as well as respect for human intellectual creativity.

This study investigated the existence and protection of Kebumen batik as traditional intellectual work. It is also about government actions in an effort to encourage Kebumen batik industry protection needs to be studied together with the constraints.

This study uses empirical juridical approach with descriptive analytic. Because the juridical character of an empirical approach, the research materials used include primary and secondary data. Primary data was obtained with the technique of guided free interview with the specified subject. While secondary data used are primary legal materials such as Law No. 19 of 2002 on Copyright and official government documents, while the secondary legal materials with some related literature. All data is then compiled and analyzed using qualitative descriptive methods.

Results showed, first, the existence of batik Kebumen felt not only in terms of art and cultural shows typical areas of ecological, but also economically. Second, protection Kebumen batik motifs based on Copyright law is divided into traditional motifs and contemporary motifs. Respectively provided for in Article 10 paragraph (2) and Article 12 letter (i) Copyright Act. Third, the Government Kebumen only non-judicial efforts in promoting and encouraging protection of Kebumen batik motifs, such as a sign of contemporary motifs to the Directorate General of IPR, training and exhibition. While the juridical obstacles faced by craftsmen such as lack of understanding on IPR legal system, the lack of determination from the government about the kinds of traditional motifs. While non-juridical obstacles include lack of budget, lack of value of production, raw material difficulties, lack of creativity, and competition with outside batik.

Keywords: *Batik Kebumen, the existence, protection, Copyrights, effort.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
1. Kerangka Konseptual	9
2. Kerangka Teori	12
E. Metode Penelitian	25
1. Pendekatan Masalah	25
2. Spesifikasi Penelitian	25
3. Sumber Data	26
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Analisis Data	28
6. Sistematika Penulisan	28
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	30
1. Pengertian Istilah	31
2. Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual	33
3. Teori Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	37

4. HKI Sebagai Bagian Dari Hukum Ekonomi	40
B. Hukum Hak Cipta di Indonesia	43
1. Pengertian Hak Cipta	43
2. Prinsip-Prinsip Hak Cipta	44
3. Objek Perlindungan Hak Cipta	46
4. Masa Perlindungan Hak Cipta	49
5. Mekanisme Perlindungan	51
6. Pelanggaran atas Hak Cipta	52
7. Hak-hak yang Melekat Pada Hak Cipta	54
C. Pengaturan Tentang Hak Kekayaan Intelektual Tradisional terkait Hak Cipta	59
1. Pengertian Pengetahuan Tradisional	59
2. Urgensi Perlindungan Pengetahuan Tradisional	62
3. Hukum Hak Cipta Atas Pengetahuan Tradisional	65
D. Sejarah dan Perkembangan Seni Batik	67
1. Keragaman Kain Nusantara	67
2. Sejarah dan Perkembangan Batik di Indonesia	71
E. HKI dan Otonomi Daerah	75
1. Pengetahuan Tradisional Sebagai Salah satu Modal Pembangunan Daerah	76
2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan HKI Tradisional	80
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Eksistensi Motif Batik Kebumen Sebagai Karya Cipta Intelektual Tradisional	83
1. Kondisi Umum Kabupaten Kebumen	84
2. Sejarah dan Perkembangan Batik Kebumen	86
3. Ciri Khas Corak Batik Kebumen	89
4. Perbandingan Dengan Corak Batik Daerah Lain	98
5. Potensi Ekonomi Industri Batik Kebumen	101

B. Perlindungan Motif Batik Kebumen Sebagai Sebuah Karya Cipta Intelektual Tradisional Berdasarkan UU Hak Cipta	104
1. Perlindungan Motif Batik Kebumen Menurut UU Hak Cipta	
Indonesia	105
a. Perlindungan Atas Motif Tradisional Batik Kebumen	106
b. Perlindungan Atas Motif Kontemporer Batik Kebumen	117
2. Perlindungan Motif Batik Kebumen Dalam Praktek	121
a. Efektivita Hukum Hak Cipta	121
b. Bentuk Perlindungan yang Ada dalam Masyarakat	129
C. Upaya dan Kendala Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kebumen	137
1. Peta Potensi Industri di Kabupaten Kebumen	137
2. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kebumen	139
a. Upaya Yuridis	140
b. Upaya Non Yuridis	141
D. Kendala Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kebumen	144
1. Kendala Yuridis	145
2. Kendala Non Yuridis	146
BAB IV: PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran	155

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Masa Perlindungan Karya Cipta	50
Tabel. 2. Jumlah Perajin Batik Kebumen	89
Tabel. 3. Potensi Ekonomi Industri Batik Kebumen	104
Tabel. 4. Program Pelatihan Perajin Batik	143

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

Sejarah kemunculan rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya di tulis HKI) di Indonesia menggambarkan bahwa keikutsertaan Indonesia masuk dalam lingkaran rezim HKI dunia selain karena tekanan internasional,¹ juga karena tuntutan modernitas. Yaitu suatu kerangka yang mewadahi pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial dan ekspansi (perluasan) budaya.² Pertumbuhan ekonomi secara statistik dapat dilihat dari pendapatan perkapita. Mobilisasi sosial merupakan proses keterlibatan yang lebih besar dalam kelompok-kelompok sekunder, dan kelompok referensi baru yang terpisah dari yang tradisional seperti keluarga, kekerabatan dan komunitas sosial. Sedangkan ekspansi budaya yang dimaksud adalah proses penyempitan bidang aksi yang bersifat preskripsi, perluasan rentangan alternatif-alternatif dan memulai pola-pola sosialisasi dan tingkah laku baru. Indonesia mengikutkan diri dalam rezim HKI internasional karena menginginkan kedudukan yang sama dan kondisi yang sama dalam hubungan internasional antar negara.

Namun, sampai saat ini, Indonesia masih dalam proses modernisasi, belum sampai pada tingkat modern. Sehingga dengan kata

¹ Sudargo Gautama, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung. Hlm: 10

² M. Francis Abraham, *Modernisasi di Dunia Ketiga Suatu Teori Umum Pembangunan*, Penerjemah. M. Rusli Karim, PT TiaraWacana Yogya, Yogyakarta, 1991. Hlm:195

lain, Indonesia tengah dalam masa transisi dari tradisional menjadi modern. Dalam kajian HKI, kondisi ini menjadi menarik karena sampai saat ini, masih ada tarikmenarik antara kekuatan HKI yang cenderung eksklusif dan komersil, sementara dalam tradisi tradisional, suatu karya lebih bernilai komunal dan sosial.

Kondisi di atas, menjadikan ketidakseimbangan dalam penerapan dan penegakan hukum dalam bidang HKI itu sendiri. Dalam satu sisi, pemerintah dituntut untuk melakukan proteksi terhadap hak-hak intelektual, namun dalam satu sisi masyarakat kurang memperdulikan sehingga seringkali sebuah karya diklaim pihak lain, yang sebenarnya tidak berhak.

Negara terbentuk dengan kesediaan masyarakatnya untuk menyerahkan beberapa haknya untuk dikelola oleh pemerintah. Sehingga sudah semestinya negara melakukan prioritas atau mengutamakan kepentingan rakyatnya. Namun dalam hubungan antar negara yang semakin hampir tanpa batas, tuntutan perlakuan sama dalam hukum, perlakuan sama dalam memberikan kesempatan berusaha, dan kesempatan untuk bersaing, menjadikan negara-negara berkembang seperti gamang menentukan sikap. Antara memberikan perlakuan khusus kepada rakyatnya, ataukah mengikuti arus hubungan global yang harus memberikan perlakuan yang sama di era pasar bebas.

Kondisi Indonesia yang masih dalam tahap perjalanan menuju kemapanan hukum, menjadikan kajian HKI dalam bidang budaya

tradisional menjadi sangat menarik. Banyak tuntutan yang muncul bahwa negara harus memberikan proteksi yang kuat pada produk-produk budaya dan hasil dari budi daya yang berakar pada pengetahuan tradisional. Dan sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mampu menjadi payung hukum atas banyaknya kekayaan budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu banyak dibuat kajian mengenai kemungkinan upaya perlindungan, guna dijadikan salah satu pertimbangan dalam menyempurnakan aturan hukumnya kelak.

Salah satu bentuk warisan budaya Indonesia adalah batik. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* (UNESCO) menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya milik Indonesia. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, yang berarti batik telah memperoleh pengakuan internasional sebagai salah satu mata budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat harkat para pengrajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.³

Pengakuan UNESCO atas batik sebagai sebuah warisan budaya Indonesia untuk dunia mestinya mendorong Indonesia untuk benar-benar menggarap batik agar tetap lestari. Beberapa upaya bisa dilakukan baik dari segi hukum maupun dari segi ekonomi dan industri.

³ <http://www.antaranews.com/berita/1254491066/batik-indonesia-resmi-diakui-unesco>. *Antara*, 2 Oktober 2009 20:44 WIB.

Dalam hal perlindungan hukum, batik sebagai sebuah warisan budaya dapat dilindungi melalui rezim hukum HKI yaitu hak cipta. Dalam Pasal 10 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Konsekuensi dari adanya aturan tersebut, warga negara asing jika ingin mengumumkan atau memperbanyak batik, harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia.

Batik telah menjadi sebuah warisan budaya yang hak kepemilikannya tidak bisa dikuasai individu, namun dalam hal kekayaan motif dan coraknya dapat dikuasai oleh individu. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi dalam UU tersebut adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup di dalamnya salah satunya adalah seni batik.

Dalam database yang dimiliki oleh Departemen Perindustrian tahun 2008, ada 48.300 unit usaha batik di Indonesia. Tenaga kerja yang diserap 729.300 orang, dengan nilai produksi mencapai Rp 2,8 triliun.⁴ Artinya potensi batik sangat besar, selain sebagai sebuah kesenian warisan budaya, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi. Industri batik tersebar di banyak daerah di Jawa maupun luar Jawa. Masing-masing daerah memiliki ciri khas dalam corak dan motif, bahkan mungkin

⁴ "Batik Indonesia Harus Dilindungi", *Kompas*, Selasa 9, September , 2008.

juga ciri yang diakibatkan dari kondisi alam, lingkungan dan keahlian si pembatik sendiri.

Bagi beberapa kota, batik telah menjadi semacam *brand* wilayah, sehingga mampu meningkatkan daya tawar dan kepercayaan diri sebuah wilayah. Misalnya Pekalongan, Solo dan Yogyakarta. Paling tidak di ketiga kota tersebut, batik memiliki posisi yang cukup penting sehingga mampu mencirikan daerahnya. Pemakai batik akan bangga jika mengatakan batik yang dipakainya adalah batik yang berasal paling tidak dari tiga kota tersebut. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pengrajin-pengrajin batik di daerah lain, untuk bisa memajukan batiknya agar mampu menjadi sebuah *brand*, yang tidak saja akan meningkatkan nilai penjualan,⁵ namun juga kebanggaan akan pengakuan sebuah hasil karya.

Salah satu daerah yang memiliki potensi industri batik tradisional adalah Kabupaten Kebumen. Beberapa motif yang menjadi ciri khas motif batik Kebumen antara lain jagatan, pring-pringan, glebagan, kupat-kupatan dan lainnya. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, motif-motif tersebut terus berkembang. Warna batik Kebumen didominasi warna coklat, biru dan hijau.

Eksistensi batik Kebumen cukup meyakinkan. Paling tidak berdasarkan beberapa pengakuan pengrajin, seperti ketua kelompok batik Kenanga, bahwa kelompok mereka pernah menjadi juara I lomba motif Dekranasda 2005 dan juara II lomba motif batik Disperindagkop Kebumen

⁵ "Memahami Brand sebagai Aset Berharga", *Suara Merdeka*, Sabtu, 6 Februari 2009

2008. Pemasaran batik tersebut sudah masuk ke hotel-hotel di Jakarta, Balai Graha Santika dan melalui DWP Jakarta.⁶ Bahkan beberapa pengrajin mengaku sering mendapat pesanan dari Belanda, Belgia maupun Malaysia.⁷

Menurut ketua kelompok pengrajin batik Lawet Sakti Kebumen, ada sekitar 125 pengrajin batik dalam kelompoknya yang kesemuanya masih dilakukan secara tradisional yaitu dengan cara tulis maupun cap. Namun usaha batik di Kebumen kebanyakan masih hanya sebatas sambilan, artinya selain memiliki keahlian membatik, para pembatik tidak menjadikan batik sebagai mata pencaharian utama.

Dengan demikian, batik selain berkembang sebagai sebuah karya seni, batik juga menjadi sebuah industri yang menjanjikan. Karena memiliki nilai sejarah yang khas, maka kecintaan masyarakat kepada batik bisa dikatakan sudah sampai pada tingkat fanatik.

Meski potensi batik begitu besar untuk dikembangkan, namun kesadaran perajin batik untuk melakukan proteksi atas karya-karya mereka sangat rendah. Budaya komunal yang masih sangat kuat, menuntun mereka untuk dengan senang hati mempersilahkan kepada perajin lain untuk meniru motif yang dihasilkannya.⁸

⁶ <http://ondosupriyanto.blogspot.com/2008/11/batik-kebumen.html>

⁷ <http://batikkebumen.blogdetik.com/index.php/perihal/> lihat juga <http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1264244705/batik-kebumen>

⁸ *Kompas*, Rabu, 5 Mei 2010. Praktisi dan perajin batik, Afif Syakur menyatakan bahwa meniru batik itu sah saja, yang penting apakah kain batik itu diterima secara luas oleh masyarakat.

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan inilah, kiranya perlu dilakukan penelitian hukum mengenai eksistensi sekaligus perlindungan batik Kebumen, baik secara noramatif maupun empiris dalam untuk memberikan satu gambaran yang jelas tentang kondisi dan potensi serta upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum HKI atas hasil karya pengrajin batik tradisional di Kebumen.

G. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah eksistensi motif batik Kebumen sebagai sebuah karya cipta intelektual tradisional?
2. Bagaimana perlindungan motif batik Kebumen sebagai sebuah karya cipta intelektual tradisional berdasarkan UU Hak Cipta?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendorong perlindungan dan mengembangkan batik Kebumen?
4. Apa saja kendala Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendorong perlindungan dan mengembangkan batik Kebumen?

H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian ini sendiri yaitu:

- a. Untuk menganalisis eksistensi Batik Kebumen sebagai sebuah karya cipta intelektual tradisional yang ada dalam masyarakat.
- b. Menganalisis bentuk perlindungan yang mungkin dilakukan berdasarkan UU Hak Cipta.
- c. Memperoleh deskripsi dan menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong perlindungan Batik Kebumen.
- d. Memperoleh deskripsi dan menganalisis kendala dalam pengembangan dan perlindungan batik Kebumen.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian akan dapat memberikan gambaran secara jelas eksistensi seni batik sebagai karya intelektual tradisional dalam rezim hukum HKI. Selain itu penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dalam bidang HKI secara umum yang sampai saat ini masih minim literatur, terutama dalam bidang batik.

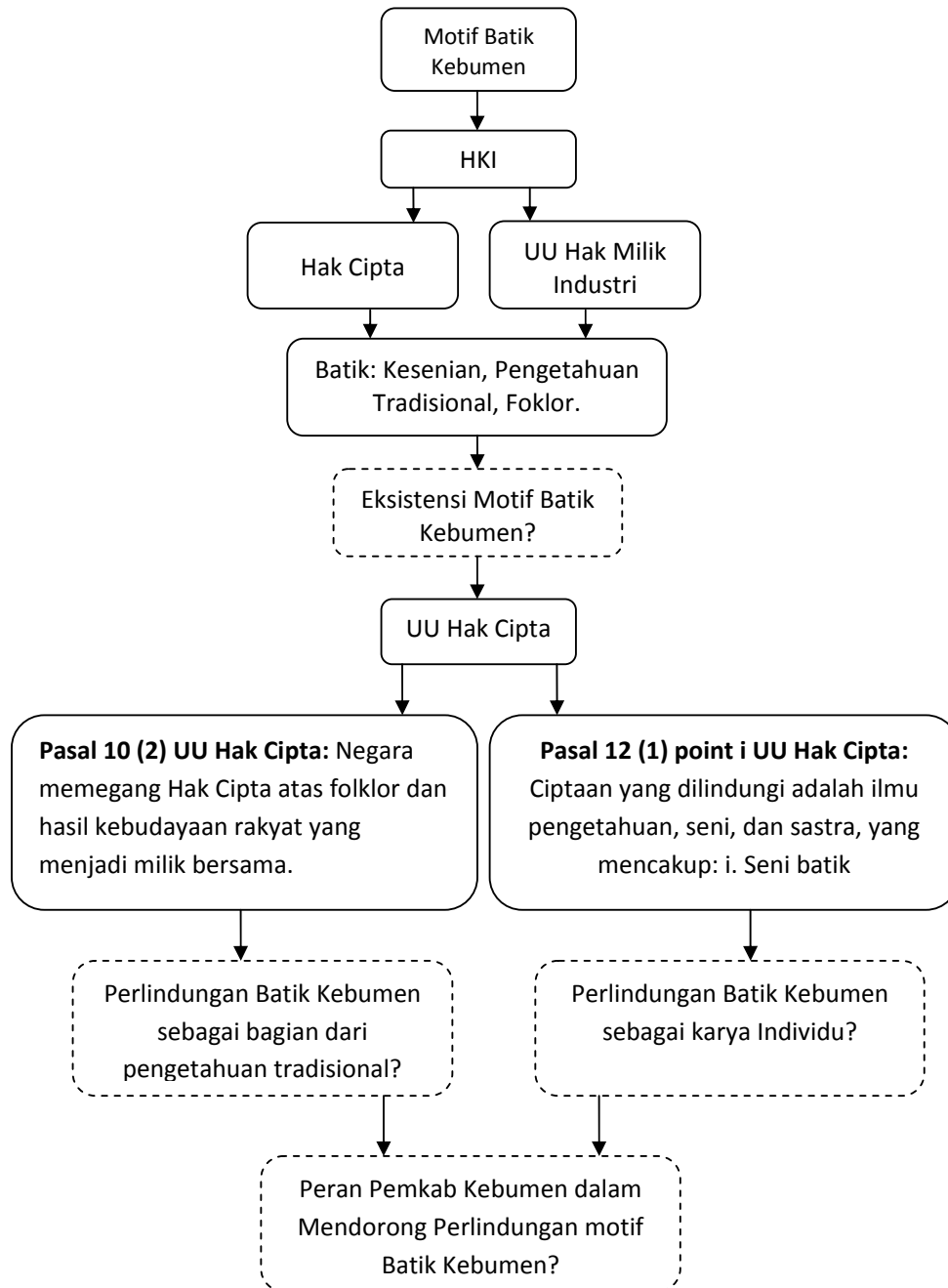
b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Kebumen dan pihak-pihak terkait, untuk merumuskan langkah-langkah yang harus segera diambil dalam usaha perlindungan atas industri batik. Selain itu juga bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam pembuatan aturan hukum tentang perlindungan atas pengetahuan tradisional.

I. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Secara sederhana, konsep penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Penelitian ini berawal dari keberadaan batik Kebumen. Yang dimaksud eksistensi di sini, adalah suatu keadaan ada yang dalam penelitian ini adalah berarti batik tradisional ada secara fisik dan dapat dirasakan pengaruhnya secara ekonomi maupun ada dalam lingkup sejarah yang melatarbelakanginya. Hal ini sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan eksistensi sebagai hal berada atau keberadaan.⁹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁰

Mengacu kepada WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan *Paris Convention* 1886, pada umumnya HKI terbagi atas dua bidang besar, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta yang terkait dengan nilai-nilai estetik dan pengetahuan. Hak kekayaan industri terdiri atas paten, merek, nama perusahaan, persaingan curang, rahasia dagang (*undisclosed information*).¹¹

Salah satu perbincangan yang hangat akhir-akhir ini adalah mengenai masalah perlindungan pengetahuan tradisional. Hal ini tentu

⁹ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

¹⁰ Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakarta. Hlm: 14

¹¹ Budi Santoso, 2008, *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Pustaka magister Semarang, Semarang. Hlm: 3

sangat beralasan, karena ternyata rumusan dalam Undang-undang Hak Cipta belum memberikan satu perlindungan yang memadai.

Menurut Subroto dan Suprapedi, pengetahuan Tradisional merupakan bentuk inovasi, kreasi dan ekspresi kultural yang dihasilkan dan dipelihara secara turun temurun oleh penduduk asli atau suatu komunitas lokal atau individu dalam suatu komunitas lokal suatu negara. Dalam banyak kasus, pengetahuan tradisional sering dihubungkan dengan penggunaan dan aplikasi dari sumber genetik, biologis dan alam atau manajemen dan konservasi dari sumber daya tersebut dan lingkungannya yang mempunyai nilai-nilai ekonomi, komersial dan kultural.¹²

UU Hak Cipta dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa negaralah yang memegang hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui pemiliknya, termasuk di dalamnya karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, selain itu negara juga memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Salah satu tantangan daerah dalam masa otonomi ini adalah kemandirian. Kemandirian untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri. Di tengah lesunya sektor riil, menjadikan prospek

¹² Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Op.Cit.* Hlm: 145

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak menjadi sulit. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi-potensi daerah, berupa produk-produk unggulan yang mendapat tempat di dunia luar. Hal ini pun akan menjadi beban yang berat jika daerah tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu memenuhi dan mengikuti isu-isu global seperti demokrasi, HAM, lingkungan, standarisasi Internasional (ISO), dan juga HKI.¹³

Salah satu potensi yang banyak dimiliki daerah adalah batik. Apalagi saat ini batik telah memperoleh pengakuan internasional sebagai warisan budaya Indonesia, sehingga sudah semestinya masing-masing daerah yang memiliki potensi batik tersebut, melakukan upaya-upaya untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkannya.

2. Kerangka Teori

Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban (*order*).¹⁴ Hal tersebut jika tujuan-tujuan hukum yang lain ingin direduksi menjadi satu tujuan pokok. Dengan kata lain, jika ada hukum yang justru tidak menimbulkan sebuah tata ketertiban dalam masyarakat, maka perlu ada kajian ulang, apakah ada masalah dalam hukumnya, atau justru masalah pada pemahaman masyarakat.

¹³ Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakarta. Hlm: 118

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung. Hlm: 3

Hukum HKI¹⁵ merupakan suatu fenomena dan relatif baru untuk hampir semua negara berkembang, yang terpaksa (dan biasanya gagal) mengikuti perkembangan teknologi yang dibawa oleh para inventor dan pencipta. Selain itu hukum HKI menjadi salah satu cabang hukum yang paling banyak dikritik, sehingga perlu kajian terus-menerus dalam rangka pembaharuannya dan implementasinya dalam praktek hukum.¹⁶

Secara historis, pengakuan hak milik atas sebuah kreatifitas yang dihasilkan seseorang sebenarnya sudah sangat lama. Adalah John Locke sebagai salah satu orang yang menggagasnya. Dia menyatakan bahwa sudah sepatutnya seseorang memiliki hak milik atas benda yang telah dia hasilkan.¹⁷ Pengertian benda sebagaimana disebutkan John Locke tidak terbatas pada benda yang berujud, namun juga benda yang tidak berujud.¹⁸

Pernyataan John Locke tersebut kemudian dikenal sebagai dasar justifikasi HKI menurut teori hukum alam. Sudah menjadi

¹⁵ Dalam penggunaan istilah HKI diantara pakah HKI sendiri banyak terjadi perbedaan. Hal itu berakar pada proses penerjemahan atas teks bahasa asing *intellectual property rights*. Ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual ada yang mengartikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Antara milik dan kekayaan masing-masing merupakan terjemahan dari *property*. Namun dalam penelitian ini digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana digunakan untuk menyusun undang-undang HKI. Lihat perbedaan ini lebih jauh dapat dibaca antara lain pada, Budi Santoso, 2008, *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Pustaka magister Semarang, Semarang. Hlm: 11-14. Juga lihat pada Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm: 1

¹⁶ The Asian Law Group, ed. Tim Lindsey, dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung. Hlm: 6

¹⁷ Rahmi Jened, 2001, *Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs*, Fak. Hukum Unair, Surabaya. Hlm: 15

¹⁸ Syafrinaldi, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru. Hlm: 6

sesuatu yang wajar, lazim, dan kodrati bahwa seseorang yang telah memeras pikiran atau sampai mengeluarkan banyak waktu dan biaya untuk menghasilkan suatu karya, maka dia berhak atas pemanfaatan karyanya tersebut, baik secara moral maupun ekonomi. Dia juga berhak untuk mempertahankan haknya tersebut dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Jadi sangat tepat jika dikatakan bahwa hak cipta ini merupakan hak eksklusif atas suatu karya.¹⁹

Robert M Sherwood, mengemukakan tiga dasar teori mengapa suatu HKI perlu dilindungi, yaitu *reward theory*, *recovery theory*, dan *incentive theory*.²⁰ *Reward theory* atau teori penghargaan, menyatakan bahwa sebuah perlindungan diberikan kepada kreator adalah sebagai sebuah bentuk penghargaan atas jerih payahnya dalam menghasilkan sebuah karya. Teori ini berdasar pada asumsi bahwa kreator telah banyak mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan biaya untuk hasil yang telah dia capai.

Sedangkan *recovery theory*, dikemukakan berdasarkan asumsi bahwa selain penghargaan, seorang kreator sangat layak atas banyak kerugian yang selama ini dia korbakan. Kemudian *incentive theory* mengedepankan aspek keberlanjutan dari sebuah kreas. Diharapkan dari adanya insentif atas suatu karya maka akan ada pengembangan lanjutan dari berbagai penemuan dalam bidang yang lain.

¹⁹ Marshal Leaffer, 1998, *Understanding Copyright Law*, Matew Bender, New York. Hlm: 14

²⁰ Robert M Sherwood, 1990, *Intellectual Property and economic Development*, Alexandria Virginia. Hlm: 37-39.

HKI secara garis besar terbagi atas dua bidang, yaitu bidang yang terkait dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta bidang yang terkait dengan industri. Hak cipta adalah cabang HKI yang terkait dengan bidang yang pertama. Sedangkan cabang HKI yang terkait dengan industri meliputi Merek, Paten, Desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman dan juga tata letak sirkuit terpadu. Dan batik sebagaimana diketahui berkembang bukan hanya di bidang seni tetapi juga industri, maka cabang HKI yang terkait dengan batik adalah hak cipta dan juga merek.

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, hak cipta secara langsung dimiliki oleh pencipta begitu dia selesai melakukan penciptaan. Pencipta tidak perlu mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal HKI untuk mendapatkan perlindungan. Pencipta memiliki hak penuh untuk mengumumkan, memperbanyak dan memanfaatkan hasil ciptaannya sekaligus melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya

memanfaatkan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Menurut sistem hukum Indonesia, setiap hak milik mempunyai fungsi sosial termasuk juga di dalamnya adalah hak kekayaan intelektual. Fungsi sosial itu mengandung makna bahwa hak milik, disamping dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, juga mesti ada kemanfaatan yang diperuntukkan bagi umum. Fungsi sosial ini merupakan pembatasan bagi hak eksklusif yang dimiliki seseorang berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.²¹ Dalam hal hak cipta, fungsi sosial atau pembatasan hak individu diatur dalam UU Hak Cipta Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.

Pasal 14 menyebutkan,

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm: 30-31

Sementara Pasal 15 menyebutkan bahwa dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pada Pasal 16 Pasal 17 dan Pasal 18 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa penggunaan hak cipta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Pengaturan fungsi sosial ini sejalan dengan doktrin penggunaan yang pantas (*fair use/ fair dealing*) yang berakar pada hukum kebiasaan (*the Anglo-American common law tradition*).²² Doktrin ini mengandung pengertian bahwa penggunaan yang pantas adalah pemberian ijin kepada pihak masyarakat untuk membuat salinan karya yang dilindungi hak cipta, jika digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mendukung. Doktrin ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

b. Pengetahuan Tradisional

Permasalahan tentang pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) menjadi satu permasalahan yang ramai dibahas berkaitan dengan HKI. Hal ini tidak terlepas dari nilai penting yang dimiliki pengetahuan tradisional dalam wilayah pengembangan inovasi dan perlindungan masyarakat tradisional. Pengetahuan tradisional bisa menjadi basis atau *prior art* dalam mengembangkan inovasi modern.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan atas definisi dari pengetahuan tradisional ini. Henry Sulistyono Budi mencoba untuk mendefinisikan *traditional knowledge* sebagai pengetahuan yang setatus kedudukannya atau penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat. UNESCO juga sudah memberikan definisi

²² Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm: 48

tentang pengetahuan tradisional ini. Namun definisi masih terlalu luas, yang cenderung mengacu kepada kebudayaan semata. Perumusan tersebut lahir dalam satu simposium yang berjudul *Symposium on the Protection of Pacific Island*, Noumea, 15-19 Februari 1999.²³

Sedangkan menurut WIPO pengetahuan tradisional merujuk pada berbagai pengetahuan yang sangat luas, dan tidak terbatas pada suatu bidang tertentu, misalnya dapat berupa pengetahuan tentang pengobatan medis, tentang pertanian, dan tentang perlindungan lingkungan. Yang menjadi pembeda pengetahuan tradisional dengan pengetahuan yang lain adalah keterkaitannya dengan komunitas lokal tertentu. Pengetahuan tradisional tersebut diciptakan, dipertahankan, digunakan dan dilindungi dalam lingkaran tradisional. Istilah “tradisional” berarti telah digunakan dan ditransfer secara turun temurun dari generasi ke generasi.²⁴

Sementara Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi memberikan batas pengertian operasional pengetahuan tradisional sebagai berikut:

Pengetahuan tradisional adalah seluruh bentuk pengetahuan inovasi, dan kegiatan budaya dari masyarakat asli (*indigenous community*) maupun masyarakat lokal, yang meliputi cara hidup dan teknologi tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara turun temurun.²⁵

²³ *Ibid.* Hlm: 14

²⁴ Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakarta. Hlm: 35

²⁵ Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm: 15

c. Eksistensi Batik Indonesia

Keberadaan atau eksistensi batik di Indonesia dapat ditelusuri dalam sejarah perkembangannya. Batik memiliki keterkaitan erat dengan hak cipta perlambang status keraton di Jawa. Pada awal mula kemunculannya, batik sebenarnya berasal dari masyarakat biasa. Baru kemudian pihak Kraton merasa tertarik, dan kemudian pada tahun 1769 Susuhunan Surakarta Hadiningrat mengeluarkan pranata (keputusan formal), bahwa motif/corak batik “jilamprang” dilarang dipakai oleh siapa pun kecuali Susuhunan sendiri dan putra putrinya. Kemudian pada tahun 1785, Susuhunan mencanangkan pola parang rusak bagi keperluan pribadinya. Dan pada tahun 1792 dan 1798, Susuhunan melalui Pengageng (pejabat) keraton mengeluarkan batasan-batasan atas pola-pola yang dipakai untuk keperluan tertentu di lingkungan keraton, seperti corak sawat lar, parang rusak, sumengkirang dan udan liris. Sejalan dengan pranata tersebut, maka beberapa pengrajin batik seperti keluarga Wicitran, mulai masuk Istana dan dianugerahi gelar bangsawan.²⁶

Batik rakyat yang masuk ke Istana kemudian menemukan pola-pola khusus yang diperuntukkan keluarga Istana. Pola-pola batik tersebutlah yang kemudian dikenal dengan batik klasik. Namun keberadaan batik istana tersebut sekaligus memberikan eksistensi

²⁶ Sudarmono dalam Dharsono Sony Kartika, 2007, *Budaya Nusantara (Kajian Konsep Mandala dan Konsep Triloka/Buana terhadap Pohon Hayat pada Batik Klasik)*, Rekayasa Sains, Bandung. Hlm: 8

batik rakyat. Setidaknya pada tahun 1930 telah ada 236 pengusaha batik pribumi, 88 Arab, 60 Cina dan 3 Eropa.²⁷

Lambat laun, batik digemari oleh masyarakat pada umumnya, sehingga tidak lagi eksklusif milik Istana. Namun pandangan masyarakat bahwa Keraton tetap menjadi pusat kebudayaan sangat melekat. Bahkan raja masih dianggap sebagai sumber kekuatan yang memberikan motivasi kultural.

Dinamika perkembangan batik mengalihkan perhatian konsumen batik. Masyarakat secara umum beralih ke tekstil kain motif batik, sedang kaum borjuis Indonesia bertahan memakai kain batik alus untuk keperluan acara resmi maupun pesta-pesta. Dinamika tersebut membawa batik (batik canting) ke singgahsana eksklusif. Batik tulis yang berkembang sekarang justru mempunyai posisi yang jelas dalam eksistensinya.²⁸

Kerangka pikir tersebut memberikan pemaknaan terhadap batik klasik sebagai simbol ekspresi kebudayaan Jawa, merupakan daya tahan kebudayaan dalam bentuk pelestarian dan pengembangan, sesuai dengan kebutuhan manusia dan masyarakatnya, sumber daya lingkungan dan pranata-pranata sosial yang ada pada masyarakat Jawa.²⁹

²⁷ Berdasarkan laporan P. De. Kat Angelino, dalam Kercher yang dikutip kembali oleh Dharsono, *Ibid.* Hlm: 9

²⁸ Prisma, 5 Mei 1987: 56-57, dalam Dharsono, *Ibid.* Hlm: 10

²⁹ Dharsono Sony Kartika, 2007, *Budaya Nusantara (Kajian Konsep Mandala dan Konsep Triloka/Buana terhadap Pohon Hayat pada Batik Klasik)*, Rekayasa Sains, Bandung. Hlm: 11

d. Perlindungan Hukum HKI

Abdulkadir Muhammad membagi konsep perlindungan hukum HKI menjadi tiga bagian besar yaitu, 1) Doktrin Perlindungan Hukum, 2) Sistem Perlindungan Hukum, dan 3) Upaya Perlindungan Hukum. Secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut.³⁰

e. Doktrin Perlindungan Hukum

Doktrin yang hidup dalam masyarakat menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah harta kekayaan tidak berwujud yang bersumber dari intelektualitas seseorang. Setiap harta kekayaan yang termasuk di dalamnya adalah hak kekayaan intelektual, pasti ada pemilik yang sah sehingga perlu dilindungi dari perbuatan sewenang-wenang. Setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak milik orang lain. Orang lain yang tidak berhak dilarang untuk menggunakan harta kekayaan tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya atau ada pengecualian berdasarkan kebiasaan yang berlaku.

Berdasarkan doktrin tersebut, maka hukum nasional menyerap doktrin tersebut agar bisa berlaku efektif dengan menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Dalam peraturan tertulis tersebut diatur bahwa ada prasyarat yang harus dipenuhi pemilik hak untuk memperoleh perlindungan, misal dengan mendaftarkan. Kemudian peraturan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm: 153-160

itu mengikat semua orang untuk mematuhi aturan-aturan di dalamnya yang sebenarnya berasal dari doktrin yang hidup dalam masyarakat. Jika ada orang yang melakukan tindakan yang dilarang dalam aturan tersebut, dapat dikenai hukuman.

Adanya peraturan perundangan itu merupakan langkah perlindungan preventif. Yaitu sebagai upaya mencegah perilaku melanggar dari masyarakat. Sedangkan jika ternyata dalam prakteknya terjadi pelanggaran, maka akan ada mekanisme hukum untuk menyelesaikan, kemudian itu disebut perlindungan secara represif.

f. Sistem Perlindungan Hukum

Sebuah sistem tentu memiliki satu pola yang terkait dari awal hingga akhir menjadi sebuah aturan dan proses yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum HKI merupakan sebuah sistem hukum yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Subjek Perlindungan, yaitu terdiri atas pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.
- 2) Objek Hukum Perlindungan, yaitu semua jenis HKI yang diatur oleh undang-undang, antara lain, hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.

- 3) Perbuatan Hukum Perlindungan, artinya hanya yang telah memenuhi persyaratan saja yang akan diberikan jaminan perlindungan hukum, seperti harus ada pendaftaran, atau ditentukan lain dalam undang-undang terkait.
- 4) Jangka Waktu Perlindungan, yaitu lamanya suatu hak mendapat perlindungan hukum.
- 5) Tindakan Hukum Perlindungan, artinya jika terjadi pelanggaran atas HKI, maka harus ada proses hukum, dan pelanggarnya harus bertanggungjawab, baik secara pidana, perdata, maupun administrasi.

g. Upaya Perlindungan Hukum

Upaya perlindungan yang dilakukan dalam rangka melindungi HKI adalah dengan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Upaya perlindungan hukum atas suatu objek HKI bisa dilakukan melalui model konstitutif maupun deklaratif. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Seperti hak cipta tidak perlu didaftarkan karena sistem perlindungannya dengan sistem deklaratif. Selain itu upaya perlindungan juga tampak dari jangka waktu perlindungan yang diberikan. Kemudian juga upaya hukum jika terjadi pelanggaran HKI. Segala upaya tersebut dapat dirangkum dalam dua upaya perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Preventif dengan melalui aturan

perundang-undangan, dan represif melalui upaya penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

J. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.³¹ Pendekatan yuridis ini akan digunakan untuk melihat motif batik dari UU HKI terutama UU Hak Cipta, baik eksistensinya maupun sistem perlindungannya. Sedangkan pendekatan empiris untuk mengetahui eksistensi batik kebumen secara nyata dan bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut diharapkan mampu melihat secara utuh sebuah persoalan dari sudut normatif maupun empiris untuk menghasilkan sebuah penelitian hukum yang komprehensif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha untuk memberikan sebuah gambaran mengenai permasalahan hukum dalam hal eksistensi dan perlindungan batik Kebumen, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti.

³¹ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm: 40

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer yang berasal langsung dari subjek penelitian. Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran empiris dalam kenyataannya terkait eksistensi dan bentuk upaya konkret dari pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong perlindungan motif batik kebumen.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus.

Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis eksistensi dan perlindungan hukum atas motif batik kebumens secara normatif berdasarkan Undang-undang Hak Cipta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, digunakan teknik *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada para pakar atau ahli yang mempunyai kompetensi atau ahli dalam

suatu masalah atau yang berwenang dalam masalah yang diteliti, dengan menggunakan pedoman pertanyaan berupa pokok-pokok pertanyaan dan masih dapat mengurangi kekakuan dengan prinsip bebas.³² Mengingat penelitian ini terkait dengan eksistensi dan perlindungan batik kebumen, maka subjek penelitian yang akan dijadikan nara sumber utama antara lain:

- a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen satu orang.
- b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, satu orang.
- c. Seksi Hukum Setda Kabupaten Kebumen, satu orang.
- d. Ketua Ketua Kelompok Perajin Batik “Mawar”, satu orang.
- e. Ketua Kelompok Batik “Sinjang Mulya”, satu orang.
- f. Ketua Kelompok Perajin Batik “Lawet Sakti”, satu orang.

Sedangkan pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan:³³

- a. Studi kepustakaan (*literature study*), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa surat keputusan, surat edaran

³² Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur. Hlm: 73

³³ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta. Hlm: 61

dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.³⁴

6. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang memiliki satu kesatuan isi dan maksud. Masing-masing Bab akan berisi sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan, kerangka teoritis dan metode penelitian.

BAB II: Berisi tinjauan pustaka terkait dengan pengaturan karya cipta dan Pengetahuan Tradisional khususnya batik.

³⁴ Saifuddin Azwar, 1999, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 6

BAB III: Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya mencakup eksistensi dan perlindungan batik Kebumen dan upaya-upaya serta kendala Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong perlindungan dan pengembangan Batik Kebumen. Hasil penelitian ini dipaparkan secara deskriptif.

BAB IV: Berisi tentang penutup berupa kesimpulan dan saran atau rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan batik Kebumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual (HKI) lahir bersama dengan adanya wujud kreasi dari hasil pemikiran intelektual seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa HKI merupakan sebuah penghargaan atas daya kreasi dan intelektualitas seseorang yang telah berhasil menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak dan memiliki nilai ekonomi.

HKI lahir dari dunia barat yang memiliki budaya liberal dan individualis, sehingga ketika masuk ke Indonesia, HKI seperti sebuah sosok baru sama sekali, bahkan terkesan menyeramkan dan berbahaya. Tidak jarang banyak komentar miring dan apatis atas keberadaan HKI itu sendiri, karena dinilai akan mengikis budaya kebersamaan dan kekeluargaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Namun kita harus berani untuk membuka mata lebar-lebar, ditengah perkembangan jaman yang semakin bebas, kita harus siap untuk bersaing dengan negara-negara di dunia internasional. Sebagai salah satu anggota dari komunitas-komunitas internasional, sudah selayaknya Indonesia menyesuaikan diri dalam pergaulannya. Namun tentu tidak dengan meninggalkan budaya asli bangsa yang adiluhung. HKI tidak serta merta kita tolak, tidak pula secara buta kita terapkan, harus ada semacam adaptasi dan kompromi dalam penerapannya, dan beberapa pengecualian dan tindakan khusus pada kasus-kasus tertentu.

1. Pengertian Istilah

Istilah Hak Kekayaan Intelektual sendiri oleh para pakar hukum pernah menjadi satu perdebatan, yang sebenarnya berakar pada penerjemahan dari bahasa Inggris *Intellectual Property Right*. Ada yang menyatakan istilah yang tepat untuk digunakan adalah Hak Milik Intelektual. Menurut OK Saidin, istilah yang lebih tepat adalah hak atas kekayaan intelektual, karena “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak atas kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa saja hak atas kekayaan intelektual itu berupa hak memperbanyak saja, hak menggunakan saja, atau bisa dalam bentuk hak sewa dan sebagainya.³⁵ Dalam prakteknya, HKI dengan kepanjangan Hak Kekayaan Intelektual lebih banyak diterima dan digunakan baik di dunia akademis maupun dokumen-dokumen resmi.

Mengenai pengertian HKI sendiri secara spesifik sulit untuk didefinisikan.³⁶ HKI lebih mudah dipahami dengan memberikan contoh-contoh praktis dalam kenyataan. Meskipun begitu, beberapa pakar mencoba untuk merumuskan definisi HKI tersebut.

Budi Santoso menjelaskan bahwa HKI merupakan hak yang munculnya karena hasil kreativitas intelektual seseorang, dengan syarat harus dituangkan dalam bentuk nyata, ada kreativitasnya sehingga tidak

³⁵ OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, PT. Radja Grafindo Perkasa, Jakarta. Hlm: 11

³⁶ Tim Lindsey, dkk. 2005, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Cet. 4. Alumni, Bandung. Hlm: 2.

sekedar ide.³⁷ Dengan demikian, HKI tidak akan muncul dari sebuah produk yang tidak ada nilai kreatifitasnya, misalnya duplikasi dan sebagainya.

Sementara itu, Edy Damian secara substantif menyatakan bahwa HKI merupakan hak-hak atas harta kekayaan yang merupakan produk olah pikir manusia. Hukum HKI disusun untuk mengatur hak-hak yuridis yang timbul dari karya-karya hasil olah pikir manusia, serta tautannya dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan moral. Hukum HKI juga mengatur tentang kaidah-kaidah perlindungan agar tidak terjadi penyalahgunaan hak intelektual oleh orang lain untuk kepentingan ekonomi ataupun kepentingan-kepentingan lain yang merugikan pemilik hak tersebut.³⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka HKI dapat dipahami sebagai sebuah sistem hukum yang memberikan hak eksklusif kepada seseorang atas karya nyata yang dihasilkannya melalui daya kreatif dan intelektualitasnya, untuk melakukan eksploitasi atas karyanya tersebut, memberikan izin atau pun pencegahan atas pihak lain untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi atau tindakan-tindakan yang merugikan pemilik hak tersebut.

³⁷ Budi Santoso, 2008, *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang. Hlm: 1

³⁸ Edy Damian dalam Trisno Rahardjo, 2006, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*, Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta. Hlm: 9.

2. Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bagian dari rezim hukum benda khususnya benda tak berwujud. Ketentuan mengenai benda sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUHPer, bahwa benda digolongkan dalam dua jenis yaitu benda berwujud dan benda tak berwujud. Dalam setiap hak kebendaan berwujud ada hak melekat mutlak atas benda tersebut seperti hak milik. Namun HKI sebagai sebuah hak yang eksis setelah terwujud benda atau hasil karya dari usaha intelektualitas seseorang, juga dikenal absolut di dalamnya.³⁹

HKI bersifat terpisah dengan hasil material yang berupa benda berwujud. Sebagai contoh penjas, seseorang yang telah menulis buku, maka dia telah memiliki hak eksklusif berupa hak cipta atas buku yang dituliskannya, dan dia berhak untuk memperbanyak bukunya tersebut atau melakukan perjanjian penerbitan dengan pihak penerbit, sementara buku itu sendiri menjadi objek material tersendiri yang terpisah dengan hak cipta itu, yang bisa dimiliki oleh siapa pun. Hak intelektual selalu melekat pada orang yang telah menciptakannya. Dalam hal invensi atau penemuan di bidang teknologi, seorang penemu pelumas dapat mendaftarkan dan memiliki hak paten atas pelumas yang ditemukannya, sedangkan pelumas yang dihasilkannya sebagai objek material dapat dibeli dan dipakai oleh siapa pun. Berdasarkan

³⁹ OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, PT. Radja Grafindo Perkasa, Jakarta. Hlm: 12

keterangan di atas, maka dalam mengelompokkan cabang HKI dapat dirunut sejak mula perbedaan benda berwujud dan tidak berwujud.

Secara garis besar, HKI dapat dibedakan menjadi dua bidang, yaitu bidang yang terkait dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta bidang yang terkait dengan industri. Hak cipta adalah cabang HKI yang terkait dengan bidang yang pertama. Sedangkan cabang HKI yang terkait dengan industri meliputi Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman dan juga Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak cipta sendiri dapat dipecah dalam dua kelompok yaitu hak cipta sendiri, dan hak yang terkait (*neighbouring right*). Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Hak Terkait (*Neighbouring Right*) merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.⁴⁰

⁴⁰ OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, PT. Radja Grafindo Perkasa, Jakarta. Hlm: 12-15

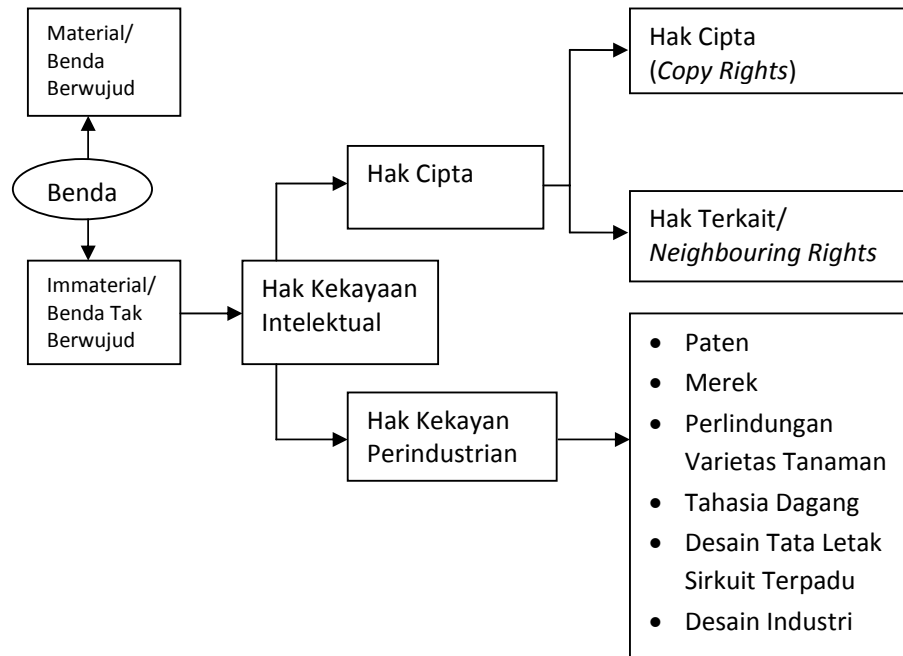
Sementara hak milik perindustrian dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- b. Desain Industri, adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- c. Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ketentuan mengenai hak merek ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- d. Rahasia Dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi

karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Ketentuan mengenai Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Yang dimaksud dengan desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Mengenai hal ini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- f. Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Mengenai perlindungan varietas tanaman diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Cabang-cabang HKI di Indonesia dapat digambarkan secara utuh dalam bagan sebagai berikut:⁴¹



3. Teori Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Setidaknya ada tiga dasar yang dapat kita kaji sebagai dasar perlindungan HKI, yaitu hak-hak alami, perlindungan reputasi dan dorongan dari imbalan untuk inovasi dan penciptaan.⁴²

a. Hak-hak Alami

Justifikasi ini dinilai sebagai justifikasi paling mendasar, bahwa seorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan

⁴¹ OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, PT. Radja Grafindo Perkasa, Jakarta. Hlm: 16

⁴² Tim Lindsey, dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Cet. 4. Alumni, Bandung. Hlm: 13-16.

memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 27 (2) deklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesustraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta. Namun dasar ini mendapat kritik terutama dari negara-negara berkembang, karena konsep kepemilikan di dalam masyarakat mereka cenderung bersifat komunal, dan dari setiap ciptaan memiliki nilai-nilai sosial sehingga masyarakat memiliki hak menggunakan dan mengontrolnya juga untuk kepentingan bersama.

b. Perlindungan Reputasi

Dalam dunia bisnis, reputasi sebuah produk perlu dibangun dengan berbagai iklan yang tidak murah hingga suatu produk tersebut dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Dari sinilah, para produsen memiliki kepentingan untuk dilindungi reputasi produknya dari pencurian atau pemalsuan pihak-pihak lain dengan memanfaatkan reputasi produknya. Hukum merekalah yang memiliki sistem untuk memberikan perlindungan tersebut.

c. Dorongan dan Imbalan dari Inovasi dan Penciptaan

Para ahli sepakat jika HKI merupakan sebuah kompensasi dan dorongan bagi orang untuk terus melakukan penciptaan. Hal ini

akan memberikan kementerian lebih pada masyarakat pada jangka panjang.

Justifikasi perlindungan HKI juga dapat dilihat dari sudut pandang pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pembenaran dari sudut pandang Pencipta, pengguna dan dari sudut pandang masyarakat.⁴³

a. Pembenaran Dari Sudut Pandang Pencipta

Pokok pembenaran dari sudut pandang ini adalah bahwa seorang pencipta berhak untuk mengontrol segala sesuatu yang diciptakan atau dihasilkannya. Setidaknya ada empat pemikiran yang memunculkan argumen ini. *Pertama*, seorang pencipta layak untuk memperoleh *reward* atas usahanya sehingga dapat mengontrol apa yang telah dia hasilkan. *Kedua*, pencipta sangat pantas memiliki hak untuk mengontrol hasil ciptaannya karena dalam proses penciptaan dia telah mengeluarkan investasi yang cukup besar. *Ketiga*, dia pantas memperoleh hak itu karena dia telah menyumbangkan hal yang sangat berarti bagi kebudayaannya. *Keempat*, seorang dapat mengontrol hasil karyanya adalah karena memang beberapa norma sosial menghendaki hal tersebut.

b. Pembenaran Dari Sudut Pandang Pengguna

Pembenaran dari sudut pandang ini berpusat pada argumen tentang kerugian, penggunaan yang merugikan dan memperkaya diri dengan cara yang tidak adil. Pembenaran ini berdasar pada doktrin

⁴³ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm: 20-23.

perbuatan melawan hukum dan *restitution* dan tidak berdasar pada hukum benda. Hukum harus melindungi pencipta dari tindakan-tindakan yang melawan hukum yang membahayakan. Doktrin *misappropriation* mengharuskan hukum untuk melindungi pelaku dari tindakan-tindakan yang merugikan karena telah merusak hubungan kepercayaan konsumen atas produsen. Dari perspektif tindakan memperkaya diri dengan tidak adil, tindakan tersebut jelas merugikan karena memperoleh kekayaan dari yang seharusnya dimiliki pemilik hak. Dari sudut pandang ini, HKI memiliki justifikasi yang sangat kuat.

c. Pembeneran Dari Sudut Pandang Masyarakat

Pembeneran ini sering disebut sebagai *economic justification for the intellectual property regimes*. Hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan produksi, penyebaran dan eksploitasi yang efisien terhadap berbagai hal. Keuntungan dari HKI diperuntukkan agar masyarakat secara umum dapat terpenuhi hajat ekonominya. Oleh karena itu dari segi ekonomi, HKI menjadi sebuah sistem yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat luas.

4. HKI Sebagai Bagian dari Hukum Ekonomi

HKI adalah salah satu cabang dari hukum ekonomi. Sampai saat ini, definisi baku tentang hukum ekonomi sendiri belum disepakati oleh para pakar. Sri Redjeki Hartono berusaha mendefinisikan hukum

ekonomi sebagai rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.⁴⁴ Dari pengertian tersebut tampak bahwa semua kegiatan ekonomi masyarakat dalam pengertian luas menjadi kajian hukum ekonomi. Dalam kajian hukum ekonomi sendiri ada dua pendekatan, yaitu makro dan mikro. Pendekatan makro yaitu kajian hukum terhadap setiap hal yang ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi secara makro. Dalam bagian ini ada campur tangan negara terhadap kegiatan tersebut sehingga tercapai suatu masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar. Kemudian kajian bersifat mikro yaitu kajian yang mempunyai wawasan khusus terhadap hubungan-hubungan yang tercipta karena adanya hukum para pihak yang sifatnya nasional, kondisional, dan situasional.⁴⁵

Ruang lingkup hukum ekonomi sendiri sangat luas, sehingga masih tercecer pertanyaan mendasar sekitar kemampuan hukum dalam mengatur kegiatan ekonomi sendiri, benarkah hukum dibutuhkan dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi? Mestinya hukum harus mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan mendasar dalam kegiatan ekonomi. Salah satu hal mendasar itu adalah keseimbangan kepentingan dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, yaitu dengan

⁴⁴ Lebih spesifik, hukum ekonomi juga diartikan setiap perangkat hukum (undang-undang atau peraturan lain) yang mengatur setiap kegiatan menjalankan perusahaan. Lihat Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung. Hlm: 73.

⁴⁵ Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing. Hlm: 9-12

memberikan perangkat peraturan yang sifatnya protektif.⁴⁶ Tugas sistem hukum dalam adalah mengontrol jalannya perekonomian, yaitu dengan mendayagunakan hukum secara efektif agar dapat mengoperasikan sistem pasar, persaingan bebas, dan sebagainya.⁴⁷

Hukum ekonomi memiliki sifat ganda, yaitu yang bersifat mengatur dan memaksa, karena hukum ekonomi bergerak dalam dua ranah sekaligus, yaitu privat atau perdata dan juga ranah publik.⁴⁸ Pada ranah perdata, hukum ekonomi memposisikan diri sebagai perangkat peraturan yang mengatur, memberikan pilihan hukum, memberikan kesempatan pada para pihak sendiri, dan seterusnya yang berdasarkan pada asas hukum perdata berupa kebebasan berkontrak. Sedangkan pada ranah publik, hukum ekonomi menempatkan diri sebagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan di bawahnya. Dalam ranah publik ini, hukum ekonomi bersifat mengatur dan memaksa demi kepentingan umum, seperti kebijakan-kebijakan mengenai perizinan, investasi dan sebagainya.⁴⁹ Berdasarkan gambaran tentang hukum ekonomi ini, maka jelas bahwa rezim undang-undang HKI yang termasuk di dalamnya adalah undang-undang tentang Hak Cipta, merupakan bagian dari hukum ekonomi.

⁴⁶ *Ibid.* Hlm: 76

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia; Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm: 101.

⁴⁸ Memaksa artinya pembuat undang-undang tidak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menerapkan atau tidak menerapkan aturan itu. Mengatur artinya hukum itu akan dijadikan acuan oleh para pihak manakala para pihak tidak membuat aturan sendiri yang berlaku bagi hubungan mereka. Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Kedua. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm: 234-235

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, Op.Cit. Hlm: 79-80

Dalam UU Hak Cipta diatur tentang hak eksklusif yang dimiliki pencipta, dengan kebebasan baginya untuk mengeksploitasi hasil ciptaannya, dan melarang siapa pun untuk memanfaatkan hasil kreasinya. Hal ini menunjukkan bahwa UU Hak Cipta ini merupakan bagian dari hukum ekonomi yang bersifat mengatur dengan kebebasan ada pada pemilik ciptaan. Namun selain itu, dalam UU Hak Cipta diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan tentang masa berlaku, fungsi sosial, pelanggaran dan juga pidana, sehingga dapat dikatakan pula bahwa UU Hak Cipta ini bersifat memaksa. Dengan demikian, UU Hak Cipta selain bersifat mengatur hak pencipta juga bersifat memaksa pada publik.

G. Hukum Hak Cipta di Indonesia

1. Pengertian Hak Cipta

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu yang dimaksud dengan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya

melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan sendiri diartikan sebagai hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

2. Prinsip-Prinsip Hak Cipta

Berdasarkan pada Undang-undang Hak Cipta, dapat ditemukan beberapa prinsip dasar hak cipta.⁵⁰

a. Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub-prinsip, yaitu:

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu

⁵⁰ Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung. Hlm.99-106.

pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptan.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu

ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Sementara itu, Tomi Suryo Utomo melihat prinsip-prinsip dalam UU Hak Cipta meliputi hal-hal berikut:⁵¹

- a. Hak Cipta melindungi perwujudan ide ukan ide itu sendiri;
- b. Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- c. Hak cipta bersifat original dan pribadi;
- d. Ada pemisahan antara kepemilikan fisik dengan hak yang terkandung dalam suatu benda;
- e. Jangka waktu perlindungan hak cipta bersifat terbatas;
- f. Pasal-pasal pidana di dalam UU Hak Cipta bersifat delik biasa;
- g. Perlindungan hak cipta berlaku terhadap warga asing yang terlibat dalam perjanjian yang sama.

3. Objek Perlindungan Hak Cipta

Pada dasarnya, setiap karya cipta intelektual manusia layak untuk memperoleh perlindungan hukum dari eksploitasi yang merugikan penciptanya. Namun hak cipta tidak saja berdimensi individu, tetapi juga sosial, sehingga ada beberapa karya intelektual yang tidak dilindungi dan bebas dieksploitasi demi kepentingan umum. Karya cipta yang dilindungi Undang-undang Hak Cipta adalah karya cipta dalam

⁵¹ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm: 70-73.

bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Beberapa karya cipta intelektual yang dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Selain karya cipta tersebut di atas, Undang-undang Hak Cipta juga melindungi beberapa karya yang tidak diketahui penciptanya karena sudah bersifat turun temurun dan menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 10 sebagai berikut.

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus

terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan yang diberikan pemerintah dalam pasal 10 ini sering kali disebut sebagai bentuk perlindungan atas karya intelektual tradisional, yaitu sebuah karya yang bersifat turun temurun dalam suatu komunitas sehingga tidak diketahui secara persis siapa yang pertama kali menciptakannya, dan kapan waktu pertama kali suatu karya cipta tersebut dipertunjukkan kepada umum.

Beberapa karya cipta yang tidak dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta adalah karya-karya yang memang diperuntukkan untuk diketahui dan digunakan oleh masyarakat luas. Beberapa karya cipta yang tidak dilindungi dalam arti menjadi milik publik diatur dalam pasal 13 sebagai berikut:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga- lembaga Negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

4. Masa Perlindungan Hak Cipta

Masa perlindungan suatu karya cipta tidak saja terkait dengan jangka waktu tertentu, namun secara filosofis, masa perlindungan suatu karya sangat erat dengan nilai penghargaan atas besarnya upaya pencipta dalam menghasilkan karyanya juga terkait dengan nilai sosial dari karya itu sendiri. Tujuan dari adanya jangka waktu perlindungan tertentu bagi suatu ciptaan adalah untuk meningkatkan motivasi pencipta dan pada waktu bersamaan memastikan bahwa karya cipta menjadi milik masyarakat setelah jangka waktu perlindungan itu usai. Hal ini memberikan sumbangan bagi pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Sehingga secara konkret adanya pengaturan tentang jangka waktu perlindungan yang tertentu selain memberikan penghargaan kepada pencipta juga sekaligus sebagai pengaturan atas nilai sosial dari suatu karya cipta.⁵²

Dalam pernyataan yang lebih tegas, Sunaryati Hartono menyatakan, sekalipun hukum Indonesia sebaiknya memang mengakui keberadaan hak cipta, namun pengakuannya tersebut tidak boleh lepas dari kepentingan sosial, sehingga masa berlaku yang diberlakukan tidak boleh terlalu lama setelah pencipta meninggal dunia. Pengakuan hak cipta bagi seseorang seharusnya tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat luas, akan tetapi hendaknya diberikan pula untuk kepentingan masyarakat luas di samping untuk kepentingan si

⁵² Tamotsu Hozumi, 2004, *ASIAN Copyright Handbook Indonesian Version*, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Jakarta. Hlm: 26

pencipta.⁵³ Dengan demikian, adanya jangka waktu perlindungan yang terbatas bagi suatu karya cipta, merupakan salah satu bentuk perlindungan pada hak masyarakat pada umumnya.

Dalam UU Hak Cipta, masa perlindungan suatu karya cipta tidak seragam, tergantung pada jenis karya cipta itu sendiri. Berikut tabel beberapa bentuk karya cipta yang dilindungi dengan perincian masa berlaku yang diatur di dalamnya.

Tabel 1. Masa Perlindungan Karya Cipta

No.	Bentuk Ciptaan	Masa perlindungan	Pasal Terkait
1.	<ul style="list-style-type: none"> • buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; • drama atau drama musikal, tari, koreografi; • segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; • seni batik; • lagu atau musik dengan atau tanpa teks; • arsitektur; • ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; • alat peraga; • peta; • terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. • Jika ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. • Jika dimiliki Badan Hukum berlaku hanya 50 tahun sejak diumumkan. 	Pasal 29 (1) dan (2); Pasal 30 (3).
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Komputer; • sinematografi; • fotografi; • database; • karya hasil pengalihwujudan. 	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan	Pasal 30 (1)

⁵³ R. Subekti, 1992, *Bunga rampai Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung, Alumni. Hlm: 139

3.	Perwajahan karya tulis yang diterbitkan	Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.	Pasal 30 (2)
4.	Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, yang hak ciptanya dipegang oleh negara.	Berlaku tanpa batas waktu.	Pasal 31 (1) huruf a.
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan; • Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, 	Berlaku 50 tahun sejak diketahui oleh umum.	Pasal 31 (1) huruf b.
6.	Karya Potret	Sampai 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal	Pasal 19 (1)

Sumber Tabel: Diolah dari UU Hak Cipta.

5. Mekanisme Perlindungan

Suatu karya cipta tidak memerlukan mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. Seorang pencipta secara otomatis memiliki hak cipta atas ciptaannya dan dilindungi oleh hukum dari pelanggaran pihak-pihak lain. Meskipun demikian, pendaftaran dapat dilakukan dengan sukarela.⁵⁴ Pendaftaran ini sama sekali tidak berarti sebagai bukti kepemilikan, ia hanya sebagai bukti awal jika nantinya terjadi sebuah sengketa mengenai ciptaan tersebut.⁵⁵ Hal ini sesuai dengan keterangan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

⁵⁴ Tim Linsay dkk. 2005, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Cet. 4. Alumni, Bandung. Hlm: 107

⁵⁵ Hal ini tidak berarti bahwa bukti pendaftaran adalah satu-satunya alat bukti untuk menentukan kepemilikan hak cipta. Semua tergantung pada pembuktian dalam proses

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
- b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa model perlindungan atas hak cipta bersifat otomatis atau langsung sebagaimana hak cipta itu langsung eksis begitu suatu karya terwujud. Tanpa melalui proses pendaftaran sekalipun, hak cipta tetap melekat pada pencipta dan dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran. Adanya proses pendaftaran hak cipta bersifat sukarela yang berfungsi sebagai bukti awal kepemilikan, yang jika dalam pembuktiannya ternyata ada yang lebih berhak, maka sertifikat pendaftaran dapat dibatalkan.

6. Pelanggaran atas Hak Cipta

Pada umumnya, pelanggaran hak cipta terjadi jika memenuhi dua unsur, yaitu penggunaan materi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak eksklusif, dan ada kesamaan antara dua karya yang ada.⁵⁶ Meskipun begitu, pemilik hak cipta harus membuktikan bahwa pengguna dari materi ciptaan itu benar-benar melakukan tindakan pelanggaran. Jika ada orang lain yang memiliki dua karya yang sama, namun tidak

penyelesaian perkara. Jika tidak ada orang lain yang mampu membuktikan secara yuridis bahwa ia berhak atas hak cipta pada suatu ciptaan, maka pemilik sertifikat pendaftaran tetap dianggap sebagai pemilik hak cipta tersebut. OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, PT. Radja Grafindo Perkasa, Jakarta. Hlm: 89-91.

⁵⁶ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm: 6.

diketemukan adanya unsur pelanggaran, maka hak cipta dapat dimiliki oleh masing-masing pencipta. Artinya hak cipta tidak dilindungi dari adanya karya independen.⁵⁷

Hak cipta juga dianggap dilanggar jika sebagian atau seluruh substansi dari ciptaan yang dilindungi diperbanyak. Bagian yang dijiplak tidak harus dalam besaran tertentu, melainkan dengan ukuran kualitatif, bahwa bagian yang dilanggar itu adalah bagian yang substansial. Bagian substansial ini merupakan bagian yang paling penting, memiliki nilai pembeda atau mudah dikenali.⁵⁸

Selain pelanggaran di atas, ada beberapa tindakan seseorang yang dapat dinilai sebagai pelanggaran atas hak cipta antara lain:⁵⁹

- a. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta;
- a. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta;
- b. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual secara eceran atau didistribusikan;
- c. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.

⁵⁷ Tim Lindsey dkk. 2005, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Cet. 4. Alumni, Bandung. Hlm: 122.

⁵⁸ Tim Lindsey, dkk. *Ibid.* Hlm: 122

⁵⁹ Tim Lindsey, dkk. *Ibid.* Hlm: 123

7. Hak-hak yang Melekat Pada Hak Cipta

Hak yang melekat pada hak cipta pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).

a. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mengeksploitasi ciptaannya untuk memperoleh keuntungan atau kompensasi ekonomi. Hak ekonomi ini terdiri atas beberapa bentuk hak sebagai berikut:⁶⁰

1) *Reproduction right*

Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun peralatan modern.

2) *Distribution right*

Hak distribusi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk untuk menyebarluaskan hasil ciptaannya melalui penjualan atau persewaan agar diketahui oleh masyarakat luas.

3) *Adaptation right*

Hak adaptasi adalah hak untuk mengadaptasi dari suatu ciptaan menjadi bentuk ciptaan lain sebagai pengembangan atau ciptaan baru tetapi tetap berdasarkan ciptaan awal,

⁶⁰ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm:4-5.

seperti penerjemahan atau alih bahasa, aransemen musik, pengubahan karangan menjadi serial film dan sebagainya.

4) *Performing right*

Hak pertunjukan ini berarti bahwa pencipta memiliki hak untuk mempublikasikan atau menampilkan karya ciptanya melalui berbagai media, agar karya ciptanya dapat dibaca, didengar dan dilihat oleh orang lain, seperti pidato, presentasi, penyiaran film, musikalisasi dan sebagainya.

5) *Cable casting right*

Cable casting right merupakan hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel, seperti suatu studio TV menayangkan program acara komersialnya yang disiarkan kepada pelanggan melalui kabel.

6) *Broadcasting right*

Pencipta berhak untuk menyiarkan karya ciptanya dengan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel.

7) *Public/social right*

Hak ini merupakan implementasi dari aspek sosial dari hak cipta yang sering disangkakan sebagai hak eksklusif semata. Hak ini sering disebut sebagai *public lending right*, yaitu hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta tersebut. Hak ini

memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan suatu karya cipta.

8) *Neighbouring right*

Pada dasarnya, hak ini dimaksudkan untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Pemilik dari hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ini meliputi pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan, produser rekaman, serta lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran.

b. Hak Moral

Hak moral lebih pada hak pencipta untuk dilindungi kepentingan reputasi pribadinya maupun atas ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samaran, serta identitas lainnya pada ciptaannya.⁶¹ Sementara itu, dalam penjelasan UU Hak Cipta dijelaskan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Konsep hak moral pada awalnya tidak ada dalam sistem hukum Inggris atau Amerika. Hak moral ini muncul dari sistem hukum

⁶¹ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm: 4-5.

kontinental Perancis.⁶² Istilah ini diperkenalkan baru-baru ini saja dan telah dimasukkan dalam salah satu klausula Konvensi Berne dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya, seperti Konvensi Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*WIPO Convention*).

Adapun hak moral ini pada umumnya terdiri atas tiga hak dasar atas ciptaan, yaitu hak menyebarkan ciptaan, hak mencantumkan nama pencipta, dan hak melindungi integritas ciptaan.⁶³

- 1) Hak menyebarkan Ciptaan (Hak Melindungi ciptaan dari disebarluaskan tanpa Izin)

Pencipta berhak menyediakan ciptaan yang belum disebarluaskan kepada masyarakat luas. Hal ini berarti pencipta memiliki hak untuk memutuskan apakah karya ciptanya, baik orisinal atau turunannya akan disebarluaskan atau tidak.

- 2) Hak Mencantumkan Nama Pencipta (Hak Meminta Pencantuman Nama)

Jika suatu karya cipta hendak diumumkan, si pencipta berhak untuk dicantumkan namanya atau tidak dalam karya tersebut, baik nama asli atau nama samaran. Pencipta juga berhak atas hal ini jika ada karya turunan dari karya aslinya diumumkan. Hal ini tidak berarti bahwa ciptaan itu harus

⁶² Etty Susilowati Suhardo, *Hak Cipta*, makalah disampaikan pada Pelatihan HKI. Recruitment of Training Provider for Retooling Program Batch III, Semarang. Hlm: 6.

⁶³ Tamotsu Hozumi, 2004, *ASIAN Copyright Handbook Indonesian Version*, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Jakarta. Hlm: 22-24.

menggunakan nama pencipta, melainkan pencantuman nama pencipta pada karya yang telah dia ciptakan sebagai pencipta.

3) Hak Melindungi Integritas Ciptaan (Hak Melindungi Ciptaan dari diubah tanpa Izin)

Dalam hal hak ini, pencipta memiliki hak untuk melindungi integritas atau keutuhan ciptaannya dan judul ciptaannya dari distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan lain. Jika suatu karya tulis hendak dilakukan editing, perubahan dalam beberapa sub babnya, editor harus meminta izin terlebih dahulu kepada penulis.

Hak cipta lahir di Eropa-Barat yang falsafah kehidupannya berdasar pada individualisme, sehingga masa perlindungan atas hak cipta diatur begitu panjang sampai ada negara yang mengatur bahwa hak cipta dilindungi secara turun temurun. Hal tersebut dinilai kurang tepat jika disandingkan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, terutama sila ke lima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁴

Dalam setiap hak milik individu terkandung didalamnya hak sosial. Fungsi sosial hak cipta lebih menonjol dari pada fungsi sosial hak atas tanah misalnya, karena masyarakat membutuhkan karya sastra, ilmu pengetahuan dan seni yang murah. Oleh karena itu sangat

⁶⁴ R. Subekti, 1992, *Bunga rampai Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung, Alumni. Hlm: 134, 138.

berkepentingan agar hak cipta tidak terlalu lama dimiliki oleh para ahli waris pencipta.

Menurut Sunaryati Hartono, sekalipun hukum Indonesia sebaiknya memang mengakui keberadaan hak cipta, namun pengakuannya tersebut tidak boleh lepas dari kepentingan sosial, sehingga masa berlaku yang diberlakukan tidak boleh terlalu lama setelah pencipta meninggal dunia. Pengakuan hak cipta bagi seseorang seharusnya tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat luas, akan tetapi hendaknya diberikan pula untuk kepentingan masyarakat luas di samping untuk kepentingan si pencipta.⁶⁵

H. Pengaturan Tentang Hak Kekayaan Intelektual Tradisional

1. Pengertian Pengetahuan Tradisional

WIPO mendefinisikan *Traditional Knowledge* sebagai *traditional based literary, artistic or scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names, and symbols, undisclosed information, and, all traditional based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*⁶⁶

Berdasarkan pengertian dari WIPO tersebut, Subroto dan Suprapedi kemudian merumuskan pengetahuan Tradisional sebagai

⁶⁵ R. Subekti, 1992, *Bunga rampai Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung, Alumni. Hlm: 139

⁶⁶ Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm: 174.

bentuk inovasi, kreasi dan ekspresi kultural yang dihasilkan dan dipelihara secara turun temurun oleh penduduk asli atau suatu komunitas lokal atau individu dalam suatu komunitas lokal suatu negara. Dalam banyak kasus, pengetahuan tradisional sering dihubungkan dengan penggunaan dan aplikasi dari sumber genetik, biologis dan alam atau manajemen dan konservasi dari sumber daya tersebut dan lingkungannya yang mempunyai nilai-nilai ekonomi, komersial dan kultural.⁶⁷

Dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, pengetahuan tradisional didefinisikan sebagai karya intelektual yang berkaitan dengan teknologi, kosmologi, tata nilai, kaidah seni, tata masyarakat, taksonomi, tata bahasa dan kandungan konsep dalam kata, yang dihasilkan oleh kreasi, ketrampilan, invensi, dan inovasi yang berdasarkan tradisi masyarakat tertentu.⁶⁸

Sementara itu menurut Djumhana,⁶⁹ pengetahuan tradisional dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang mengacu pada macam HKI.

- a. Bidang budaya, seperti folklor yang dapat berbentuk ekspresi cerita rakyat dalam bentuk musik, tarian, nyanyian, bentuk tersebut lebih banyak yang berkaitan dengan hak cipta;
- b. Bidang teknis medis, industri, pertaian, dan bidang lainnya yang berkaitan dengan paten;

⁶⁷ Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakarta. Hlm: 145.

⁶⁸ Pasal 1 ayat (1) *RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional* terakhir tahun 2007.

⁶⁹ Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm: 16.

- c. Bidang desain, kerajinan tangan, dan simbol-simbol yang berkaitan dengan desain industri; dan,
- d. Indikasi geografis dan indikasi asal.

Berasarkan beberapa rumusan yang luas tersebut, dapat kita lihat bahwa pengetahuan tradisional memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bidang pengetahuan itu sangat luas mencakup pengobatan medis, tentang pertanian, dan tentang perlindungan lingkungan, bahkan mungkin lebih luas lagi.
- b. Pengetahuan tradisional tersebut selalu terkait dengan suatu komunitas tertentu, bahkan sangat mungkin menjadi semacam identitas sebuah komunitas.
- c. Keberadaannya merupakan upaya untuk bertahan dan melindungi lingkungan tradisional tersebut.
- d. Pengetahuan tersebut telah beralih dari generasi ke generasi, sehingga akan sulit menentukan penemu pertama pengetahuan tersebut secara pasti.

Dalam penejelasan RUU Perubahan UU Hak Cipta dinyatakan kriteria mengenai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi, harus mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini:⁷⁰

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
- b. gerak, mencakup antara lain: tarian;

⁷⁰ Penjelasan Pasal 13 ayat (2) *RUU Perubahan Undang-Undang Hak Cipta*. 2009.

- c. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- d. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- e. upacara adat.

2. Urgensi Perlindungan Pengetahuan Tradisional

Agus Sardjono mengemukakan tiga alasan dasar mengapa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya perlu dilindungi, pertama, adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional. Kedua, keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan ketiga, perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.⁷¹

a. Potensi Ekonomi

Berbagai sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional terkait, sampai saat ini oleh pihak dalam negeri belum begitu mendapat tempat untuk dieksplorasi secara ekonomi, padahal banyak dari kekayaan hayati Indonesia yang telah digunakan bahkan dipatenkan oleh negara lain. Di Amerika, dari 45 jenis obat penting berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan 14 jenis diantaranya berasal dari Indonesia. Sementara di Jepang juga banyak paten atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari *biodeversity* dan pengetahuan tradisional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa

⁷¹ Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung. Hlm: 2-11.

selama ini Indonesia sebagai pemilik kekayaan hayati dan pengetahuan tradisional, belum bisa menikmati potensi ekonomi dari kekayaan yang dimilikinya.

b. Keadilan Sistem Perdagangan Dunia

Sistem HKI dalam *TRIPs Agreement* yang diterapkan di Indonesia di bawah *World Trade Organisation* (WTO) tidak bisa dipungkiri adalah hasil tekanan dunia yang diwakili oleh negara-negara adikuasa. Namun di sisi lain, negara-negara adikuasa tersebut tidak mau memperhatikan kepentingan perlindungan kekayaan intelektual masyarakat lokal dalam bentuk pengetahuan tradisional. Ketidakadilan ini misalnya dalam penerapan prinsip non-diskriminasi dalam *Uruguay Round* yang terkait dengan *place of invention* atau *field of technology*. Misal, bila ada penemu berkebangsaan Amerika yang meminta perlindungan paten di Indonesia (atau di negara mana pun) atas invensi yang dihasilkan dari riset yang mengambil bahan dasar pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia, maka Ditjen HKI tidak boleh menolak permintaan tersebut. Demikian pula halnya, apabila ada anggota masyarakat Indonesia yang ingin memperoleh perlindungan atas pengetahuan tradisional mereka, mereka harus memanfaatkan rezim paten. Hal ini jelas tidak seimbang dan jauh dari keadilan bagi masyarakat lokal yang tidak mengenal dan asing dari rezim paten.

c. Perlindungan Hak Masyarakat Lokal

Pemerintah dinilai perlu memberikan proteksi atau perlindungan atas hak masyarakat berkenaan dengan pengetahuan tradisional mereka, karena masyarakat sendiri tidak sepenuhnya menyadari bahwa pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya mereka memiliki potensi ekonomi dan rentan untuk dicuri atau disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat yang menganggap bahwa pengetahuan tradisional tersebut adalah milik bersama. Melimpahkan pengetahuan tersebut kepada orang lain dianggap merupakan suatu kebajikan yang akan mendapat balasan di hari kemudian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlindungan terhadap pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya yang ada dalam masyarakat menjadi sangat penting. Endang Purwaningsih menegaskan bahwa *traditional knowledge* harus dilindungi secara defensif, yakni untuk menjamin supaya pihak lain tidak dapat memperoleh HKI atas *traditional knowledge* tersebut dan perlindungan positif melalui sarana hukum, utamanya hukum intelektual dan hukum kontrak.⁷²

⁷² Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm: 246.

3. Hak Cipta Atas Pengetahuan Tradisional

Sampai saat ini, usaha membuat sistem perlindungan khusus atas pengetahuan tradisional masih belum mencapai titik final. Usaha tersebut dilakukan dalam lingkup internasional maupun nasional. Dalam lingkup nasional, pemerintah Indonesia tengah merancang sebuah praturan perundang-undangan *sui generis* Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional, yang nantinya diharapkan menjadi payung hukum bagi upaya-upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya.

Beberapa Undang-undang HKI, hanya Undang-undang Hak Cipta saja yang secara langsung menyinggung perlindungan atas keragaman pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya. Hal ini dirujuk pada ketentuan Pasal 10 UU Hak Cipta mengenai ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, seperti karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, atau folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, maka hak cipta atas karya-karya tersebut dipegang oleh negara.

Dengan penguasaan hak cipta pada negara, pemanfaatan karya-karya tradisional oleh warga negara asing harus memperoleh izin dari instansi yang ditunjuk. Namun sayang sampai saat ini, peraturan

pemerintah yang diamanatkan undang-undang tersebut tidak juga lahir, bahkan sampai sudah tersusunnya rancangan undang-undang pengganti UU Hak Cipta sekarang. Hal ini menjadikan operasionalisasi dari ketentuan undang-undang tersebut terhambat.

Agus Sardjono memberikan banyak alternatif dalam memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya, salah satunya dengan mengamandemen UU HKI agar memasukkan di dalamnya ketentuan perlindungan atas karya tradisional. Amandemen tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan aturan sebagai berikut:⁷³

- a. Setiap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia oleh pihak asing, harus dilakukan dengan persetujuan dari otoritas publik yang mewakili kepentingan masyarakat Indonesia.
- b. Setiap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia, harus dilakukan dengan menyebutkan asal-usul dari sumber daya dan pengetahuan yang dimaksud.
- c. Pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia harus dilakukan dengan pembagian manfaat yang disepakati bersama antara otoritas publik yang dimaksud dengan pihak asing tersebut.

⁷³ Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung. Hlm: 247

I. Sejarah dan Perkembangan Seni Batik

1. Keragaman Kain Nusantara

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah sangat luas dan terbagi-bagi dalam tidak kurang 17.500 pulau, baik besar maupun kecil. Keberagaman wilayah menjadikan budaya setiap daerah yang terpisah memiliki perbedaan dengan daerah yang lain. Oleh karena itulah, Indonesia menjadi satu negara yang memiliki banyak sekali keragaman budaya dan tradisi masyarakat selain juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Tercatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 300 suku dan sekitar 265 bahasa daerah.⁷⁴ Ini adalah kekayaan Indonesia yang tidak ternilai.

Perjalanan sejarah membawa setiap suku di masing-masing wilayah memiliki tradisi dan budaya yang khas dan berbeda dengan tradisi suku lain. Keragaman tradisi ini antara lain terwujud dari berkembangnya banyak jenis kain tradisional yang khas dimiliki oleh hampir setiap suku yang diwariskan secara turun temurun.

Diantara jenis kain tradisional yang populer antara lain kain tenun, kain songket, kain batik, kain sulam dan bordir yang masing-masing merupakan gambaran kekayaan budaya dan tradisi masyarakat tradisional. Masih banyak jenis kain yang tidak dapat disebutkan, yang sampai saat ini belum begitu digali dan masih menjadi ciri khas budaya masyarakat tertentu. Keberagaman kain itu kemudian dikenalkan

⁷⁴ <http://www.rumahpesonakain.org/kain-nusantara>

secara nasional sebagai kain nusantara. Sehingga secara sederhana kain nusantara dapat dimengerti sebagai kain-kain tradisional warisan budaya mulai dari batik, songket, tenun, ikat, hingga sulam dari berbagai daerah di Indonesia.⁷⁵

Kain tradisional Indonesi atau lebih dikenal sebagai kain nusantara memiliki nilai budaya tinggi, terutama dari sudut estetis, bermakna simbolis dan memimiliki falsafah yang mendasari pembuatannya. Keragaman dan keunikan ragam hias kain nusantara tercermin dengan jelas pada unsur yang terkait dengan pemujaan pada leluhur dan kebesaran alam. Dalam setiap kegiatan tradisi atau ritual budaya keluarga maupun agama, kain tradisional ini hampir selalu menempati bagian yang amat penting.

Beberapa jenis kain nusantara yang sudah menjadi ikon dan dikenal secara nasional bahkan internasional memiliki nilai-nilai tradisi yang kuat antara lain:

a. Kain Tenun

Kain ini dalam beberapa literatur dinyatakan telah dikenal sejak jaman prasejarah. Kain tenun ini banyak ditemui di daerah pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan Nusa Tenggara Timur. Diperkirakan masyarakat membuat alat tenun dan menemukan bahan-bahan langsung dari alam berupa serat pohon dan getah serta dedaunan sebagai pewarna. Hal ini menunjukkan

⁷⁵ <http://traditionalfabric.blogspot.com>

bahwa tenun benar-benar asli berasal dari masyarakat tradisional Indonesia. Keahlian masyarakat dalam membuat kain tenun ini diperkirakan sejak masa perundagian atau perunggu yaitu mulai abab 8 sampai abab ke-2 sebelum masehi.⁷⁶

b. Kain Tenun Songket

Para ahli sejarah memperkirakan bahwa keberadaan seni kain tenun songket (gabungan antara seni tenun berbahan sutera atau benang kapas dan penambahan ragam hias dengan teknik cucuk yang mempergunakan benang emas atau perak) berkembang bersamaan dengan kejayaan Kerajaan Sriwijaya mulai sekitar abad ke-11. Seni kain tenun songket ini berkembang di Palembang dan kemudian berkembang ke wilayah-wilyah lain di Sumatra seperti Lampung dan Minangkabau. Berdasarkan warna dan ragam hiasnya, kain tenun songket ini dapat membedakan status sosial dari si pemakai. Dalam perkembangannya kain tenun songket terpengaruh dengan banyaknya orang asing yang masuk wilayah palembang, sehingga beberapa kain tenun songket ini memiliki nama sesuai dengan daerah asing yang mempengaruhinya seperti “Bungo Cino” dan “Bungo Pacik”.

c. Kain Batik

Kain batik saat ini telah tersebar hampir ke seluruh penjuru dunia, hal ini tidak mengherankan, karena ternyata dalam sejarah, teknik

⁷⁶ <http://www.rumahpesonakain.org/kain-nusantara>

membatik dikenal sebagai teknik yang universal, bahkan di masyarakat Peru Kuno di Amerika Selatan, teknik ini telah digunakan untuk menghias tembikar. Namun seni batik mencapai puncak estetikanya di Jawa pada permulaan abad 19 dengan mulai ditemukannya bahan tenun kapas halus yang diimport dari Inggris dan Belanda. Bagi masyarakat Jawa, sepotong batik tidak hanya selembat kain untuk busana tetapi dipakai dalam beberapa tingkat kehidupan mulai seorang bayi lahir sampai saat dia meninggalkan dunia ini, juga dalam seni tari, seni drama dan busana untuk anggota keluarga raja.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelas bahwa batik hanyalah salah satu dari sekian banyak ragam jenis kain nusantara yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Meski begitu, batik menjadi satu teknik yang *luwes* dan mudah berkembang mengikuti jaman serta relatif mudah dalam mereproduksinya. Tidak heran kemudian jika batik menjadi kain tradisional yang paling dikenal di Indonesia, bahkan di hampir wilayah Indonesia memiliki kain bercorak batik yang khas sesuai dengan kondisi budaya dan tradisi masyarakatnya.

Meski Indonesia memiliki begitu banyak ragam kain nusantara, namun pengetahuan masyarakat akan keragaman itu sangat minim, apalagi terkait dengan kain yang bersifat etnik.⁷⁷ Beberapa kain tradisional di daerah yang memiliki pesona masing-masing, sebagian

⁷⁷ http://leisure.id.finroll.com/nite-life/17-berita-terkini/3320-____masyarakat-kurang-tahu-produksi-kain-nusantara____.html

sudah tidak lagi diproduksi bahkan sudah hilang ditelan usia. Menghadapi persolanan ini, pemerintah bersama masyarakat harus bersama-sama untuk mengupayakan pelestarian dan pengembangan untuk berbagai jenis kain nusantara tersebut.

2. Sejarah dan Perkembangan Batik di Indonesia

Beberapa pengertian mengenai batik perlu dikemukakan di sini. Batik merupakan salah satu cara pembuatan bahan pakaian. Selain itu batik bisa mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Dalam literatur internasional, teknik ini dikenal sebagai *wax-resist dyeing*. Pengertian kedua adalah kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, termasuk penggunaan motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan.⁷⁸ Jenis batik sebagai sebuah proses ada bermacam-macam. Dari segi cara membuatnya ada dikenal batik tulis, batik cap, batik saring, batik celup, dan batik terap. Masing-masing memiliki keunikan dan kualitas yang menentukan nilai harganya di pasaran.

Pengertian batik yang lain dikemukakan oleh Iwan Tirta, dijelaskan bahwa batik merupakan teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dimana semua proses tersebut menggunakan tangan. Batik juga dapat diartikan

⁷⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Batik>

sebagai seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanaasan), hingga menghasilkan motif halus yang semuanya memerlukan ketelitian tinggi.⁷⁹

Sementara menurut Hamzuri, batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Orang melukis dengan menggunakan canting pada kain mori disebut membatik. Membatik menghasilkan batik atau batikan berupa macam-macam motif dan mempunyai sifat khusus yang dimiliki oleh batik itu sendiri.⁸⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka untuk disebut sebagai kain batik tradisional harus memenuhi beberapa unsur yaitu, dari kain mori⁸¹ (kain putih atau polos sebagai dasar), dilukis dengan canting, menggunakan lilin (malam) sebagai perintang warna, dan memiliki nilai seni atau estetis.

Dalam perjalanan sejarahnya, wujud kebudayaan yang berbentuk karya seni batik tradisi, tidak hanya terdapat di Jawa, tetapi hampir di semua belahan dunia ini seni batik yang menggunakan media canting telah berlangsung lama dan turun temurun. Oleh karenanya, seni batik juga dikatakan sebagai seni budaya yang pada hakekatnya bersifat

⁷⁹ Afriliyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia; Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm: 44.

⁸⁰ *Ibid.* Hlm: 44.

⁸¹ Bisa jenis kain lain sesuai dengan kebutuhan.

kosmopolis dan universal. Sehingga seni tradisi dapat muncul kapan saja, di mana saja sepanjang manusia masih ada.⁸²

Keberadaan atau eksistensi batik di Indonesia dapat ditelusuri dalam sejarah perkembangannya. Batik memiliki keterkaitan erat dengan hak cipta perlambang status keraton di Jawa. Pada awal mula kemunculannya, batik sebenarnya berasal dari masyarakat biasa. Baru kemudian pihak Kraton merasa tertarik, dan kemudian pada tahun 1769 Susuhunan Surakarta Hadiningrat mengeluarkan pranata (keputusan formal), bahwa motif/corak batik “jilamprang” dilarang dipakai oleh siapapun kecuali Susuhunan sendiri dan putra putrinya. Kemudian pada tahun 1785, Susuhunan mencanangkan pola parang rusak bagi keperluan pribadinya. Dan pada tahun 1792 dan 1798, Susuhunan melalui *Pengageng* (pejabat) keraton mengeluarkan batasan-batasan atas pola-pola yang dipakai untuk keperluan tertentu di lingkungan keraton, seperti corak sawat lar, parang rusak, sumengkirang dan udan liris. Sejalan dengan pranata tersebut, maka beberapa pengrajin batik seperti keluarga Wicitran, mulai masuk Istana dan dianugerahi gelar bangsawan.⁸³

Batik rakyat yang masuk ke Istana kemudian menemukan pola-pola khusus yang diperuntukkan keluarga Istana. Pola-pola batik tersebutlah

⁸² Cassires dalam Sarwono, *Reposisi Kreasi Budaya dalam Penguatan Masyarakat Lokal*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional PEMBERDAYAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) GUNA PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL, Surakarta, 24 April 2010. Hlm: 1.

⁸³ Sudarmono dalam Dharsono Sony Kartika, 2007, *Budaya Nusantara (Kajian Konsep Mandala dan Konsep Triloka/Buana terhadap Pohon Hayat pada Batik Klasik)*, Rekayasa Sains, Bandung. Hlm: 8

yang kemudian dikenal dengan batik klasik. Namun keberadaan batik istana tersebut sekaligus memberikan eksistensi batik rakyat. Setidaknya pada tahun 1930 telah ada 236 pengusaha batik pribumi, 88 Arab, 60 Cina dan 3 Eropa.⁸⁴

Lambat laun, batik digemari oleh masyarakat pada umumnya, sehingga tidak lagi eksklusif milik Istana. Namun pandangan masyarakat bahwa Keraton tetap menjadi pusat kebudayaan sangat melekat. Bahkan raja masih dianggap sebagai sumber kekuatan yang memberikan motivasi kultural.

Dinamika perkembangan batik mengalihkan perhatian konsumen batik. Masyarakat secara umum beralih ke tekstil kain motif batik, sedang kaum borjuis Indonesia bertahan memakai kain batik alus untuk keperluan acara resmi maupun pesta-pesta. Dinamika tersebut membawa batik (batik canting) ke singgahsana eksklusif. Batik tulis yang berkembang sekarang justru mempunyai posisi yang jelas dalam eksistensinya.⁸⁵

Kerangka pikir tersebut memberikan pemaknaan terhadap batik klasik sebagai simbol ekspresi kebudayaan Jawa, merupakan daya tahan kebudayaan dalam bentuk pelestarian dan pengembangan, sesuai dengan kebutuhan manusia dan masyarakatnya, sumber daya

⁸⁴ Berdasarkan laporan P. De. Kat Angelino, dalam Kercher yang dikutip kembali oleh Dharsono, *Ibid.* Hlm: 9

⁸⁵ Prisma, 5 Mei 1987: 56-57, dalam Dharsono, *Ibid.* Hlm: 10

lingkungan dan pranata-pranata sosial yang ada pada masyarakat Jawa.⁸⁶

Namun karena harga kain batik yang dibuat secara tradisional masih dinilai mahal, maka lebih banyak masyarakat memilih membeli kain bermotif batik dengan metode printing. Di satu sisi, hal ini menggembirakan, karena kecintaan masyarakat akan batik tersalurkan tanpa harus merogoh kantong terlalu dalam. Namun di sisi lain, keberadaan perajin batik tradisional yang tidak bisa bersaing dengan produsen batik modern menjadi tersisih, padahal merekalah yang pada mulanya melakukan upaya pelestarian batik dengan metode yang asli.

E. HKI dan Otonomi Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan begitu luas kewenangan kepada daerah untuk berekspresi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Orientasi kemandiri menjadi sebuah tujuan yang mesti diusahakan oleh daerah. Otonomi jangan sampai dimakanai sebagai sebuah pragmatisme daerah untuk menunjukkan perbedaan, apalagi hanya sampai pada orientasi pendek untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dari pusat.⁸⁷

Otonomi Daerah haruslah diorientasikan pada kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Menurut Jimly, kebijakan

⁸⁶ Dharsono Sony Kartika, 2007, *Budaya Nusantara (Kajian Konsep Mandala dan Konsep Triloka/Buana terhadap Pohon Hayat pada Batik Klasik)*, Rekayasa Sains, Bandung. Hlm: 11

⁸⁷ Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm: 190.

otonomi daerah tidak boleh hanya dilihat dari sudut pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, namun juga dalam konteks pengalihan kewenangan dari pemerintah ke masyarakat. Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaannya dan kemandiriannya.⁸⁸

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja dan kemandirian daerah, pemerintah lokal mesti melakukan pemetaan potensi ekonomi yang dimilikinya, bukan hanya dari segi potensi sumber daya alam (SDA) namun juga potensi-potensi yang dimiliki dari sumber daya manusianya (SDM). Salah satu bagian dari potensi SDM adalah daya kreativitas dan intelektual menciptakan banyak kreasi baru yang memiliki nilai ekonomi. Di sinilah, HKI menjadi salah satu potensi unggul daerah yang patut diperhitungkan.

1. Pengetahuan Tradisional Sebagai Salah Satu Modal Pembangunan Daerah

Dalam era Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk benar-benar berkreasi dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Namun rupanya cengkeraman pemerintah pusat masih sangat kuat dengan adanya beberapa aspek penting yang masih dikelola pusat, seperti kebijakan fiskal. Setidaknya ada tiga permasalahan pokok dalam otonomi daerah yang terekam dalam TAP MPR Nomor

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie dalam pengantarnya dalam Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm: xii.

IV/MPR/2000 yaitu, pertama, penyelenggaraan otonomi daerah yang diselenggarakan pemerintah pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga terjadi apa yang disebut penyebutan proses desentralisasi. Kedua, pusat masih mempertahankan kekuatan kebijakan setralisasi yang membuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat semakin tinggi dan ini diyakini telah nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintah di daerah. Ketiga, adanya kesenjangan antar daerah dan pusat dan antar daerah sendiri dalam pemilikan sumberdaya alam, sumber daya manusia dan infra sturktur ekonomi. Keempat, adanya kepentingan yang sangat melekat pada berbagai pihak yang menghambat proses otonomi daerah.⁸⁹

Ryas Rasyid sebagai seorang perancang UU Pemerintah Daerah, menyatakan dengan tegas bahwa otonomi daerah dalam konteks kebudayaan bermakna sebagai peluang yang terbuka luas bagi daerah-daerah untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai dan karakter budaya setempat. Ini akan membangkitkan harga diri dan kebanggaan masyarakat sebagai bagian dari kebhinekaan budaya nasional kita. Kebanggaan atas identitas kebudayaan lokal tidak seyogyanya dicurigai sebagai ancaman persatuan nasional, karena justru dengan

⁸⁹ M. Saleh Soeaidy, Otonomi daerah dan resolusi Konflik Pusat-daerah, dalam Syamsyuddin Jadir (edtr), 2005, *Desentralisasi & Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), Jakarta. Hlm: 330.

kuatnya budaya lokal tersebut akan menguatkan dan memperkaya budaya nasional kita.⁹⁰

Penyataan Ryaas Rasyid tersebut mestinya mencambuk pemerintah yang ada di daerah untuk mengembangkan diri, terutama dalam hal identitas daerah. Kencangnya isu persaingan antara daerah dalam era otonomi daerah ini, mengharuskan pemerintah masing-masing daerah untuk melakukan identifikasi potensi yang mereka miliki, untuk kemudian dieksploitasi menjadi satu ikon kebanggaan yang bisa disandingkan dan dipersaingkan dengan kekayaan budaya daerah lain. Persaingan ini bersifat positif karena selain akan meningkatkan kesadaran masyarakat lokal akan nilai budaya setempat, juga sekaligus sebagai upaya promosi produk budaya dalam rangka peningkatan pendapatan secara ekonomi.

Mengingat otonomi daerah dalam prakteknya juga mampu menjadi penyulut konflik horizontal⁹¹ seperti etno-sentrisme, arogansi daerah, kemaruk kekuasaan daerah, egoisme daerah, primordialisme serta lunturnya nilai-nilai keindonesiaan, maka pengelolaan HKI Tradisional oleh pemerintah daerah juga mesti dengan kehati-hatian. Karena suatu budaya atau pengetahuan dan ekspresi tradisional sangat mungkin dimiliki oleh masyarakat beberapa daerah. Sehingga jika oleh

⁹⁰ Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya, dalam *Ibid.* Hlm: 18

⁹¹ Abdulkahar Badjuri, Otonomi daerah dan Fenomena Etnosentrisme, dalam Syamsyuddin Jadir (edtr), 2005, *Desentralisasi & Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), Jakarta. Hlm: 234.

pemerintah daerah tertentu dengan serampangan diklaim menjadi milik eksklusif daerah tersebut, maka konflik tidak bisa terhindarkan.

Dalam kaitannya pengembangan HKI perlu dilakukan dua hal tindakan fundamental, pertama, melakukan perubahan orientasi atau persepsi masyarakat terhadap SDA. Kedua, menggalakkan program pengembangan SDM. Perubahan orientasi masyarakat atas SDA penting dilakukan karena pada dasarnya SDA tidak menggerakkan ekonomi, namun SDM-lah yang telah melakukannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlena dengan bahasa-bahasa hiburan bahwa negeri kita kaya-raja, subur makmur dan sebagainya, karena semua itu tidak akan berarti apa-apa jika SDM kita tidak mumpuni. Dari sini menjadi jelas bahwa program pengembangan SDM mutlak diperlukan. SDM yang berkualitas dan memiliki kreatifitas dan inovasi tinggi, akan menjadi modal besar bagi negara untuk maju. Di sinilah HKI akan menjadi sebuah sistem yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia, namun jika SDM kita lemah dan hanya menjadi pengekor saja, maka sistem HKI justru akan menjadi bumerang, karena kita akan selalu menjadi pengekor dan pengguna serta konsumen belaka yang harus membayar lebih untuk sebuah pemanfaatan karya yang dilindungi oleh rezim HKI.⁹²

⁹² A. Zen Umar Purba, *Sistem HAKI Nasional dan Otonomi Daerah*, makalah disampaikan pada acara seminar nasional, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI DAN MEREK, diselenggarakan bekerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum Universitas Manado, Yayasan Klinik HaKI, JIII, APIC, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, didukung oleh JPO dan Ditjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM, Manado, 18, Februari 2002.

Dengan konsep berpikir di atas, maka pemerintah daerah tidak harus berpangku tangan menunggu uluran tangan Pusat melalui DAU, karena pada dasarnya setiap daerah memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunannya. Beragamnya sumber daya hayati serta banyaknya jenis pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang dapat dieksplorasi menjadi nilai ekonomi, dengan ditunjang kualitas SDM yang unggul, akan menjadi sebuah modal pembangunan yang sangat potensial bagi sebuah daerah otonomi.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan HKI Tradisional

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang merupakan perubahan dari UU nomor 22 tahun 1999, memiliki politik hukum dan visi yang sama. Menurut Riyas Rosyid sebagai salah satu arsitek UU Pemerintahan Daerah di era reformasi, ada tiga hal yang menjadi visi daripada UU Pemerintahan daerah ini:

- a. Membebaskan pemerintah pusat dari beban mengurus soal-soal domestik dan menyerahkannya kepada pemerintah lokal agar pemerintah lokal secara bertahap mampu memberdayakan dirinya untuk mengurus urusan domestiknya;
- b. Pemerintah pusat dapat berkonsentrasi pada masalah makro nasional;
- c. Daerah bisa lebih berdaya dan kreatif.

Dari ketiga visi tersebut, kemudian dimanifestasikan dalam visi bidang politik ekonomi dan sosial budaya sebagai berikut:

- a. Di bidang politik: munculnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis, lahirnya pemda yang responsif atas tuntutan masyarakat, lahirnya keputusan-keputusan yang bertanggungjawab, adanya transparansi kebijakan, adanya struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, adanya sistem dan pola karier yang kompetitif, adanya manajemen pemerintahan yang efektif dan objektif.
- b. Di bidang ekonomi: menjamin lancarnya ekonomi nasional di daerah sekaligus memberi kesempatan bagi daerah untuk membuat kebijakan ekonominya sendiri.
- c. Di bidang sosial dan budaya: membangun harmoni sosial sekaligus memelihara nilai-nilai lokal yang dianggap kondusif.⁹³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka secara filosofis keberadaan sistem otonomi daerah memberikan kewenangan yang begitu luas kepada daerah untuk berinovasi dalam kemandirian. Masing-masing daerah dapat merancang sistem ekonominya sendiri melalui prioritas-prioritas pembangunan yang menunjang. Industri kreatif yang selama ini kurang menjadi prioritas pengembangan, seiring dengan bertambahnya pengetahuan tentang HKI, dapat dijadikan salah satu modal pembangunan daerah.

⁹³ Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES. Hlm: 228-229.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Eksistensi Motif Batik Kebumen Sebagai Karya Cipta Intelektual

Tradisional

Batik bukan saja dikenal di Indonesia saja, melainkan hampir dikenal di seluruh negara.⁹⁴ Artinya masing-masing komunitas masyarakat memiliki sejarah atas kesenian batik mereka masing-masing, dan memiliki kekhususan dalam hal cara maupun motif batik tersebut. Jika ditinjau dari keberadaan batik sendiri yang sudah berumur beratus tahun silam, maka batik sebagai sebuah proses merupakan sebuah karya intelektual tradisional, mengingat hal tersebut telah berjalan begitu lama dan diajarkan secara turun temurun sehingga keberadaan penggagas awal hampir sangat tidak mungkin untuk dilacak.

Namun begitu, dalam perkembangannya batik tidak saja diartikan sebagai proses, melainkan juga kain batik itu sendiri yang telah menjadi produk jadi. Dari sini maka dapat dipahami bahwa batik sebagai sebuah proses merupakan bentuk kreatifitas intelektual yang bersifat tradisional, namun dalam bentuk kekayaan motif dan bentuk, batik dapat saja merupakan kreatifitas yang sama sekali baru dan bersifat individual yang lebih dikenal sebagai motif batik kontemporer.

⁹⁴ <http://www.rumahpesonakain.org/kain-nusantara>

Motif batik yang merupakan hasil kratifitas intelektual tradisional secara umum dapat ditelusuri di beberapa daerah. Motif batik tradisional ini biasanya ada di setiap daerah yang merupakan ciri atau ikon dari daerah tersebut.

Secara umum motif tradisional batik ini dapat dibagi menjadi dua pola yang saling berpengaruh kuat, yaitu Batik Pesisir, dan Batik Pedalaman. Batik Pesisir atau batik dari daerah pantai yang banyak tumbuh di daerah-daerah pantai utara pulau Jawa, misalnya Jakarta (Batavia), Cirebon, dan Pekalongan. Sedangkan Batik Pedalaman umumnya masih dipengaruhi adat istiadat kraton, misalnya Solo dan Yogyakarta. Selain kedua jenis pola batik tersebut, ada daerah lain yang merupakan percampuran, seperti Tasikmalaya Jawa Barat dan Madura Jawa Timur.⁹⁵

Ciri khas dari motif atau corak batik di suatu daerah yang membedakan dengan daerah lain sebenarnya tidak semata disebabkan karena perbedaan kondisi geografis, tetapi juga pada aspek individual perajian batik, yaitu tergantung pada kedalaman jiwa seni, keluasan wawasan, serta kelihaian masing-masing dalam membuat motif tersebut.⁹⁶ Dengan demikian, meski suatu motif batik sangat bercirikan daerah yang sifatnya adalah tradisional, dalam arti turun temurun, namun dalam bentuk motif jadi yang dihasilkan seorang tetap merupakan karya intelektual individu.

⁹⁵ Anesia Aryunda Dofa, 1996. *Batik Indonesia*, PT. Golden Terayon Press, Jakarta. Hlm: 23-24.

⁹⁶ *Ibid.* Hlm: 25.

Dengan memahami pemaparan di atas, maka dengan jernih akan kita dapatkan deskripsi tentang eksistensi atau keberadaan dari motif batik Kebumen sebagai karya intelektual tradisional. Untuk mempermudah dekripsi maka pertama akan penulis paparkan mengenai kondisi umum Kabupaten Kebumen, kemudian mengenai sejarah dan perkembangan Batik Kebumen, dan terakhir eksistensi batik Kebumen ditinjau dari segi industri dalam arti ekonomi, dan juga dari sudut seni dalam arti budaya masyarakat, yang merupakan hasil wawancara dan juga kajian literatur.

1. Kondisi Umum Kabupaten Kebumen

Kota Kebumen memiliki semboyan kota BERIMAN yang merupakan akronim dari Bersih, Indah, Manfaat, Aman, dan Nyaman. Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27' - 7°50' Lintang Selatan dan 109°22' - 109°50' Bujur Timur. Bagian selatan [Kabupaten Kebumen](#) merupakan dataran rendah, sedang pada bagian utara berupa pegunungan, yang merupakan bagian dari rangkaian [Pegunungan Serayu](#). Di Daerah selatan kota Gombong, terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai selatan. Daerah ini terdapat sejumlah gua dengan stalagtit dan stalagmit.

Wilayah Kebumen sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo yang merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Sementara sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Sebelah selatan Kebumen berbatasan

langsung dengan Samudera Hindia, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Kabupaten Kebumen mempunyai luas wilayah sebesar 128.111,50 ha atau 1.281,11 km² dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan pegunungan, namun sebagian besar merupakan dataran rendah.⁹⁷

Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, tercatat pada tahun 2006 angka kemiskinan mencapai 30,9%. Presentase ini membawa Kabupaten Kebumen menempati peringkat ketiga dalam hal jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes dan Grobogan. Jika dilihat dari segi pendidikan, pada tahun 2005 data menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 91,28%, APM SMP sebesar 66,68%, sedangkan untuk APM SLTA sebesar 41,96%. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari limapuluh persen penduduk Kabupaten Kebumen usia sekolah, pada tahun 2005 tidak bisa menikmati bangku sekolah SLTA.⁹⁸

Kota Kebumen dikenal sebagai kota santri, hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk dan agama yang mereka anut, serta banyaknya jumlah madrasah serta pesantren. 98,68% penduduk beragama Islam, 91 Pesantren, 6 Madrasah Aliyah Negeri, dan 4 swasta. Selain itu juga karena Kebumen juga memiliki sejarah heroik yang dilakukan

⁹⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kebumen diunduh pada tanggal 20 Mei 2010, pukul 11.00 WIB.

⁹⁸ *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025*. Lampiran. Hlm: 97 dan 31.

kaum santri melalui perjuangan Angkatan Oemat Islam di Sumalangu.⁹⁹

Dalam hal kebudayaan, Kebumen memiliki beragam kesenian yang khas seperti Karawitan, Wayang Kulit, Jam Janeng, Kuda Lumping dan Mentiet. Budaya gotong royong dan tolong menolong masih begitu erat di berbagai daerah. Aspek budaya ini dinilai merupakan modal dasar sekaligus kearifan lokal yang sangat penting dalam pengembangan pembangunan ke depan.¹⁰⁰

Sektor pertanian merupakan kontributor terbesar dalam total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 37,15%, disusul sektor industri, perdagangan, kemudian pariwisata.¹⁰¹ Industri yang berkembang lebih banyak berupa industri rumah tangga yang dinilai belum cukup signifikan untuk meningkatkan pendapatan perkapita.

2. Sejarah dan Perkembangan Batik Kebumen

Keberadaan batik tradisional Kebumen, menurut runutan sejarah ternyata tidak diketahui dengan jelas. Menurut salah satu literatur, pembatikan di Kebumen dikenal sekitar awal abad ke-XIX yang dibawa oleh pendatang-pendatang dari Yogya dalam rangka dakwah

⁹⁹ Aris Saharjo, dkk. 1999, *Rusuh di Kebumen 7 September 1998*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta. Hlm: 3.

¹⁰⁰ *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025*. Lampiran. Hlm: 37.

¹⁰¹ *Ibid*. Hlm: 44.

Islam antara lain yang dikenal ialah Penghulu Nusjaf. Beliau inilah yang mengembangkan batik di Kebumen dan tempat pertama menetap ialah sebelah Timur Kali Lukolo sekarang dan juga ada peninggalan masjid atas usaha beliau.¹⁰²

Mengenai kepastian sejarah tersebut, masih perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Karena ternyata para perajin batik sendiri yang sudah bergelut dengan batik sejak lama, tidak begitu mengerti tentang asal usul keberadaan batik Kebumen. H. Chamami Abdurrahman yang mengaku sudah membatik sejak tahun 1959 yang sekaligus sebagai ketua kelompok batik Lawet Sakti, mengaku tidak mengetahui bagaimana sejarah kedatangan batik Kebumen. Menurutny batik Kebumen telah lama ada dan diajarkan secara turun temurun.

Sementara menurut Wahyuni, ketua Kelompok Batik Mawar, menyatakan bahwa batik Kebumen ada pada mulanya dari daerah Tanuraksan. Sebuah daerah persinggungan sungai Luk Ulo dan jalan raya. Setelah itu baru menyebar ke daerah Jemur Pejagoan dan daerah-daerah sekitarnya. Namun mengenai siapa yang paling mula melakukan usaha batik, Wahyuni mengaku tidak tahu.

Lain lagi menurut Teguh, ketua Kelompok Batik Sinjang Mulya, dia menyatakan bahwa batik Kebumen sebenarnya adalah bawaan dari kerajaan Mataram di Yogyakarta dan Solo. Namun bagaimana

¹⁰² <http://batikKebumen.blogdetik.com/index.php/perihal/>. Diunduh pada tanggal 7 Juni 2010. Pukul 08.00 WIB.

pastinya, dia juga mengaku tidak begitu mengerti. Di tengah ketidakjelasan sejarah batik Kebumen ini, ternyata Pemerintah Kabupaten Kebumen sendiri tidak begitu mempersoalkan. Ketika di konfirmasi ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, mereka juga tidak memiliki keterangan terkait keberadaan batik Kebumen dari sejarah keberadaannya.

Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa Batik Tradisional Kebumen tidak diketahui awal mula keberadaannya dengan jelas. Namun menurut pengakuan para perajin batik, bahwa batik Kebumen telah lama dan mentradisi tidak ada yang membantah. Meski secara sejarah batik Kebumen mengalami keterputusan, namun dalam eksistensi kekinian batik Kebumen sangat dapat dirasakan. Setidaknya batik telah menyebar ke empat kecamatan, yaitu Alian, Kebumen Pejagoan dan Buluspesantren.

Jumlah perajian batik Kebumen dalam catatan Dinas Perindagkop Kebumen saat ini ternyata cukup banyak. Perajin batik tersebut meliputi perajian batik tulis, cap maupun printing. Selain itu ada banyak kelompok batik yang dibentuk untuk mewadahi kreatifitas para perajin dalam suatu desa atau wilayah. Dengan sederhana dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Table. 2. Jumlah Perajin Batik Kebumen

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Batik	Jumlah Perajin	Keterangan
1.	Alian	Seliling	Kelompok Batik Tulis Sinjang Mulia	41 Perajin	Batik Tulis
			Kelompok Batik Tulis Mekar Sari	38 Perajin	Batik Tulis
		Kambang Sari		14 Perajin	Batik Tulis
2.	Kebumen	Gemeksekti	Kelompok Batik Lawet Sakti	178 Perajin	Batik Tulis, Cap dan Printing
3.	Buluspesantren	Tanjungsari		22 Perajin	Batik Tulis
4.	Pejagoan	Jemur	Kelompok Batik Tulis Kenanga	51 Perajin	Batik Tulis
			Kelompok Batik Tulis Mawar	35 Perajin	Batik Tulis
Jumlah total			5 Kelompok Batik	379 Perajin	

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Kebumen 2009.

3. Ciri Khas Corak Batik Kebumen

Jika menilik letak geografis wilayah Kabupaten Kebumen, dan juga dari ketidakjelasan sejarah keberadaan batik Kebumen sendiri, maka sangat wajar jika dalam implementasi nyata pada motif-motif yang ada, batik Kebumen terkesan unik. Teguh Budiyo menyatakan bahwa batik Kebumen merupakan bawaan model dari kerajaan di Solo dan Yogyakarta, karena menurutnya, orang-orang sebelum dirinya telah belajar batik dari dua kota tersebut sebelum akhirnya kembali ke Kebumen dan mengembangkan Batik di daerahnya sendiri. Artinya Teguh hendak menegaskan bahwa motif batik Kebumen lebih cenderung bercorak pedalaman yang mengindikasikan pada model-model batik keraton. Namun dia juga mengakui bahwa pada perkembangannya, beberapa motif warna cerah *ala* pesisiran mulai disukai para pembeli.

Mengenai motif tradisional Kebumen, Teguh menyatakan paling tidak ada empat motif tradisional Kebumen yang dikenal secara turun temurun. Dia menyebutkan ada Jagatan Kebumen, Bang-bangan, Sirkit, dan Gringsing Kebumen. Dia bahkan menyatakan bahwa Gringsing Kebumen sangat unik dan merupakan batik tulis terhalus, bukan saja secara nasional, bahkan internasional.

Sementara menurut Wahyuni, ciri utama dari motif batik Kebumen adalah pada warnanya. Menurutnya, jika masalah corak bentuk atau gambar bisa saja dipersamakan dengan daerah-daerah lain seperti Banyumas, Pekalongan dan sebagainya, namun masalah warna, Kebumen memiliki ciri khusus yaitu pada beragamnya warna yang digunakan. Dalam satu kain batik bisa sampai 4 warna, sedang biasanya batik secara umum hanya memakai dua kombinasi warna saja. Warna khas yang digunakan di Kebumen menurutnya adalah warna biru tua, biru muda, hijau, dan hitam. Wahyuni dengan tegas menyatakan bahwa model pewarnaan seperti itu hanya dikenal di Kebumen, di daerah lain tidak ada. Dia menyebutnya sebagai warna klasik asli Kebumen.

Berkaitan dengan pengaruh motif batik yang berkembang di Kebumen, Wahyuni menilai kalau motif dasar atau baku model Kebumen memang tidak dikenal. Adanya motif-motif yang muncul di Kebumen itu bersifat baru atau kontemporer, hanya cara atau model pewarnaannya saja yang unik dilihat dari kombinasinya. Ketika

dipertanyakan tentang orisinalitas, dia mengaku tidak terpengaruh dari motif luar, beberapa motif yang dia hasilkan berasal dari pemikirannya sendiri yang terinspirasi oleh alam sekitarnya.

Lain halnya dengan Perajin batik H Chamami yang mengaku batik sebagai bagian dari hobinya, baginya, motif batik sekarang ini sangat terbuka sebagaimana budaya, sehingga sangat sulit dibatasi sumber dan jenisnya. Oleh karena itulah, beliau menyatakan bahwa sekarang tidak ada dikenal motif khas Kebumen, karena motif corak batik yang sekarang ada dan berkembang adalah mengikuti selera pasar. Tidak ada motif atau corak khas Kebumen yang dipertahankan hanya karena itu motif dasar Kebumen. Jika suatu motif sudah tidak disukai atau tidak laku, maka harus segera membuat inovasi baru menciptakan motif-motif yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Namun, jika dilihat dari pewarnaan, H Chamami mengakui bahwa batik Kebumen memang lebih cenderung memakai warna-warna muda dan kombinasinya. Baginya, motif itu sangat tergantung pada kecerdasan perajin untuk membaca selera pasar. Sehingga tidak semestinya dilakukan pembakuan motif untuk dipertahankan, kecuali pasar menghendakinya.

Berdasarkan pada keterangan dari beberapa sumber yang terkait, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa pada dasarnya motif batik Kebumen lebih bercirikan ke model pesisir, mengingat jenis warna yang digunakan lebih cenderung pada warna muda. Namun

karena lokasi daerah batik yang berada di lereng bukit dan dekatnya dengan dunia pantai, maka ada percampuran atau kombinasi secara alami dalam kondisi geografisnya, antara dunia pesisir dan dunia pegunungan. Motif yang berkembang kemudian lebih banyak bernuansa flora dan fauna, dedaunan, bunga, hewan dan unggas, serta ikan.

Mengenai motif tradisional yang bersifat turun temurun, ternyata tidak ada kesepahaman diantara para perajin sendiri. Pemerintah Kabupaten Kebumen sendiri tidak pernah memberikan semacam justifikasi atas suatu motif sebagai motif batik tradisional Kebumen. Beberapa motif batik Kebumen yang saat ini telah terdaftar di Ditjen HKI merupakan motif-motif yang diciptakan oleh para perajin Kebumen, bukan motif tradisional yang telah ada sejak masa lalu dan diajarkan secara turun temurun. Sementara ini, perbedaan yang mencolok antara batik Kebumen dan batik luar adalah pada hal pewarnaan saja. Wahyuni berani memberikan jaminan bahwa model kombinasi warna klasik asli Kebumen, belum ada di daerah lain, karena sangat khas dan tua.

Dengan demikian, corak dasar batik Kebumen yang membedakan dengan batik-batik di luar adalah pada model pewarnaan yang unik yang belum bisa ditiru oleh perajin batik di luar daerah. Sedangkan mengenai gambar pada motif Kebumen secara keseluruhan bersifat baru dan lebih banyak terinspirasi dari gambaran alam, baik flora,

fauna, maupun arsitektur. Selera pasar menjadi standar utama, namun kekhasan warna tetap menjadi perhatian. secara tegas ciri khas batik Kebumen dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Motif-motifnya bernuansa alam, baik flora seperti dedaunan dan bunga, fauna, seperti burung-burungan, baik daerah bebukitan maupun kehidupan pantai seperti ikan.
- b. Warna yang digunakan lebih banyak bersifat terang dan kombinasinya antara biru muda, biru tua, hijau, hitam serta merah.
- c. Motif yang banyak dijumpai antara lain Jagatan Kebumen, Gringsing, sirkit, dan bang-bangan.

Berikut sebuah contoh dari motif batik tulis Kebumen yang cukup khas, yaitu motif Jagatan Kebumen dan Kembang Mlati.



MOTIF JAGATAN KEBUMEN



MOTIF : KEMBANG MELATI

Bagi beberapa perajin batik Kebumen, batik merupakan salah satu jalan hidupnya. Artinya mereka membatik dengan murni motivasi seni dan hobi bukan sekedar motif ekonomi. Bagi para perajin batik Kebumen, batik bukan lagi sebuah kesenian yang eksklusif dan terikat dengan budaya keraton lagi sebagaimana sejarah batik pada masa lampau. Batik dengan beragam motif memiliki makna khusus

tersendiri, baik budaya maupun spiritual. Kadang motif batik bermakna doa, dan kedudukan sosial, atau prosesi budaya yang tengah dijalankan, atau bahkan hanya sebatas seni artistik semata.

Motif-motif batik yang berkembang di Kebumen lebih pada nilai seni artistik. Artinya nilai batik dilihat dari keindahan dan kerumitan cara dan hasil prosesnya. Bukan pada nilai budaya yang melatarbelakanginya. Dari beberapa perajin yang berhasil ditemui, mereka mengaku bahwa motif-motif baru yang mereka hasilkan murni berasal dari pengamatan indra penglihatan, seperti alam, tumbuh-tumbuhan, hewan dan suasana. Tidak ada yang menggambarkan abstraksi makna, seperti motif yang bermakna sikap dan nilai-nilai moral atau harapan-harapan. Semua disandarkan pada objek nyata yang terlihat dan terasa. Bahkan ketika mereka dimintai keterangan mengenai arti dari beberapa jenis motif yang telah mereka hasilkan, perajin sendiri kurang begitu mengerti, semuanya hanya berdasarkan pengamatan pada alam sekitar. Namun ada juga motif Jagatan Kebumen yang menggambarkan keanekaragaman budaya etnis dan kekayaan alam Kebumen. Motif batik tersebut berusaha merangkum beberapa gambaran dari pantai, karang, burung, dan tumbuh-tumbuhan. Motif batik yang berkembang lebih banyak disandarkan pada esensi artistik gambar yang berusaha menggambarkan keanekaragaman alam dan budaya dalam selembar kain.

Menurut Koentjaraningrat, kesenian tradisional merupakan bagian dari ekspresi kebudayaan tradisional adalah cermin budaya masyarakatnya.¹⁰³ Lebih jauh Walter Abell mengemukakan teorinya bahwa suatu tipe imajeri merupakan penjelmaan dari kategori sosial di bawahnya. Artinya, kompleksitas kejiwaan yang terlibat dalam pembentukan imajeri sangat terpengaruh pada mentalitas kelas atau sistem ekonomi yang berlangsung.¹⁰⁴ Berdasarkan kedua pandangan tersebut, maka dapat ditarik sebuah benang merah berkaitan dengan jenis motif batik Kebumen yang banyak berkembang dengan kondisi sosial masyarakat Kebumen secara umum. Dari kedua teori tersebut maka dapat dirumuskan bahwa motif batik Kebumen merupakan hasil manifestasi para perajin atas kondisi sosial masyarakat pada umumnya, dan jika dibalik, kondisi sosial masyarakat Kebumen pada umumnya menginspirasi kemunculan motif-motif batik Kebumen, baik di sadari atau tidak oleh para perajin sendiri.

Dalam sebuah penelitian tentang kerusuhan 1998 yang dilakukan oleh lembaga ISAI (Institut Studi Arus Informasi), kenyataan bahwa Kebumen merupakan kota statis dan lamban berkembang sehingga tertinggal secara ekonomi maupun pendidikan dan budayanya dari

¹⁰³ Koentjaraningrat, 2000, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 8. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm: 380.

¹⁰⁴ Kuntowijoyo, 2006, *Budaya dan Masyarakat*, edisi paripurna, cet. Pertama. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta. Hlm: 5.

kota-kota sekitarnya terpapar nyata.¹⁰⁵ Pada pasca reformasi perkembangannya pun tidak terlalu signifikan, sehingga sampai saat ini masih menempati daerah termiskin ketiga setelah Grobogan dan Brebes.¹⁰⁶ Berdasarkan gambaran tersebut sangat nyata kebersahajaan hidup dari masyarakat Kebumen. Ketergantungan mereka akan alam ditunjukkan dengan sedikitnya industri yang berkembang, dan juga kenyataan bahwa sektor pertanian dan eksplorasi hasil alam seperti sarang burung walet. Pariwisata yang kemudian berkembang juga lebih banyak pada objek-objek wisata alam.

Dari pemaparan di atas, maka dapat diperoleh sebuah simpulan makna dari motif batik Kebumen yang kebanyakan menggambarkan alam, yaitu menggambarkan bahwa masyarakat Kebumen memiliki hubungan yang erat dengan alam, sangat menghargai dan mampu hidup berdampingan dengan saling memberi penghidupan dan kelestarian. Dengan kata lain, motif batik Kebumen dalam bentuk simboliknya adalah sangat ekologis.

Sementara itu, busana batik dalam masyarakat Kebumen secara umum masih memiliki tempat khusus. Tidak sembarang acara orang akan memakai batik. Batik secara umum digunakan oleh orang pada waktu acara pesat pernikahan atau acara keluarga. Terutama untuk

¹⁰⁵ Aris Saharjo, dkk. 1999, *Rusuh di Kebumen 7 September 1998*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta. Hlm: 1-8.

¹⁰⁶ *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025*. Lampiran. Hlm: 97.

acara pernikahan, batik menjadi busana utama yang digunakan untuk menghadirinya.

Motif yang dipilih oleh masyarakat secara umum di Kebumen dalam berbagai acara, tidak merujuk pada satu motif yang dikhususkan. Mereka memilih menggunakan batik dengan pertimbangan artistik motif semata. Sementara bagi kalangan tertentu, seperti para pejabat dan kalangan elit di Kabupaten Kebumen, juga tidak begitu memperhatikan kekhususan jenis motif yang mereka gunakan. Beberapa perajin yang berhasil di temui mengaku bahwa para pejabat itu sering hanya memesan satu jenis motif yang berbeda sama sekali dari motif-motif yang sudah ada dan tidak dibuat lagi kembarannya. Sehingga eksklusivitas motif batik bukan pada jenis motif tertentu, melainkan dari ketidak adaannya motif serupa di pasaran.

Berdasarkan gambaran di atas, maka untuk mendeskripsikan tentang batik Kebumen dapat diringkas sebagai berikut. Corak batik Kebumen bercirikan gambaran tentang alam sekitar berupa flora dan fauna dengan warna khas serba muda. Motif bunga dan daun dengan warna muda serta burung-burungan menjadi dominan. Pengaruh geografis dan kondisi alam yang bercampur antara daerah bukit dan pantai sangat kental dalam berbagai motif yang muncul. Kondisi sosial dan budaya yang beragam dilihat dari keragaman bentuk wilayahnya, juga menginspirasi perajin untuk menelurkan motif jagatan yang

khas. Adanya pengaruh budaya dari luar tidak tampak dari motif-motif Kebumen yang murni terinspirasi dari alam sekitarnya. Batik Kebumen yang berorientasi pada alam (ekologis), menggambarkan masyarakat Kebumen yang bersahaja dan sangat menghormati kehidupan yang ditawarkan oleh alam.

4. Perbandingan Dengan Corak Batik Daerah Lain

Salah satu cara yang paling mudah untuk menunjukkan titik pembeda dari sebuah batik dari sebuah daerah adalah dengan menyandingkannya dengan karya-karya batik dari daerah lain. Bagi seorang ahli batik, dengan melihat sekilas sebuah hasil kain batik, sudah dapat membedakan daerah mana yang menghasilkan batik tersebut.

Tentang Batik Kebumen, tidak terlacak pengaruh budaya dari mana, karena semua mengakui bahwa keberadaan motif-motif yang berkembang berasal dari pengaruh pengamatan indrawi para perajin sendiri. Batik Kebumen lebih berkembang sebagai murni seni batik yang menekankan pada nilai artistik bukan pada nilai makna dibalik sebuah gambar. Sehingga justru menunjukkan keunikannya sendiri. Batik Kebumen yang berorientasi pada alam atau ekologis, menggambarkan masyarakat Kebumen yang bersahaja dan sangat menghormati kehidupan yang ditawarkan oleh alam.

Batik Kebumen jelas berbeda dengan keberadaan batik-batik di daerah lain yang masing-masing memiliki latar dan pengaruh dari berbagai unsur, sehingga batik dapat berkembang sebagai sebuah simbol budaya, adat istiadat dan spiritual. Beberapa deskripsi tentang batik di beberapa wilayah dengan keunikannya dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Batik Pekalongan

Batik Pekalongan memiliki ciri-ciri berwujud gambar-gambar taburan bunga terang, ranting-ranting daun, burung-burung kecil yang berwarna mencolok, suasana kehidupan pertamanan yang riang gembira, dan sering disebut sebagai corak batik Encin. Batik Pekalongan banyak terpengaruh oleh budaya Cina yang dibawa oleh para pedagang cina perantauan.¹⁰⁷

b. Batik Cirebon

Batik Cirebon menjadi sangat unik karena selain merupakan daerah pantai yang begitu dekat dengan pengaruh kerajaan, juga adanya pendatang dari Cina yang memiliki ciri yang dinamis. Dari percampuran ini, muncul motif-motif simbolis yang tidak terlihat jelas dari gaya kesultanan maupun dari percampuran pengaruh budaya asing. Misal, gambar kuda terbang dengan sayap, singa darat yang menyeberangi laut, dan yang paling terkenal “supit urang”.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Anesia Aryunda Dofa, 1996. *Batik Indonesia*, PT. Golden Terayon Press, Jakarta.
Hlm: 27

¹⁰⁸ *Ibid.* Hlm: 25-26

c. Batik Solo

Corak batik Colo sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tata krama Keraton, sehingga mencerminkan corak-corak batik yang sopan, tenang dan lembut. Corak-corak batik Solo sering dihubungkan dengan lambang-lambang keagungan yang oleh beberapa kalangan masih sering dipercaya sebagai “barang” yang memiliki kekuatan magis.¹⁰⁹

d. Batik Yogyakarta

Pengaruh kekuasaan kerajaan sangat terasa pada batik Yogyakarta. Kadang sebuah motif dijadikan alat politik kerajaan. Motif batik Yogyakarta mencerminkan suasana kejiwaan masyarakat yang terus berkembang. Dahulu ketika masih kuat kepercayaan adanya kekuasaan berasal dari kekuatan magis, motif berupa matahari, laut kidul, gunung berapi dan sebagainya mendominasi. Satu ciri lagi, motif Yogyakarta berciri padat, seakan-akan tidak memberi kesempatan hadirnya ruang kosong pada lembaran desainnya yang kemudian ditempatkan *isen-isen* pada tiap titik yang luang tersebut. Hal ini mencerminkan begitu eratnya kehidupan sosial komunal bagi masyarakat Yogyakarta. Corak yang sangat terkenal dari Yogyakarta adalah Kawung dan Parang Rusak Barong.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.* Hlm: 30

¹¹⁰ *Ibid.* Hlm: 31-33.

e. Batik Madura

Batik Madura menunjukkan corak yang kontras. Berkembangnya tradisi keraton di Madura telah mengajarkan masyarakat pembuat batik untuk lebih bersikap konservatif, dan sangat diilhami oleh keadaan alamnya yang keras. Pandangan keluar untuk meraih suasana yang lebih jauh ke alam metafisik telah mengilhami corak-corak batik Madura yang mempunyai *greget* lebih filosofis.¹¹¹

5. Potensi Ekonomi Industri Batik Kebumen

Berdasarkan data dari Disperindagkop Kabupaten Kebumen, selain industri batik, ada beberapa industri yang potensial seperti industri genteng, kerajinan tangan, dan juga beberapa industri makanan, seperti lanting, sale pisang dan lain-lain.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kebumen, industri batik ternyata tidak menjadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen lebih memfokuskan agrobisnis sebagai program utama. Hal ini sesuai dengan visi Pemerintah sendiri yaitu “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”.¹¹² Hal ini sangat wajar mengingat potensi ekonomi dari sektor agrobisnis sangat besar, bahkan masih menjadi penyumbang terbesar pada pendapatan daerah.

¹¹¹ *Ibid.* Hlm: 34.

¹¹² *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.* Lampiran. Hlm: 111.

Di antara industri-industri yang berkembang di Kebumen, industri batik belum bisa dikatakan menonjol. Berdasarkan data resmi dari pemerintah Kabupaten Kebumen, hanya satu industri batik yang terdaftar memiliki izin usaha, yaitu Paguyuban Batik Lawet Sakti yang memproduksi batik tulis dan cap. Industri Batik yang beralamat di desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen ini mempekerjakan 13 tenaga kerja dengan omset hasil kurang lebih Rp. 40.000.000,- pertahun. Perajin batik selebihnya adalah bersifat industri rumahan dan kebanyakan memproduksi batik tulis. Padahal perajin batik tulis tercatat mencapai lebih dari 300 perajin. Bagi pemerintah sendiri keberadaan mereka tidak memberikan masukan pendapatan berupa pajak maupun retribusi, sehingga justru ada yang menilai bahwa keberadaan mereka merugikan pemerintah sendiri.¹¹³

Meskipun tidak atau belum menjadi salah satu industri yang murcusuar, namun menurut para prajin mampu menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam satu bulan, satu orang prajin bisa menyelesaikan 1-2 lembar batik tulis halus, dengan nilai jual 100-600 ribu perlembar. Biasanya jika ada pesanan dalam jumlah yang massal, mereka bekerja secara berkelompok sehingga satu bulan bisa menghasilkan 30-50 lembar.

¹¹³ Meski dinilai tidak memberikan keuntungan finansial melalui perolehan pajak, pemerintah berjanji untuk tetap memberikan proteksi dan usaha pengembangan. Lihat <http://www.kebumenkab.go.id/index.php?name=News&file=article&sid=965&theme=Printer>

Pemasaran produk batik Kebumen juga sudah cukup luas. Selain di pasar tradisional dan beberapa toko batik yang tersebar di kota kebumen, batik Kebumen sering diikuti dalam pameran-pameran produk baik regional maupun nasional. Bahkan beberapa kali Wahyuni menerima pesanan batik dari luar negeri, seperti Belgia dan Rusia. Sementara Teguh rajin menitipkan hasil batiknya kepada tengkulak batik nasional maupun internasional. Dia juga sering mengikuti hasil karyanya pada acara lomba maupun pameran yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Pemasaran batik Kebumen juga mulai dirintis melalui media maya internet.

Meski pemasaran batik Kebumen telah melampaui batas negara, namun menurut para perajin, konsumsi batik Kebumen tetap lebih besar adalah warga lokal. Adanya pesanan dari luar kota kadang karena mereka juga adalah warga asli Kebumen yang kebetulan berdomisili di tanah rantau.

Berdasarkan gambaran di atas, batik Kebumen secara ekonomi sangat signifikan, terutama bagi para perajin sendiri. Meski nilai ekonomisnya tidak signifikan namun berdampak pada kualitas kesejahteraan keluarga, karena bersifat kegiatan tambahan dan bersiat sambilan. Sedangkan bagi yang benar-benar terjun ke dunia batik seperti Wahyuni dan Teguh, mengatakan usaha batik cukup menjanjikan.

Secara sederhana potensi ekonomi dari industri batik Kebumen dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Potensi Ekonomi Batik Kebumen

No.	Aspek Ekonomi	Potensi	Keterangan
1.	Produsen	379 Perajin	Perajin Batik Tulis, Cap, dan Printing
2.	Omset	40 Juta/tahun 1-2 Lembar/bulan 30-50 Lembar/bulan	100-600 ribu/lembar
3.	Pemasaran	Lokal, regional, Nasional dan Internasional	Melalui pasar konvensional, pameran, dan web.

Sumber: hasil wawancara dan Deperindagkop Kab. Kebumen.

Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa meskipun batik saat ini belum menjadi satu jenis industri yang signifikan dan penting bagi perekonomian masyarakat Kebumen, namun industri batik memiliki potensi ekonomi yang besar, apalagi jika nantinya mampu dikembangkan dan bisa bersaing dengan batik-batik dari luar wilayah.

F. Perlindungan Motif Batik Kebumen Sebagai Sebuah Karya Cipta Intelektual Tradisional Berdasarkan UU Hak Cipta

Sebagai sebuah karya intelektual, batik menjadi salah satu objek perlindungan dari rezim HKI terutama perlindungan atas hak cipta. Dalam sub bab ini akan dideskripsikan sekaligus dibahas mengenai konsep perlindungan atas motif batik Kebumen menurut UU Hak Cipta, maupun perlindungan pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat.

1. Perlindungan Motif Batik Kebumen Menurut UU Hak Cipta Indonesia

Hak cipta sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa batik memiliki dua dimensi, yaitu batik sebagai sebuah proses dan batik sebagai sebuah hasil atau kain batik itu sendiri. Dengan demikian, dimensi batik sebagai sebuah hasil karya yang menjadi objek perlindungan hak cipta.

Motif batik sebagai bentuk kain yang dihasilkan dari proses membatik dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu motif tradisional dan motif kontemporer. Untuk mempermudah pembahasan mengenai perlindungan hukum, penulis akan mendeskripsikan sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa sistem perlindungan hukum terdiri atas beberapa aspek, yaitu: Subjek Perlindungan, Objek Hukum Perlindungan, Perbuatan Hukum Perlindungan, Jangka Waktu Perlindungan, dan Tindakan Hukum Perlindungan.¹¹⁴

¹¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm: 153-160

a. Perlindungan Atas Motif Tradisional Batik Kebumen

Motif tradisional batik Kebumen sebagaimana dijelaskan pada sub bab eksistensi batik Kebumen di atas, jelas bahwa ada beberapa motif tradisional batik Kebumen seperti motif jagatan, gringsing Kebumen, sirkit dan bang-bangan. Motif motif tersebut keberadaannya sudah sangat lama dan tidak lagi diketahui siapa yang pertama kali menciptakannya. Atas motif-motif tersebut, UU Hak Cipta memiliki konsep perlindungan yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

1) Subjek Perlindungan

Subjek perlindungan yang dimaksud adalah pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum. Dalam pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta, menyatakan bahwa hasil karya tradisional bangsa Indonesia yang tidak diketahui penciptanya karena lamanya masa penciptaan, hak cipta dipegang oleh negara. Artinya, pemegang hak sebagai subjek perlindungan adalah negara. Meski secara redaksional telah menunjuk subjek negara, namun dalam pelaksanaan teknis masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai aktor negara yang mana yang akan bertindak sebagai pemegang hak cipta tradisional ini. Sampai saat ini aturan pelaksana yang diamanatkan belum juga disusun.

Subjek perlindungan yang lain adalah aparat penegak hukum dan pejabat pendaftaran. Aparat penegak hukum ini juga bagian dari fungsi besar negara. Sementara pejabat pendaftaran adalah Ditjen

HKI yang juga merupakan salah satu aktor negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek perlindungan sebagai pemegang sekaligus penegak hukum dan pejabat pendaftaran dalam perlindungan hukum hak cipta tradisional ini adalah negara.

Subjek perlindungan yang lain adalah pelanggar hukum. Penjelasan Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Berdasarkan keterangan ini maka jelas siapa subjek yang disebut sebagai pelanggar hukum, yaitu seseorang atau semua pihak selain negara RI yang melakukan tindakan monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta tradisional. Subek ini bisa saja seorang warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

2) Objek Hukum Perlindungan

Ketentuan pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan pengertian operasional mengenai folklor atau seni budaya tradisional masyarakat. Namun dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan

bahwa Folklor diartikan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran -ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Dengan pengertian ini maka jelas bahwa hasil karya motif tradisional batik Kebumen merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat yang secara turun temurun diajarkan. Sehingga secara operasional, motif tradisional batik Kebumen merupakan salah satu objek yang dilindungi dengan UU Hak Cipta tersebut. Ada beberapa motif tradisional yang lama ada dan dikenal di Kebumen, yaitu, Gringsing Kebumen, Jagatan Kebumen, Sirkut, dan Bang-Bangan. Keempat motif tersebut sudah lama dikenal dan kemudian berkembang dalam bentuk motif-motif khusus yang bersifat individu.

Perlu dipertegas kembali bahwa yang mejadi objek perlindungan Pasal 10 ayat (2) ini adalah motif dasar yang berkembang secara tradisonal, bukan pada karya individu yang bersifat kontemporer.

Misalkan motif Jagatan Kebumen yang menggambarkan keanekaragaman budaya masyarakat dan kekayaan alam Kebumen, oleh seorang perajin menggambar motif ini dengan memadukan beberapa jenis gambar seperti bunga, dedaunan, gunung, karang, laut, burung, ikan, sawah dan lain-lain. Sementara ada perajin lain yang membuat gambar motif jagatan Kebumen ini dengan memadukan hasil kebun, hasil hutan, hasil laut dan sebagainya, yang tentu saja secara gambar berbeda dengan motif perajinan pertama. Maka yang akan mendapat perlindungan sebagai karya tradisional adalah motif jagatan Kebumen dalam pengertian awal, yaitu penggambaran keanekaragaman budaya, masyarakat dan alam Kebumen. Sedangkan motif-motif turunan yang dihasilkan para perajin, menjadi karya individu dan mendapat perlindungan sebagai sebuah karya intelektual yang bersifat individual.

Dengan adanya perlindungan ini, maka semua perajin dapat mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan daya imajinasinya dalam menggambarkan keanekaragaman budaya masyarakat dan alam Kebumen. Negara sebagai pemegang hak atas motif-motif tradisional, harus melakukan proteksi dari pembajakan pihak-pihak luar negeri. Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, mestinya pemerintah daerah yang memiliki kepentingan langsung, juga harus melakukan upaya-upaya pelestarian agar karya-karya tradisional tersebut tetap lestari, dan jika mungkin menjadi satu ciri khusus bagi

batik Kebumen untuk dipersaingkan dengan motif-motif batik di luar daerah.

3) Perbuatan Hukum Perlindungan

Sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU Hak Cipta, hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum hak cipta itu bersifat deklaratif. Artinya hak itu timbul sejak suatu karya cipta itu ada.

Berkaitan dengan hak negara atas karya cipta tradisional, maka yang menjadi persoalan adalah kapan suatu objek dikatakan sebagai sebuah karya tradisional yang hak ciptanya dipegang oleh negara? Hal ini penting dipertanyakan karena sampai saat ini belum ada kajian secara komprehensif yang dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri untuk mengidentifikasi karya tradisional apa saja yang menjadi objek hak cipta yang mereka kuasai.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa hak cipta atas karya tradisional itu melekat bersama dengan penetapan UU Hak Cipta dan berlaku surut. Artinya, meski hak cipta karya tradisional baru diatur

pada UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002,¹¹⁵ namun hak cipta semua karya tradisional dipegang negara. Dengan demikian persoalannya kemudian adalah identifikasi objek karya tradisional itu sendiri.

Salah satu kasus yang bisa menggambarkan bentuk perlindungan motif tradisional batik adalah kasus motif lereng kembang cirebonan, yang sampai diperkarakan sampai pengadilan.¹¹⁶ Pada mulanya, H. Ibnu Hajar, seorang produsen batik dituduh telah menjiplak batik buatan CV Gunung Jati di Trusmi, Cirebon, milik H. Abed Menda, yang telah didaftarkan di Direktorat Paten dan Hak Cipta. Dalam proses persidangan, Ibnu berkilah bahwa motif tersebut adalah motif tradisional warisan nenek moyang, dan menyalahkan Ditjen HKI sebagai biang masalah karena telah menerbitkan sertifikat hak cipta atas motif batik tradisional.

Sebaliknya Abed beranggapan bahwa batiknya kontemporer, walau ciri khas lereng tetap dipertahankan. Sebab, kalau tanpa lereng, bukan lagi batik. Hanya saja, lereng tradisional umumnya lurus-lurus atau lereng rusak. Dia mengaku telah mengubahnya menjadi meliuk-liuk, dan ujungnya lancip, sehingga tidak lagi bersifat tradisional. Tombak-tombak lereng yang meliuk-liuk itu menurut Abed merupakan lambang pendobrak kebodohan. Abed memunculkan gunung, yang pada batik tradisional tak dikenal. Gunungan itu merupakan identitas

¹¹⁵ Afrilliyana Purba, dkk. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm: 103.

¹¹⁶ Kasus ini unik karena terkait erat dengan perlindungan motif tradisional. Lih. majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1990/09/01/HK/mbm.19900901.HK19380.id.html diunduh hari Senin, 14 Juni 2010.

khas Cirebonan yang berarti bercita-cita tinggi. Selain itu ada kembang patron. Gambar itu dimaksudkan sebagai lambang keharuman abadi citra guru.

Saksi ahli dalam perkara tersebut antara lain Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik Departemen Perindustrian, Nyonya Ir. T.T. Suryanto, di persidangan dengan tegas mengatakan motif batik buatan Abed adalah motif batik tradisional yang sudah dikembangkan, bukan lagi motif tradisional murni. Sedang batik kontemporer adalah produk batik yang sama sekali tak mengandung ornamen tradisional.

Saksi ahli yang lain, Subekti Hadikusumo, yang mahir mengenai batik Cirebonan, punya pendapat lain lagi. Menurut Subekti, batik tradisional ciptaan nenek moyang itu tak pernah tumbuh dan beberapa jenis malah sudah menghilang. Soal hak cipta, ia mengumpamakan aransemen irama tarling (kesenian khas Cirebon). Dia menyatakan bahwa iramanya masih tarling tapi aransementnya sudah disesuaikan dengan selera masa kini. Jadi, pada irama tarling, siapa pun tak berhak mengklaim sebagai penciptanya. Tapi si pembuat aransemen berhak mengaku sebagai penciptanya.

Namun pada akhirnya Ibnu Hajar memenangkan perkara tersebut.¹¹⁷ Di persidangan, majelis menilai tuduhan jaksa tak terbukti.

Karya Abed yang disebut sebagai batik kontemporer, dinilai masih

117

termasuk jenis batik tradisional yang sudah menjadi milik umum (*public domain*). Putusan ini diperkuat keterangan saksi ahli, yaitu Ir. Ny. T. Suryanto, dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik Departemen Perindustrian, maupun Subekti Hadikusumo, ahli batik Cirebonan, sependapat, motif batik buatan Abed tak lebih dari batik tradisional yang dikembangkan. Abed menggabungkan unsur-unsur batik tradisional dari Yogya, Solo, dan Cirebon.

Berdasarkan pada kasus di atas, maka jelas bahwa perlindungan atas motif batik tradisional, bersifat ke dalam dan ke luar. Ke dalam artinya motif tradisional tersebut dilindungi dari tindakan monopoli seseorang, karena motif tersebut merupakan milik umum masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Ignatius Haryanto yang menyatakan bahwa kebudayaan tradisional perlu dilindungi bukan untuk mencari keuntungan komersial, tetapi agar masyarakat setempat tetap bisa memanfaatkan dan mengembangkannya.¹¹⁸

Perlindungan ke luar, artinya motif tersebut dilindungi dari peniruan yang dilakukan oleh warga negara asing yang hendak menggunakan motif tersebut. Mereka harus memperoleh ijin dan memberikan timbal balik kepada masyarakat Indonesia jika ingin memanfaatkan motif batik tersebut. Mengenai mekanisme lebih rinci, sampai saat ini

¹¹⁸ Ignatius Haryanto, Dilema Kebudayaan Tradisional di Era HKI dalam *Majalah Kombinasi*, Edisi 10 Agustus 2005. Dapat dibaca dalam alamat situs: <http://www.kombinasi.net/?lang=id&rid=19&cid=83&sid=0&xcode=172&id=298>. Diunduh pada tanggal 11 Mei 2010.

memang belum diatur dengan jelas, mengingat peraturan pemerintah yang dimanakan UU Hak Cipta belum juga terbit.

4) Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan atas sebuah motif tradisional Kebumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1), perlindungan yang diberikan tanpa batas waktu. Artinya motif tersebut telah menjadi *public domain* seluruh masyarakat Indonesia, dan siapapun warga negara Indonesia bebas untuk memanfaatkannya secara ekonomi. Sedangkan perlindungan yang diberikan berupa larangan bagi warga negara asing yang hendak memanfaatkan karya tersebut, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi yang terkait dan ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini, belum diatur secara rinci, karena dalam undang-undang Hak Cipta mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, sedangkan sampai saat ini PP tersebut belum juga terbit. Perlindungan juga diberikan untuk menjaga suatu motif tradisional Kebumen, agar tidak diakui sebagai motif individu yang bisa dimonopoli, sehingga keberadaan motif tradisional sebagai *public domain* tetap terjaga.

5) Tindakan Hukum Perlindungan

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh negara sebagai subjek pemegang hak sekaligus penegak hukum atas berbagai bentuk pelanggaran atas hak cipta karya tradisional.

Sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa bentuk pelanggaran atas sebuah karya cipta tradisional, yaitu:

- a) Tindakan monopoli atas karya tradisional;
- b) Komersialisasi karya tradisional tanpa izin negara sebagai pemegang hak;
- c) Tindakan merusak karya tradisional.

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta, bahwa perlindungan karya cipta tradisional lebih berorientasi para perlindungan dari tindakan warga negara asing. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya tradisional yang dikuasai negara itu pada dasarnya juga milik masyarakat umum, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran ketika mereka melakukan tindakan komersialisasi atas karya tradisional tersebut.

Jika dirumut aturan dalam UU Hak Cipta, maka ada beberapa tindakan yang mungkin dilakukan oleh negara melalui aktor-aktor pelaksananya atas tindakan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

- a) Tidak Menerbitkan Sertifikat Hak Cipta, atau Penghapusan.

Tindakan ini bisa dilakukan atas tindakan monopoli suatu karya cipta tradisional. Tindakan monopoli atas suatu karya cipta tradisional ini dapat dicegah dengan menolak permohonan pendaftaran hak cipta atas suatu karya tradisional. Jika suatu kasus telah masuk dalam persidangan, hakim bisa memutuskan bahwa pelaku tidak berhak untuk melakukan monopoli atas

suatu karya cipta tradisional, sebagaimana gambaran kasus di atas. Penghapusan juga bisa dilakukan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta.

b) Melakukan Gugatan Perdata

Tindakan ini bisa dilakukan oleh negara atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang tanpa izin telah melakukan monopoli atau komersialisasi atau bahkan perusakan atas suatu karya tradisional milik bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilakukan karena negara dalam sistem hukum ekonomi internasional termasuk sebagai salah satu subjek hukum.¹¹⁹ Namun dalam implementasinya hal ini sangat sulit dilakukan mengingat perbedaan sistem hukum, hubungan diplomatik, dan persolaan lain yang kadang menjadi pertimbangan pemerintah.

c) Menuntut Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Karya Tradisional

Tindakan ini dapat dilakukan atas tindakan perusakan suatu karya cipta tradisional. Hal ini diatur dalam pasal 24 maupun Pasal 55 terkait hak moral yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan tindakan merubah atau merusak suatu karya cipta.

¹¹⁹ dikenal adanya subjek hukum ekonomi internasional yang diklasifikasikan sebagai berikut: Negara, individu (termasuk juga badan hukum), organisasi ekonomi internasional, perusahaan transnasional, lembaga swadaya masyarakat atau Non Governmental Organization (NGO). Lihat N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Bayu Media Publishing, Malang. 47-59.

Namun mengingat karya cipta tradisional ini merupakan *public domain*, maka mestinya harus ditambah bahwa tindakan itu bersifat merusak dan merugikan masyarakat.

b. Perlindungan Atas Motif Kontemporer Batik Kebumen

1) Subjek Perlindungan

Dalam hal perlindungan motif kontemporer batik Kebumen, yang menjadi subjek perlindungannya adalah para pencipta motif batik tersebut. Perajin yang hanya menyelesaikan pesanan motif yang sudah digambarkan tidak menjadi pemilik hak cipta atas hasil karya batiknya. Hak cipta dalam kondisi tersebut berada pada pemesan yang telah menentukan bentuk motifnya. Berbeda ketika pemesan itu hanya memesan jenis motif batik tertentu dengan jenis motif yang ditentukan oleh perajin sendiri, maka hak cipta secara moral melekat pada perajin tersebut. Pemesan hanya memiliki batik secara materil. Ketika suatu motif dikerjakan bersama-sama, maka hak cipta atas motif batik tersebut juga dimiliki secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum pada Pasal 1 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

2) Objek Perlindungan

Hak cipta atas motif kontemporer batik Kebumen yang diciptakan secara individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (i), seni batik termasuk salah satu objek yang dilindungi hak cipta. Ada beberapa persyaratan untuk suatu objek agar bisa mendapat perlindungan hak cipta antara lain adalah keaslian karya. Dalam dunia kerajinan batik yang sangat sangat terbuka akan tindakan peniruan dan juga pengaruh motif-motif yang sudah berkembang, orisinalitas suatu motif menjadi penting. Hanya motif-motif kontemporer yang benar-benar asli dan baru lah yang akan memperoleh perlindungan.

3) Perbuatan Hukum Perlindungan

Perlindungan hak cipta secara otomatis timbul bersama terwujudnya hasil karya secara fisik. Hal ini dikarenakan secara prinsip hak cipta tidak melindungi ide melainkan karya yang nyata. Selain itu sistem perlindungan hak cipta bersifat deklaratif sehingga untuk mendapat hak dan perlindungan tidak harus dengan mendaftarkan. Pendaftaran hanya bersifat administratif dan antisipatif, yang nantinya bisa digunakan sebagai sebuah alat bukti yang sah untuk mempertahankan hak cipta atas karya intelektual yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (4) yang menyatakan bahwa pendaftaran bukan merupakan kewajiban. Lebih lanjut dalam Pasal 36 dinyatakan bahwa pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum

Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Untuk menentukan bentuk pelanggaran atas suatu karya cipta motif batik memerlukan ketelitian yang tinggi, mengingat suatu motif dapat saja diciptakan mirip atau hampir serupa dengan motif yang lain. Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran harus ada unsur itikad buruk. Hal ini karena dalam prinsipnya hak cipta memang tidak dilindungi dari keberadaan karya independen.¹²⁰ Sehingga dimungkinkan adanya dua karya cipta yang dalam perwujudannya sama dapat dimiliki oleh orang yang berlainan.

Dalam penjelasan Pasal 15 UU Hak Cipta, pelanggaran atas hak cipta sulit diidentifikasi secara kuantitatif. Sehingga pelanggaran lebih bisa dinilai secara kualitatif dengan pengambilan bagian yang substantif dari sebuah karya cipta. Dalam hal motif batik, ada disebut motif dasar dan isen-isen. Motif dasar merupakan bagian yang pokok dalam sebuah motif, sehingga ketika ditemukan persamaan dalam bagian tersebut, maka ada indikasi kuat telah terjadi pelanggaran hak cipta.

4) Jangka Waktu Perlindungan

Masa perlindungan atas karya cipta batik ini adalah sepanjang umur hidup pencipta sampai dengan lima puluh tahun setelah dia meninggal. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 29 ayat (1) UU Hak Cipta. Setelah melewati masa perlindungan, maka suatu motif batik itu

¹²⁰ Tim Lindsey dkk. 2005, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Cet. 4. Alumni, Bandung. Hlm: 122.

akan menjadi milik umum, dan siapa saja bisa menggunakannya. Hal ini merupakan bentuk kontrobusi nyata dari kreatifitas intelektual yang bersifat sosial. Sehingga hak cipta tidak hanya memperhatikan kepentingan individu namun juga kepentingan umum.

5) Tindakan Hukum Perlindungan

Pelanggaran atas hak cipta motif batik kontemporer yang dimiliki secara individual dapat dikenakan sanksi hukum. Palanggaran hak cipta motif kontemporer batik ini dapat berupa memperbanyak, mengumumkan tanpa izin pemilik hak. Selain itu, tindakan menampung dan memperjual belikan barang hasil pelanggaran juga merupakan pelanggaran atas hak cipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan juga Pasal 72 ayat (2) UU Hak Cipta. Pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, atau melaporkan tindak pelanggaran pidana atas motif batiknya kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Pengajuan gugatan ganti rugi tidak menghalangi pemerintah untuk melakukan tuntutan pidana atas pelaku pelanggaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 56 tentang pengajuan gugatan ganti rugi dan permohonan penyitaan. Mengenai kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan pidana diatur dalam Pasal 66, sedangkan masalah pembedanaan diatur pada pasal 72 UU Hak Cipta.

2. Perlindungan Motif Batik Kebumen Dalam Praktek

a. Efektivitas Hukum Hak Cipta

Pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam praktek dengan kata lain merupakan pembahasan mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat. Bagaimana suatu aturan hukum positif berlaku dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain:

- 1) Kaidah Hukum
- 2) Penegak Hukum
- 3) Sarana atau Fasilitas Penegakan Hukum
- 4) Warga Masyarakat sebagai Subjek Hukum¹²¹

Mengenai masalah kaidah hukum, dalam hal ini UU Hak Cipta, tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang tersebut lahir bukan dari rahim bangsa Indonesia, melainkan sebuah adopsi dari dunia internasional. Kondisi ini menyebabkan proses penyesuaian dan penerapan di lapangan menjadi sebuah masalah yang tidak mudah. Apalagi dengan sifat dari aturan hak cipta ini sendiri yang lebih pada perlindungan individu dibanding dengan perlindungan komunal. Sehingga dalam penerapannya seringkali bukan saja sulit dimengerti oleh masyarakat, bahkan sebagian pandangan tampak sangat bersebrangan.

Dalam kajian antropologi, kesenian merupakan cermin dari suatu kebudayaan manusianya. Kesenian tradisional sebagai bentuk

¹²¹ Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm: 94-97.

ekspresi kebudayaan tradisional merupakan ekspresi imajinatif yang diwujudkan dalam berbagai materi dengan hasil yang indah, menyenangkan dan sebagainya. Fungsi kesenian ini antara lain:

- 1) Mengetahui suatu bangsa bagaimana mengatur dunianya;
- 2) Sarana memahami pandangan dunia seseorang;
- 3) Mengetahui sejarah bangsa;
- 4) Menambah kenikmatan dalam kehidupan sehari-hari;
- 5) Menentukan norma-norma untuk berperilaku teratur (mitos);
- 6) Meneruskan adat istiadat kebiasaan dan nilai kebudayaan (verbal);
- 7) Menambah keterikatan dan solidaritas masyarakat yang bersangkutan.¹²²

Batik Sebagai sebuah produk kesenian dan budaya merupakan sesuatu yang sangat terbuka dan tidak akan terlepas dari keadaan saling mempengaruhi. Kesamaan atau bahkan proses asimilasi dan adopsi suatu budaya dari masyarakat satu ke masyarakat atau komunitas lain menjadi sesuatu yang lazim terjadi sebagai sebuah proses interaksi.

Hal tersebut di atas akhirnya membentuk sebuah frame berfikir dalam masyarakat bahwa suatu budaya tidak bisa dibatasi dalam kotak-kotak wilayah saja. Dengan demikian pandangan bahwa batik

¹²² Haviland dalam Slamet Subiyantoro, *Pemetaan Ekspresi Budaya Tradisional Se Solo Raya Sebagai Potensi Produk Daerah*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional PEMBERDAYAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) GUNA PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL, Surakarta, 24 April 2010. Hlm: 4.

dalam hal ini kekayaan motifnya tidak bisa diklaim untuk dikuasai secara individu. Batik adalah sebuah karya seni budaya yang sangat terbuka, sehingga ketika terjadi dalam prakteknya peristiwa pencontekan atau peniruan sudah lazim terjadi. Bahkan menurut H Chamami, sebuah ciptaan batik misalnya ketika akan dibajak, dapat diibaratkan sebagai baju yang hendak dipinjam kawan untuk menghadiri kondangan. Apakah kita akan mengizinkan atau kita akan menyewakan, sudah sewajarnya jika dengan saudara sendiri kita pasti akan meminjamkannya.¹²³

Pandangan atas karya motif batik di atas merupakan salah satu pandangan yang populer ada dalam lingkungan perajin batik Kebumen. Namun selain kelompok pandangan itu, ada pandangan lain yang mulai berkembang. Pandangan ini menilai bahwa peniruan atau memperbanyak tanpa ijin suatu karya dari penciptanya tidak boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan sebuah konsep teoritik dalam kesenian dan budaya bahwa secara konseptual kesenian dan budaya selalu berkaitan dengan beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai, pengetahuan dan keyakinan;
- 2) Kebutuhan primer, sekunder, budaya baik bagi pihak pengguna dan pencipta;
- 3) Sumber daya lingkungan alam-sosial-budaya berkaitan dengan jenis, sifat, kualitas dan kuantitas;

¹²³ Hasil wawancara dengan H. Chamami, Ketua Kelompok Batik Lawet Sakti, Gemek Sekti, Kebumen. 29 Mei 2010.

- 4) Pranata yang mampu memberikan perlindungan karya;
- 5) Berkaitan dengan sikap maupun perilaku individu (melalui pencipta, pemerhati, dan pengguna).¹²⁴

Salah satu perajin yang mendukung keberadaan perlindungan atas karya cipta adalah Wahyuni. Peniruan motif batik baginya sebenarnya tidak boleh. Namun dalam prakteknya, motif-motif yang telah dia buat dan telah beredar di pasar, dalam waktu tidak lama, sudah keluar karya bajakannya. Baginya motif memiliki nilai sendiri dan patut mendapat penghargaan. Namun karena dalam praktek upaya perlindungan motif batik tersebut sangat sulit, Wahyuni hanya pasrah. Hanya jika ada konsumen yang membeli putus batik beserta motifnya, dia bisa menjual dengan nilai lebih.¹²⁵

Selain Wahyuni, Ketua Kelompok Batik Sinjang Mulya, Teguh, juga memiliki pandangan yang serupa. Namun kesadarannya akan pentingnya perlindungan hak cipta bisa dikatakan terlambat. Sudah banyak motif yang ia ciptakan, bahkan sampai ratusan, namun tidak terpikirkan untuk mendokumentasikannya, apalagi mendaftarkannya. Ketika menyadari pentingnya perlindungan itu, dia rajin mengoleksi foto motif batik yang telah dia hasilkan. Sampai sekarang dia telah mendaftarkan motif ke Ditjen HKI sebanyak 16 motif dengan fasilitas

¹²⁴ Roehadi, dalam Slamet Subiyantoro, *Pemetaan Ekspresi Budaya Tradisional Se Solo Raya Sebagai Potensi Produk Daerah*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional PEMBERDAYAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) GUNA PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL, Surakarta, 24 April 2010. Hlm: 4.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Wahyuni, Ketua Kelompok Batik Tulis Mawar Kebumen, tanggal 29 Mei 2010.

dan pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Namun ternyata pengetahuan dan kesadarannya akan pentingnya perlindungan pun, tidak serta merta motif-motif yang diciptakannya terlindungi dari peniruan. Dia mengaku meski telah didaftarkan, motif-motifnya tetap banyak yang meniru. Melihat kondisi seperti ini, dia mengaku tidak bisa berbuat banyak. Karena jika mau memperkarakannya pun hanya akan merepotkan diri sendiri, belum lagi nanti ada biaya ini dan itu yang harus dia keluarkan untuk mengurusnya. Sehingga sampai saat ini dia hanya bisa memberikan proteksi sendiri atas karya-karyanya, jika ada perajin lain ingin meniru menggunakan motifnya, maka harus ada transaksi ekonomi yang menguntungkan, meski nilainya tidak terlalu besar, antara 25-50 ribu.

Gambaran kondisi perlindungan pada motif batik tersebut, menunjukkan bahwa meski secara kaidah hukum telah ditetapkan sebagai hukum yang berlaku dan memaksa, namun dalam prakteknya aparat penegak hukum menjadi kendala tersendiri. Aparat hukum dinilai tidak tanggap oleh para perajin yang sadar akan kepentingan atas hak cipta karyanya, untuk bisa membantu secara aktif dan efisien. Keluhan proses yang rumit dan berbelit-belit serta banyaknya biaya yang diawatirkan para perajin ketika mempermasalahkan perlindungan hukum atas karya mereka, menunjukkan sarana dan fasilitas penegakan hukum dalam hal ini alat pemerintah untuk bisa menyentuh pada masyarakat kecil masih kurang optimal.

Tidak adanya kasus laporan pembajakan motif batik Kebumen ternyata bukan saja berakar pada ketidaktahuan perajin motif batik akan pentingnya perlindungan, namun juga pada sikap hidup masyarakat Kebumen yang sangat komunal, sehingga keberadaan suatu karya seni batik yang muncul baru, secara otomatis dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Meskipun suatu motif telah didaftarkan sekalipun, dalam prakteknya motif-motif tersebut tidak mendapatkan proteksi apapun. Akhirnya perlindungan motif batik yang dilakukan oleh para perajin motif batik sangat bersifat individual. Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa pada tingkat masyarakat sebagai subjek hukum, tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini bisa dipahami karena memang keberadaan sistem hak cipta ini tidak lahir dari tradisi masyarakat sendiri.

Masyarakat merupakan rujukan yang utama (*the primacy*), bukan konsep, doktrin, atau sistem rasional dari hukum. Dengan kata lain, hukum selalu mengikuti pergerakan masyarakat.¹²⁶ Dengan demikian, sebuah tatanan hukum yang kemudian di formalkan merupakan kristalisasi dari budaya kehidupan dalam masyarakat. Namun dalam sistem masyarakat yang global saat ini, dimana hampir tidak ada batas antara masyarakat maju dan terbelakang, mengakibatkan adanya tuntutan penyeragaman atau paling tidak penyesuaian sistem hukum antar masyarakat tersebut. Masalah menjadi tampak ketika

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media, Malang. Hlm: 81.

sistem hukum dari masyarakat maju hendak diadopsi atau diterapkan dalam masyarakat berkembang atau bahkan terbelakang.¹²⁷ Disinilah barangkali bisa disebut, ada pencangkakan hukum, dan posisi hukum kemudian menjadi instrumen perubah dan pembentuk masyarakat baru (*tools of social engineering*).

Law as a tool of social engineering merupakan teori dari Roscoe Pound yang berkeyakinan bahwa hukum sebagai sebuah lembaga sosial merupakan produk intelektual ilmiah yang terencana dan sistematis, sehingga setiap kali dapat disempurnakan demi fungsionalitasnya sebagai instrumen perubah sosial.¹²⁸

Hazairin dalam hal ini tampak memiliki satu pemikiran, dalam pernyataannya dia menyatakan bahwa adalah suatu prinsip kekuasaan dalam lingkungan apapun bahwa kekuasaan yang lebih tinggi berhak mengurangi, mengubah dan menghapuskan kekuasaan yang lebih rendah. Karena itu maka negara berhak mengurangi, mengubah dan menghapuskan hukum adat, malahan negara kita berhak menghapuskan masyarakat-masyarakat hukum adat itu sendiri bagi perkembangan kota-kota, atau menggabungkan beberapa masyarakat hukum adat yang kecil-kecil menjadi satu masyarakat hukum adat ciptaan baru yang lebih bermanfaat. Perubahan ini bisa terjadi karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, atau karena

¹²⁷ Budi Agus Riswandi, 2004, Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global, dalam *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia No. 25 Vol. 11.

¹²⁸ Yoan Nursari Simanjuntak, 2006, *Hak Desain Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya. Hlm: 28

ada perkembangan peradaban dan kebudayaan dari luar. Dan hukum merupakan bagian dari peradaban dan budaya masyarakat itu sekaligus.¹²⁹ Dari pernyataannya ini, Hazairin mengamini adanya transplantasi hukum yang dilakukan oleh kuasa negara karena memang memiliki lingkup kekuasaan yang lebih besar dibanding dengan keberadaan hukum dalam arti tradisi atau adat dalam suatu masyarakat. Dalam hal keberadaan UU Hak Cipta yang merupakan produk budaya barat yang dinilai lebih maju, dan bahkan sudah diadopsi oleh banyak negara, maka sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa hukum hak cipta harus diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan besar dunia.

Dalam kajian singkat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum hak cipta dalam prakteknya kurang atau bahkan sama sekali tidak efektif diterapkan. Bukan saja masalah kaidah hukum yang diterapkan jauh dalam ranah berfikir masyarakat sebagai subjek hukum, aparat dan perangkat penegak hukum juga dinilai kurang responsif untuk secara aktif melakukan proteksi. Budaya masyarakat yang komunal menjadikan penerapan sistem hukum hak cipta yang bersifat individual kurang efektif.

b. Bentuk Perlindungan yang Ada dalam Masyarakat

¹²⁹ Hazairin, 1981, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta. Hlm: 45-46.

Selain mengenai penerapan suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang Hak Cipta, kajian ini juga mengarah pada bentuk perlindungan seperti apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat terutama oleh perajin batik dalam melindungi karya mereka berupa motif batik Kebumen tersebut. Tentu saja hal yang kedua ini tidak harus merujuk pada satu sistem perundang-undangan tertentu, dapat saja proses perlindungan yang mereka lakukan berasal dari kearifan lokal masyarakat perajin batik itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lawrence M. Friedmand bahwa dalam setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen substansial, struktural dan kultural. Bekerjanya sistem hukum tidak dapat hanya digambarkan melalui peraturan hukum yang berlaku. Hukum juga tidak dapat dilihat hanya sebagai perangkat norma yang logis dan konsisten. Hukum haruslah digambarkan sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat.¹³⁰

Ketiadaan perlindungan secara hukum ini, bukan berarti para perajin tidak memiliki cara untuk melindungi hasil karyanya. Bagi beberapa perajin batik yang memiliki pandangan bahwa karya intelektual mereka layak untuk dilindungi melakukan tindakan proteksi secara individu maupun secara bersama.

Meski secara nyata mereka tidak mampu memproteksi secara maksimal karya-karyanya, namun secara keseluruhan menilai penting

¹³⁰ Yoan Nursari Simanjuntak, 2006, *Hak Desain Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya. Hlm: 31.

adanya perlindungan atas moti-motif yang ada dan berkembang. Terutama jika dikaitkan dengan sentimen terhadap pembajakan oleh pihak asing atau luar negeri. Namun ketika dikontekskan pada pembajak dalam negeri dalam arti perajin yang mereka kenal dalam satu kelompok, mereka merasa tidak enak untuk memperlmasalahkannya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengikis budaya mencontek ini, dibuatlah sebuah motif batik secara bersama-sama dalam kelompok. Dengan begitu, setiap anggota kelompok itu bebas untuk menggunakan motif batik tersebut dalam berkarya.

Para perajin biasa membubuhkan tanda atau nama sebagai merek pada kain batik yang telah selesai mereka buat. Mengenai merek ini mereka sangat protektif. Jika ada nama merek yang sama di pasaran wilayah mereka, maka mereka akan segera menyelesaikan dengan langsung bertemu dengan pemilik mereka tersebut. Jika ada merek luar berupa tanda atau nama yang sama, maka mereka dengan senang hati akan mengganti merek yang telah mereka gunakan.

Merek menjadi sangat penting bagi mereka, karena bagi perajin merek itu menunjukkan kualitas batik, meskipun motif batik sama, atau bahkan jika salah satunya motif asli dan lainnya adalah tiruan, tidak ada masalah jika yang lebih laku adalah bajakan dengan nilai yang sama. Hal ini dikarenakan jenis batiknya adalah batik tulis yang sangat tergantung pada keahlian perajin dalam memainkan canting

ketika membatik. Sehingga siapa yang bisa bikin batik tulis paling halus, meskipun itu motif-motif bajakan, tetap akan dicari orang.

Namun kesadaran akan pentingnya merek ini tidak merata pada semua perajin. Beberapa perajin seperti Teguh, menyatakan bahwa memberikan merek pada hasil karya batik mereka akan sia-sia, karena ketika kain batik hasil karya kita berpindah tangan, atau diolah dalam bentuk lain seperti baju dan sebagainya, maka merek yang kemudian menempel bukan merek batik yang telah dia bubuhkan, melainkan merek toko, atau perusahaan garmen yang mengolah kain batik mereka itu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya semangat perajin untuk melakukan perlindungan atas motif-motif yang mereka buat sangatlah tinggi. Namun keterbatasan kesadaran dan perhatian aparat pemerintahan sendiri menjadikan mereka hanya bisa pasrah ketika hasil karya mereka banyak dibajak tanpa bisa berbuat apa-apa.

Dalam dataran teori, kondisi masyarakat Kebumen yang komunal dan perhatian mereka pada ketentuan hukum HKI, dapat diatasi dengan pola komunikasi yang tepat. Dalam hal penerapan hukum negara yang bersifat baru, perlu adanya komunikasi hukum agar tidak terjadi kemacetan. Tuntutan merancang-bangun sistem komunikasi hukum yang tepat guna dan yang negosiatif, menjadi sesuatu yang bersifat harus untuk mengatasi kemacetan hukum. Eugen Erlich menyatakan bahwa keharusan komunikasi hukum harus merupakan

“panggilan” tentang bagaimana cara agar tidak ada jurang pemisah antara UU/lembaga hukum yang dikembangkan dengan keadaan masyarakat yang hendak diaturnya.¹³¹

Selain perlu adanya pola komunikasi dan sosialisasi, perlu juga diperhatikan mengenai substansi hukum baru itu sendiri. HKI sebagai sebuah format aturan yang baru yang bersifat sangat individual, jika langsung dibenturkan dengan kondisi masyarakat yang begitu komunal, akan hanya menimbulkan inefisiensi. Hukum yang masuk dalam kebudayaan harus sedemikian rupa hadir secara diterima, yaitu dengan mengukuhkan dan mempengaruhinya tanpa distabilitas lokal. Dengan kedatangannya ke dalam kebudayaan, hukum sekaligus “belajar” dan “mengajar”. Inilah hakekat hukum dalam bagian mekanisme kontrol sosial dan rekayasa. Dengan demikian, kebudayaan dihormati dalam hukum dan hukum dipatuhi dalam kebudayaan.¹³²

Sosialisasi hukum terus menerus perlu dilakukan mengingat saat ini telah terjadi semacam privatisasi dunia hukum, yang hanya bisa dimasuki oleh kalangan tertentu. Sehingga timbul jurang yang memisahkan antara pengetahuan hukum versi rakyat dan pengetahuan hukum yang sudah diilmiahkan.¹³³

¹³¹ Eugen Erlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll (terjmh), NewYork: Russell & Russell, Inc, 1962. Dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Srikandi, Surabaya. Hlm: 204.

¹³² *Ibid.* Hlm: 287.

¹³³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media, Malang. Hlm: 76-77.

Hukum dalam hal ini menjadi sebuah instrumen, dimana hukum tidak saja mengokohkan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung dalam masyarakat. Namun hukum juga bisa memberikan arahan pada perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menghapus kebiasaan yang sudah tidak sesuai lagi atau menciptakan pola kebiasaan baru yang sesuai dengan tuntutan kondisi sosial yang lebih besar.¹³⁴

Dalam beberapa kajian tentang kepatuhan hukum, para sarjana masih sering terjebak pada persoalan *Knowledge of Law*, padahal tingkat pengetahuan akan sebuah hukum tidak serta merta linier dengan tingkat kesadaran hukum. Hal ini karena manusia saat ini terperangkap dalam heterogenitas yang kompleks, sehingga mereka sulit untuk hanya memihak pada satu sistem tunggal.¹³⁵ Selain mereka terikat secara hukum, namun juga terikat dalam norma sosial yang belum tentu sejalan dan mungkin justru bersebrangan dengan hukum.

Ketika ada keputusan seorang pencipta motif batik tidak mengajukan kasus itu ke hadapan pengadilan, tidak serta merta dapat dikatakan tidak sadar hukum. Dalam catatan Steewart Macaulay yang

¹³⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-enam, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm: 206.

¹³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah*, Cet. Ke-2, Bayu Media, Malang. Hlm: 158-162. Dalam kajian filsafat hukum, kepatuhan masyarakat kepada tatanan hukum negara adalah sebuah proses yang bersifat natural, meski pemaksaan melalui hukum dan kekuasaan negara itu berarti telah melanggar prinsip naturalitas itu sendiri. Seorang warga negara secara moral memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam melindungi dari pelanggaran maupun dalam rangka membantu mewujudkannya. Dan Negara adalah satu institusi yang paling niscaya untuk merealisasikannya. Lihat Andre Ata Ujan, 2009, *Membangun Hukum, Membela Keadilan; FILSAFAT HUKUM*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius. Hlm: 210-224.

dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam hubungan ekonomi, hukum sampai pada kedudukan akan digunakan atau tidak. Hukum menjadi tidak harus ditaati karena memang hukum harus ditaati, melainkan karena hukum digunakan atau tidak karena alasan dan tujuan yang lain, yaitu keuntungan ekonomi.¹³⁶ Keputusan untuk tidak menggunakan instrumen hukum dalam menyelesaikan “masalah hukum” dalam perspektif lain dalam hal ini ekonomi, lebih rasional dibanding dengan penyelesaian dengan cara legal. Rasionalitas ini diukur dengan kemungkinan kerugian yang akan diderita akan lebih besar nantinya.

Sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan seringkali alot dan memakan waktu yang lama. Sehingga perlu ditemukan sebuah formula yang efektif dan juga pengertian para aparat hukum agar tidak secara sepihak dan buta pertimbangan melakukan penegakan yang serampangan. Apalagi pengenalan pada hukum HKI terutama Hak Cipta, karena jika salah terima, sistem ini sangat berpotensi untuk menjadi pemicu masalah. Niat awalnya akan melindungi, tetapi pada ujungnya justru digunakan oleh pemilik hak untuk melakukan pemerasan kepada pihak-pihak tertentu.¹³⁷ Misalkan hanya karena salah cetak nama pencipta, seorang produser bisa digugat sampai jutaan rupiah.

¹³⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia; Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm: 91.

¹³⁷ Candra N. Darusman, Pengantar dalam Paul Goldstein, 1997, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan esok*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hlm: x.

Dalam dataran filosofis, hak-hak yang melekat dalam seseorang termasuk di dalamnya hak milik intelektual, tidak mengasingkan manusia dari kehidupan sosial, tapi sebaliknya merupakan syarat untuk membentuk kehidupan sosial yang sungguh-sungguh manusiawi. Hak-hak manusia tidak melepaskan orang dari sosialitasnya, tetapi sebaliknya menciptakan kemungkinan bahwa seseorang menjalin hubungan dengan orang lain dan dengan demikian justru memperkuat sosialitas. Mengakui hak dan kebebasan setiap orang tidak mengancam eksistensi masyarakat di mana etika dan perikemanusiaan dijunjung tinggi.¹³⁸ Penyesadaran akan posisi hak ini perlu menjadi salah satu materi dalam upaya sosialisasi hukum HKI, mengingat ini merupakan basis agar masyarakat mau mengerti akan keberadaan hak tersebut baik secara moral maupun secara hukum.

Pendekatan lain dapat diupayakan dengan mengembangkan kesadaran mengenai etika bisnis. Adanya pelanggaran atas hak cipta dan ketidakrelaan pencipta motif batik yang dibajak akan menimbulkan sebuah persaingan yang tidak sehat dalam ruang bisnis bersama. Etika bisnis sebagai tuntunan moral dalam melakukan kegiatan usaha yang berorientasi pada laba,¹³⁹ mestinya menjadi salah satu acuan dalam mengembangkan industri batik ini. Dengan

¹³⁸ K. Bertens, 2005, *Etika*, cet. Kesembilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm: 202.

¹³⁹ Bambang Eko Turisno, 2007, *Etika Bisnis*, Mandar Maju, Bandung. Hlm: 18.

dipegangnya etika bisnis maka akan menimbulkan sebuah persaingan yang sehat yang justru akan menguntungkan berbagai pihak.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kita ketahui dengan jelas bahwa dalam masyarakat terutama para perajin mulai tumbuh keinginan untuk melakukan proteksi atau perlindungan atas hasil karya mereka berupa motif. Penggunaan beberapa alternatif perlindungan yang mereka gunakan seperti penciptaan motif bersama-sama, pembubuhan tanda atau nama sebagai merek, atau bahkan berupa proteksi individual dengan tidak memberikan nilai lebih pada pembelian putus suatu batik, kiranya bisa dijadikan sebuah masukan pemikiran, sampai di mana kesadaran dan tingkat penerimaan masyarakat akan pentingnya perlindungan tersebut. Sehingga dalam upaya sosialisasi hukum HKI kemudian, para petugas dapat melakukan pendekatan yang tepat, tidak melulu melalui pendekatan hukum, misal bisa melakukan pendekatan dari aspek ekonomi seperti pentingnya etika bisnis dan sebagainya.

G. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen Dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kebumen

Salah satu potensi dari keberadaan Batik Kebumen selain potensi budaya adalah potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya. Dengan mengetahui besaran potensi tersebut diantara potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah kabupaten Kebumen yang lain, maka langkah-

langkah pemerintah Kabupaten Kebumen akan lebih jelas, terarah, dan terukur. Upaya yang diungkapkan berikut merupakan hasil penelusuran dalam beberapa regulasi dan juga wawancara ke berbagai informan kunci.

1. Peta Potensi Ekonomi di Kabupaten Kebumen

Dalam struktur ekonomi Kabupaten Kebumen, pertanian menempati rating teratas. Pada tahun 2005, sektor pertanian merupakan kontributor terbesar dari total PDRB yaitu mencapai 39,81%. Sektor ini didukung oleh sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Kebumen bekerja di sektor ini yang mencapai 52,85% atau 338.910 jiwa.

Potensi ekonomi pertanian diikuti oleh sektor jasa yang memberikan kontribusi sebesar 19,59%, kemudian selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan sebesar 11,35%.

Sektor lain yang menonjol adalah sektor industri yang setiap tahun kontribusinya selalu meningkat. Data terakhir menunjukkan kontribusi bidang ini mencapai 9,82%. Pada sektor ini didominasi oleh industri rumah tangga khususnya industri makanan olahan sebanyak 35.099 unit yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 75.410 orang. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen selalu positif, namun belum cukup signifikan untuk meningkatkan pendapatan

perkapitanya. Hal ini dikarenakan nilai tambah dari sektor pertanian dan industri pengolahan masih kecil/rendah.¹⁴⁰

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Kebumen memproyeksikan perekonomian dalam jangka panjang ke depan masih akan didominasi oleh sektor pertanian meski nilainya menurun. Industri akan berkembang meski seiring dengan menurunnya produktifitas pertanian tersebut, namun diperkirakan masih bersifat industri kecil dan menengah. Dari sektor jasa dan pariwisata, diperkirakan akan berkembang dan meluas dengan memanfaatkan keindahan alam Kebumen yang menyebar hampir ke semua wilayahnya.¹⁴¹

Dengan proyeksi ekonomi seperti di atas, sangat wajar jika melahirkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen yang berorientasi ke agrobisnis, yaitu “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis.”¹⁴²

Industri batik sendiri, diantara beberapa industri yang berkembang di Kebumen, tidak begitu memiliki posisi yang strategis. Tercatat dalam dokumentasi dinas perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen, Industri di Kebumen diklasifikasikan dalam beberapa jenis industri, yaitu Industri Furniture dan Kayu Olahan, Industri Agro, Industri Aneka Kripik, Industri Menengah, Industri Kerajinan, Industri Kimia, Industri Lanting, Tempe , Tahu dan

¹⁴⁰ RPJP Kebumen. Hlm: 44, 38, dan 39.

¹⁴¹ RPJP Kebumen. Hlm: 65-76

¹⁴² RPJP Kebumen. Hlm: 111

Minuman.¹⁴³ Dalam daftar Industri tersebut, Industri Batik masuk dalam kategori industri kerajinan dan hanya tercatat satu industri batik yang secara resmi memiliki izin, yaitu Paguyuban Lawet Sakti.

Berdasarkan deskripsi di atas maka jelas bahwa industri batik Kebumen sampai saat ini belum menjadi prioritas program pemerintah, karena dinilai belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kebumen

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang sangat luas untuk bisa melakukan langkah-langkah praktis untuk mengembangkan perekonomian daerahnya. Secara teoritis, Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat dapat melakukan upaya yuridis maupun non yuridis.

a. Upaya Yuridis

Dalam hal pengembangan perekonomian daerah, pemerintah kabupaten Kebumen telah mengeluarkan beberapa regulasi atau peraturan untuk mempermudah pelayanan perijinan maupun aturan-aturan mengenai penataan wilayah ekonomi. Namun secara

spesifik regulasi berkaitan dengan industri batik, pemerintah daerah Kabupaten Kebumen tidak mengeluarkan aturan apapun. Ketika dikonfirmasi ke Bidang Hukum Setda Kebumen, mereka menyatakan belum ada permintaan dan keluhan berkaitan dengan kepentingan regulasi mengenai industri kreatif khususnya terkait industri batik di Kebumen. Bahkan upaya sosialisasi hukum HKI yang terkait seperti merek dan hak cipta, tidak mereka lakukan. Sosialisasi hukum yang pernah dilakukan kepada perajin batik ternyata dimotori oleh pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan keterangan tersebut, pemerintah Kabupaten Kebumen belum melakukan upaya yuridis apapun dalam rangka mendukung perlindungan dan pengembangan industri kreatif terutama batik Kebumen.

b. Upaya Non Yuridis

Dalam rangka mengembangkan industri batik Kebumen, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah melakukan beberapa langkah strategis. Meski bukan merupakan prioritas, namun bisa dikatakan bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap keberadaan industri batik ini sangat besar. Beberapa tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain:

- 1) Inventarisasi

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan inventarisasi para perajin batik di Kabupaten Kebumen yang menyebar dalam empat kecamatan, lima desa, empat kelompok batik dan 379 perajin batik. (lebih jelas dapat dilihat dalam tabel. 2 hlm: 90). Selain inventarisasi jumlah perajin, Pemerintah belum mampu melakukan inventarisasi mengenai jumlah dan jenis motif batik Kebumen. Mengenai hal ini, ternyata perajin sendiri juga tidak semuanya memiliki dokumentasi hasil motif batik yang telah mereka hasilkan.

2) Sosialisasi Produk

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah beberapa kali melakukan kegiatan pengenalan produk batik Kebumen kepada masyarakat Kebumen sendiri maupun masyarakat luar. Beberapa bentuk kegitannya antara lain dengan mengadakan kompetisi desain motif batik. Hasil karya yang menjadi juara kemudian diambil menjadi hak milik pemerintah dan dipamerkan dalam ruang depan kantor Disperindagkop, sehingga setiap orang yang datang bisa langsung melihat produk-produk unggulan tersebut. Selain sosialisasi produk secara fisik, melalui web dunia maya. Dalam situs www.Kebumenkab.go.id. ditampilkan beberapa motif hasil karya perajin Kebumen yang telah di daftarkan di Ditjen HKI.¹⁴⁴

Hal ini sangat strategis mengingat dalam era global dimana informasi menjadi sangat penting, salah satu upaya tindakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonominya tidak dapat terlepas darinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi agar mampu menangkap sekaligus menganalisa informasi secara maksimal adalah sebuah tuntutan yang tidak dapat ditunda. Kemudian pergeseran kualitas produksi yang tidak saja dinilai secara material namun sejauh mana kualitas dan muatan pengetahuan yang terkandung di dalamnya, menjadikan porsi kesadaran atas hak kekayaan intelektual sangat penting.¹⁴⁵

Selain kegiatan kompetisi, pemerintah Kabupaten Kebumen juga selalu berusaha mengikutkan hasil karya batik Kebumen dalam setiap acara pameran batik di luar daerah. Pernah suatu ketika ikut acara pameran di Jakarta dan ternyata batik Kebumen mendapat Apresiasi tinggi dari Ibu negara Ani Yudhoyono. Ibu negara menilai, batik Kebumen layak untuk menjadi souvenir kenegaraan.¹⁴⁶

3) Pelatihan Pengembangan Keterampilan

Beberapa pelatihan telah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

¹⁴⁵ Ahmad Erani Yustika, 2006, *Perekonomian Indonesia; Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan*, Cet. Kedua. Bayu Media, Malang. Hlm: 92-93.

¹⁴⁶ <http://surabaya-metropolis.com/batik/batik-kebumen-bisa-jadi-suvenir-kenegaraan.html>. diunduh pada tanggal 21 April 2010.

Bapeda telah mengeluarkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disperindagkop berupa jadwal pelatihan sepanjang tahun empat tahun pemerintahan sejak tahun 2010 sampai 2013 sebagai berikut:

Tabel. 4. Program Pelatihan Perajin Batik

Tahun Program				Jenis Kegiatan
2010	2011	2012	2013	
				Penetapan Kelembagaan Klaster
				Pelatihan AMT
				Pelatihan Design
				Pelatihan Teknik Pewarnaan
				Pelatihan Permodalan
				Pelatihan Alat Cetak
				Kegiatan Promosi

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Kebumen

4) Pendaftaran Hak Cipta atas Beberapa Motif Batik Kebumen

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen membuktikan keseriusan perhatian mereka pada industri batik tulis Kebumen. Salah satu buktinya adalah memfasilitasi perajin untuk bisa mendaftarkan hasil karya motif mereka ke Ditjen HKI untuk mendapatkan sertifikat hak cipta. Ada 14 motif batik tulis Kebumen yang telah didaftarkan dengan biaya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Empat belas motif tersebut merupakan hasil karya dua orang perajin batik yang cukup produktif yaitu Wahyuni dari desa Jemur dan Teguh Budiyanto dari desa Sliling.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tampak bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai memiliki keseriusan dalam menangani

prospek batik ini. Namun sayang sekali ketika upaya-upaya ini seolah tidak memiliki arah pada sektor budayanya. Mereka memfokuskan pada peningkatan kemampuan perajin membatik tanpa melakukan penyeimbangan pada nilai-nilai budaya dari batik itu sendiri.

H. Kendala Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kebumen

Dalam usaha mendorong perlindungan dan pengembangan industri batik Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen menemui beberapa kendala, baik kendala yang bersifat yuridis maupun non yuridis.¹⁴⁷

a. Kendala Yuridis

i. Pengetahuan Terhadap HKI Masih Kurang

Pengetahuan masyarakat pada umumnya maupun para perajin secara umum masih rendah. Hal ini tampak jelas pada banyaknya peniruan beberapa motif yang dinilai bagus. Peniruan ini menjadi sebuah kebiasaan yang sampai saat ini belum pernah dipermasalahkan. Di lingkungan para perajin sendiri peniruan motif yang laku dipasaran menjadi hal yang biasa. Sementara masyarakat sendiri belum juga bisa memahami urgensi

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Sojimun, staf bidang Industri Disperindagkop Kabupaten Kebumen. Tanggal 18 Maret 2010. Selain itu juga dikomparasikan dengan keterangan dari hasil wawancara dengan beberapa perajin batik pada tanggal 31 Mei 2010.

perlindungan HKI, sehingga lebih suka membeli batik yang murah meskipun merupakan hasil peniruan motif. Hal ini menjadikan usaha pemerintah dalam mendaftarkan beberapa motif batik Kebumen menjadi tidak berarti apa-apa. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang HKI, menyebabkan perlindungan atas karya-karya motif batik Kebumen tidak efektif.

ii. Belum Ditetapkannya Motif Tradisional Kebumen Secara Legal

Sampai saat ini, secara legal pemerintah Kabupaten Kebumen melalui melalui dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi tentang keberadaan motif batik tradisional. Sehingga masih terdapat kerancuan mengenai motif-motif tradisional Batik Kebumen. Ketiadaan pernyataan ini, menjadikan beberapa konsep perlindungan atas motif-motif batik Kebumen tidak begitu jelas, apakah motif tersebut merupakan motif tradisional ataukah motif kontemporer. Hal ini dikarenakan diantara perajin sendiri masih berselisih tentang keberadaan keberadaan motif tradisional tersebut.

b. Kendala Non Yuridis

i. Kendala Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Anggaran dana yang minim untuk bidang pengembangan industri batik dinilai masih minim. Bahkan Bapak Sojimun, seorang staf bidang Industri yang berhasil ditemui, menyatakan kalau tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan pengembangan industri batik ini. Biaya pendaftaran hak cipta yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah, menurutnya adalah sisa anggaran pemerintah dari pos yang lain. Dengan demikian, minimnya anggaran dana benar-benar menjadi kendala utama dari pemerintah Kabupaten Kebumen untuk lebih meningkatkan perlindungan dan mengembangkan industri batik Kebumen.

ii. Batik Tulis Sulit Dikembangkan Secara Massal

379 perajin yang terdata di Kabupaten sebagian besar adalah perajin batik tulis. Kendala utama dari batik tulis ini adalah sulitnya dilakukan dalam jumlah yang massal. Dalam satu bulan saja, seorang perajin yang sudah mahir paling banyak hanya bisa menyelesaikan dua helai kain batik halus. Hal ini menyebabkan pengembangan batik tulis Kebumen sulit untuk mencapai jumlah besar. Tindakan antisipasi yang sering dilakukan oleh para perajin ketika mendapatkan pesanan dalam jumlah besar adalah dengan membagi pekerjaan dengan kawan perajin dalam satu kelompok. Kesulitan produksi dalam jumlah massal juga menyebabkan batik tulis Kebumen tidak begitu memasyarakat dalam kalangan banyak,

dalam arti batik tulis Kebumen masih bersifat elitis, karena yang menjadi konsumen batik masih oleh kalangan menengah ke atas.

iii. Batik Sebagian Besar Hanya Sebagai Pekerjaan Sambilan

Berdasarkan penelusuran lapangan, para perajin batik sebagian besar tidak menggantung hidup dari usaha batik tersebut. Usaha batik hanya menjadi kegiatan sampingan diantara waktu selang ibu-ibu di rumah. Hal ini menyebabkan pengembangan batik Kebumen menjadi sulit karena usaha batik tidak dilakukan secara serius, hanya sebagai sampingan.

iv. Pengadaan Bahan Kain yang Masih Mendatangkan Dari Luar

Sampai saat ini, kesulitan para perajin dalam memperoleh bahan dasar kain mori yang akan dijadikan kain batik. Menurut para perajin pemerintah mestinya bisa memfasilitasi keberadaan koperasi batik di daerah Kebumen, agar para perajin bisa memperoleh bahan-bahan dasar pembuatan batik di daerahnya sendiri, tidak harus ke luar daerah. Sementara ini mereka banyak mendapatkan bahan-bahan dasar batik di Yogyakarta. Kendala ini terkait erat dengan prioritas program juga anggaran dana yang mestinya diperuntukkan industri batik. Namun sampai saat ini, rupanya memang industri batik belum menjadi prioritas.

v. Persaingan dengan Batik Cap dan Tekstil Printing Bermotif Batik dari Luar

Kendala pemerintah Kabupaten yang sekaligus menjadi tantangan adalah persaingan. Banyak batik dari luar seperti batik Pekalongan yang memiliki pasar luas termasuk di Kebumen. Apalagi batik Pekalongan relatif lebih murah, karena lebih banyak berkembang batik cap dan taktis printing bercorak batik. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada usaha Pemerintah untuk mengembangkan batik tulis Kebumen.

vi. Minimnya Kreatifitas Perajin

Menurut pihak Disperindagkop, kreatifitas perajin dinilai masih sangat minim. Sebagian besar perajin masih sebatas buruh yang menerima pesanan membatik dengan motif yang sudah disiapkan oleh pemesan. Hanya beberapa perajin saja yang produktif untuk membuat motif-motif baru. Hal ini menyebabkan perkembangan batik Kebumen lamban dan sulit untuk bersaing dengan batik daerah lain yang memiliki motif beragam.

Perhatian pemerintah daerah kepada industri batik mestinya diperbesar, karena pada kenyataannya usaha batik telah eksis di beberapa desa dan digeluti oleh ratusan orang. Hal tersebut merupakan modal awal yang sangat potensial. Pemerintah tidak perlu lagi direpotkan dengan persoalan penyediaan lapangan kerja, karena mereka telah memiliki pilihan kerjanya masing-masing. Dalam hal ini pemerintah hanya tinggal melakukan dorongan fasilitasi bagi para perajin batik agar bisa meningkatkan mutu dan tingkat produksinya.

Jika pemerintah mampu menggairahkan industri batik yang berbasis desa ini, pemerintah Kabupaten Kebumen dapat disebut sebagai pelopor penggerak ekonomi kerakyatan, yaitu cara atau sifat dan tujuan pembangunan dengansarana utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya tinggal di pedesaan.¹⁴⁸ Namun ekonomi kerakyatan ini tidak serta merta terfokus di desa saja, namun juga pembangun di kota yang mendukung pengembangan desa. Karena dalam perspektif ini, penerapan teknologi yang tepat di desa akan meningkatkan daya kemampuan desa untuk mengembangkan diri.

Potensi batik Kebumen yang memang tumbuh dari bawah, dalam arti merupakan rintisan masyarakat sendiri yang berbasis di desa, perlu terus digali. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan maupun pelatihan harus didukung dengan peningkatan perajin untuk berorganisasi. Salah satu kendala utama yang dirasakan perajin adalah ketersediaan bahan bagi baik kain maupun pewarna, perlu menjadi perhatian khusus. Pemerintah perlu mendampingi masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem kelompok yang lebih modern tidak saja berdasarkan pada orientasi kebersamaan, namun juga orientasi ekonomi. Pengadaan koperasi batik yang bisa membantu menyediakan bahan baku batik bagi anggotanya dengan harga bersaing menjadi satu tuntutan yang sangat realistis untuk bisa mengikis kendala-kendala tersebut.

¹⁴⁸ Sarbini Sumawinata, 2004, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm: 161-218.

Penyaluran produk batik dalam berbagai acara dan stan khusus di objek-objek wisata juga bisa menjadi alternatif yang mungkin dilakukan. Pariwisata sangat dekat dengan sistem HKI, hal ini bukan karena orientasi pariwisata yang berbasis pada wisata alam, seni dan budaya, namun juga karena kedekatan pariwisata dengan pengembangan ekonomi. Imbas dari tumbuhnya pariwisata yang dirasakan secara langsung dari masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri.¹⁴⁹ Sehingga sangat penting pengenalan atas HKI kepada masyarakat yang memiliki basis pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata seperti Kebumen.¹⁵⁰ Hal ini sangat relevan sekali karena Kabupaten Kebumen memiliki begitu banyak objek wisata alam yang sangat menarik.

¹⁴⁹ Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm: 141-142.

¹⁵⁰ Hal ini sangat relevan sekali karena Kabupaten Kebumen memiliki begitu banyak objek wisata alam yang sangat beragam dan menarik dari wisata pantai, goa, sumber air panas, cagar alam nasional, peninggalan sejarah, sampai wisata budaya tahunan pada musim lebaran. Lihat dalam <http://www.kebumenkab.go.id/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=11>

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa simpulan.

1. Eksistensi Batik Kebumen dapat dilihat dari ciri khas dan potensi ekonomi yang dimilikinya. Batik Kebumen lebih berkembang sebagai murni seni batik yang menekankan pada nilai artistik bukan pada nilai makna dibalik sebuah gambar. Sehingga justru menunjukkan keunikannya sendiri. Corak batik Kebumen bercirikan gambaran tentang alam sekitar berupa flora dan fauna dengan warna khas serba muda. Motif bunga dan daun dengan warna muda serta burung-burungan menjadi dominan. Pengaruh geografis dan kondisi alam yang bercampur antara daerah bukit dan pantai sangat kental dalam berbagai motif yang muncul sehingga membuat motif batik Kebumen sangat ekologis. Kondisi sosial dan budaya yang beragam dilihat dari keragaman bentuk wilayahnya, juga menginspirasi perajin untuk menelurkan motif jagatan yang khas. Adanya pengaruh budaya dari luar tidak tampak dari motif-motif Kebumen yang murni terinspirasi dari alam sekitarnya. Batik Kebumen yang berorientasi pada alam, menggambarkan masyarakat Kebumen yang bersahaja dan sangat menghormati kehidupan yang ditawarkan oleh alam.

Secara ekonomi, Batik Kebumen memiliki keberadaan yang cukup meyakinkan. Meskipun tidak atau belum menjadi salah satu industri yang murcusuar, namun mampu menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam satu bulan, satu orang prajin bisa menyelesaikan 1-2 lembar batik tulis halus, dengan nilai jual 100-600 ribu perlembar, jika bekerja secara berkelompok, satu bulan bisa menghasilkan 30-50 lembar. Pemasaran produk batik Kebumen juga sudah cukup luas. Selain di pasar tradisional dan beberapa toko batik yang tersebar di kota kebuman, batik Kebumen sering diikutkan dalam pameran-pameran produk baik regional maupun nasional. Bahkan beberapa kali para perajin mendapat pesanan dari luar negeri.

2. Perlindungan Motif Batik Tradisional Kebumen dapat dikelompokkan pada perlindungan motif tradisional dan motif kontemporer. Baik motif tradisional maupun kontemporer termasuk objek yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Perlindungan motif atau corak tradisional batik kebumen dilindungi berdasarkan pada pasal 10 ayat (2). Sedangkan motif kontemporer batik kebumen, dilindungi berdasarkan pada Pasal 12 huruf i. Sistem perlindungan bersifat deklaratif, artinya hak cipta itu timbul secara otomatis tanpa harus ada proses pendaftaran. Hak cipta atas motif tradisional Batik Kebumen di pegang oleh negara, sedangkan hak cipta motif kontemporer dipegang langsung oleh pencipta. Masa perlindungan

bagi hak cipta motif Tradisional Batik Kebumen tidak terbatas, sedangkan masa perlindungan atas motif kontemporer adalah selama umur hidup pencipta sampai 50 tahun setelah kematiannya. Bentuk perlindungan yang diberikan atas motif tradisional adalah pelarangan bagi masyarakat Indonesia untuk memonopoli motif tersebut, dan juga keharusan mendapat izin bagi warga negara asing yang ingin menggunakan atau memanfaatkan motif batik tradisional tersebut. Sedangkan pada motif kontemporer, perlindungan diberikan dalam bentuk hak eksklusif untuk memanfaatkan hasil karyanya, melarang atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan karyanya. Upaya penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, pihak yang memiliki hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau permohonan penyitaan barang. Jika terjadi pelanggaran pidana, pemilik hak juga dapat melaporkan tindak pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang untuk dilakukan tindakan pidana.

3. Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai memiliki keseriusan dalam menangani prospek batik. Namun sayang sekali ketika upaya-upaya ini seolah tidak memiliki arah pada sektor budayanya. Mereka memfokuskan pada peningkatan kemampuan perajin membatik tanpa melakukan penyeimbangan pada nilai-nilai budaya dari batik itu sendiri. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendorong perlindungan dan

pengembangan industri batik tradisional hanya mencakup upaya non yuridis saja, antara lain:

- a. Inventarisasi
- b. Sosialisasi produk
- c. Pelatihan pengembangan keterampilan
- d. Pendaftaran hak cipta atas beberapa motif batik kebumen

4. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendorong perlindungan dan pengembangan industri batik tradisional antara lain:

a. Kendala Yuridis

- 1) Pemahaman perajin terhadap HKI masih kurang
- 2) Belum ditetapkannya motif tradisional Kebumen secara legal

b. Kendala Non Yuridis

- 1) Kendala anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
- 2) Batik tulis sulit dikembangkan secara massal
- 3) Batik sebagian besar hanya sebagai pekerjaan sampingan
- 4) Pengadaan bahan kain yang masih mendatangkan dari luar
- 5) Persaingan dengan batik cap dan tekstil printing bermotif batik dari luar
- 6) Minimnya kreatifitas perajin

D. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti dapat merumuskan beberapa saran yuridis untuk meningkatkan perlindungan atas batik tradisional Kebumen dan pengembangan batik Kebumen sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya legal oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mengeluarkan surat penetapan beberapa motif batik Kebumen sebagai motif batik tradisional Kebumen, sehingga bentuk perlindungan atas suatu motif jelas, apakah merupakan motif tradisional atau motif kontemporer.
2. Mendaftarkan motif-motif tradisional Kebumen ke Ditjen HKI atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, untuk melindungi dari monopoli individu dan pelanggaran dari asing.
3. Perlu dilakukan inventarisasi dan dokumentasi secara lengkap, bukan saja jumlah perajin untuk memetakan potensi ekonomi, namun juga perlu dilakukan inventarisasi motif-motif tradisional batik Kebumen agar dalam implementasinya tidak akan terjadi saling tarik antara motif tradisional maupun kontemporer.
4. Upaya sosialisasi hukum HKI terutama hak merek dan hak cipta bagi kalangan perajin batik sangat mendesak, mengingat banyaknya terjadi pelanggaran karena masih minimnya pemahaman mereka tentang konsep hukum HKI tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Afriliyana Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia; Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung.
- Andre Ata Ujan, 2009, *Membangun Hukum, Membela Keadilan; FILSAFAT HUKUM*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anesia Aryunda Dofa, 1996. *Batik Indonesia*, PT. Golden Terayon Press, Jakarta.
- Aris Saharjo, dkk. 1999, *Rusuh di Kebumen 7 September 1998*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.
- Bambang Eko Turisno, 2007, *Etika Bisnis*, Mandar Maju, Bandung.
- Bernard L. Tanya, 2006, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Srikandi, Surabaya.
- Budi Agus Riswandi, 2004, Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global, dalam *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia No. 25 Vol. 11.
- Budi Santoso, 2008, *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Pustaka magister Semarang, Semarang.
- Candra N. Darusman, Pengantar dalam Paul Goldstein, 1997, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan esok*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Srikandi, Surabaya.
- Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan*, Cet. Kedua. Bayu Media, Malang.
- Dharsono Sony Kartika, 2007, *Budaya Nusantara (Kajian Konsep Mandala dan Konsep Triloka/Buana terhadap Pohon Hayat pada Batik Klasik)*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Edy Damian dalam Trisno Rahardjo, 2006, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*, Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta.

- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Etty Susilowati Suhardo, *Hak Cipta*, makalah disampaikan pada Pelatihan HKI. Recruitment of Training Provider for Retooling Program Batch III, Semarang.
- Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hazairin, 1981, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ignatius Haryanto, Dilema Kebudayaan Tradisional di Era HKI dalam *Majalah Kombinasi*, Edisi 10 Agustus 2005. Dapat dibaca dalam alamat situs: <http://www.kombinasi.net>.
- K. Bertens, 2005, *Etika*, cet. Kesembilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2000, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 8. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kuntowijoyo, 2006, *Budaya dan Masyarakat*, edisi paripurna, cet. Pertama. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- M. Francis Abraham, 1991, *Modernisasi di Dunia Ketiga Suatu Teori Umum Pembangunan*, Penerjemah. M. Rusli Karim, PT TiaraWacana Yogya, Yogyakarta.
- M. Saleh Soeaidy, Otonomi daerah dan resolusi Konflik Pusat-daerah, dalam Syamsyuddin Jadir (edtr), 2005, *Desentralisasi & Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), Jakarta.
- Marshal Leaffer, 1998, *Understanding Copyright Law*, Matew Bender, New York.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES.
- Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakrta.
- Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Bayu Media Publishing, Malang.
- OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, PT. Radja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025*. Lampiran.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Kedua. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Subekti, 1992, *Bunga rampai Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung, Alumni.
- Rahmi Jened, 2001, *Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs*, Fak. Hukum Unair, Surabaya.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Robert M Sherwood, 1990, *Intellectual Property and economic Development*, Alexandria Virginia.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional* terakhir tahun 2007.
- Saifuddin Azwar, 1999, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sarbini Sumawinata, 2004, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sarwono, *Reposisi Kreasi Budaya dalam Penguatan Masyarakat Lokal*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional PEMBERDAYAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) GUNA PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL, Surakarta, 24 April 2010.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media, Malang.
- _____, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia; Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia; Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-enam, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Slamet Subiyantoro, *Pemetaan Ekspresi Budaya Tradisional Se Solo Raya Sebagai Potensi Produk Daerah*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional PEMBERDAYAAN HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL (HKI) GUNA PENGEMBANGAN PRODUK
UNGGULAN DAERAH DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL,
Surakarta, 24 April 2010.

- Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah*, Cet. Ke-2, Bayu Media, Malang.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Sudargo Gautama, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung.
- Syafrinaldi, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru.
- Syamsyuddin Jadir (edtr), 2005, *Desentralisasi & Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), Jakarta.
- Tamotsu Hozumi, 2004, *ASIAN Copyright Handbook Indonesian Version*, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Jakarta.
- Tim Lindsey, dkk. 2005, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Cet. 4. Alumni, Bandung.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yoan Nursari Simanjuntak, 2006, *Hak Desain Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya.
- Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zen Umar Purba, *Sistem HAKI Nasional dan Otonomi Daerah*, makalah disampaikan pada acara seminar nasional, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI DAN MEREK, diselenggarakan bekerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum Universitas Manado, Yayasan Klinik HaKI, JIII, APIC, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, didukung oleh JPO dan Ditjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM, Manado, 18, Februari 2002.

Media Cetak

“Batik Indonesia Harus Dilindungi”, *Kompas*, Selasa 9, September, 2008.

“Memahami Brand sebagai Aset Berharga”, *Suara Merdeka*, Sabtu, 6 Februari 2009

Kompas, Rabu, 5 Mei 2010.

Media Elektronik

<http://batikKebumen.blogdetik.com/index.php/perihal/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Batik>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kebumen

<http://ip52-214.cbn.net.id/id/arsip/1990/12/22/HK/mbm.19901222.HK17557.id.html>.

<http://ip52214.cbn.net.id/id/arsip/1990/12/22/HK/mbm.19901222.HK17557.id.html>

http://leisure.id.finroll.com/nite-life/17-berita-terkini/3320-____masyarakat-kurang-tahu-produksi-kain-nusantara____.html

<http://ondosupriyanto.blogspot.com/2008/11/batik-kebumen.html>

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

<http://surabaya-metropolis.com/batik/batik-kebumen-bisa-jadi-suvenir-kenegaraan.html>.

<http://traditionalfabric.blogspot.com>

<http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1264244705/batik-kebumen>

<http://www.antaranews.com/berita/1254491066/batik-indonesia-resmi-diakui-unesco>.

<http://www.Kebumenkab.go.id/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=37>

<http://www.kebumenkab.go.id/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=37>. Ahmad Erani Yustika, 2006, *Perekonomian Indonesia*;

<http://www.kebumenkab.go.id/index.php?name=News&file=article&sid=965&theme=Printer>

<http://www.kombinasi.net/?lang=id&rid=19&cid=83&sid=0&xcode=172&id=298>.

<http://www.rumahpesonakain.org/kain-nusantara>

majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1990/09/01/HK/mbm.19900901.HK19380.id.html

